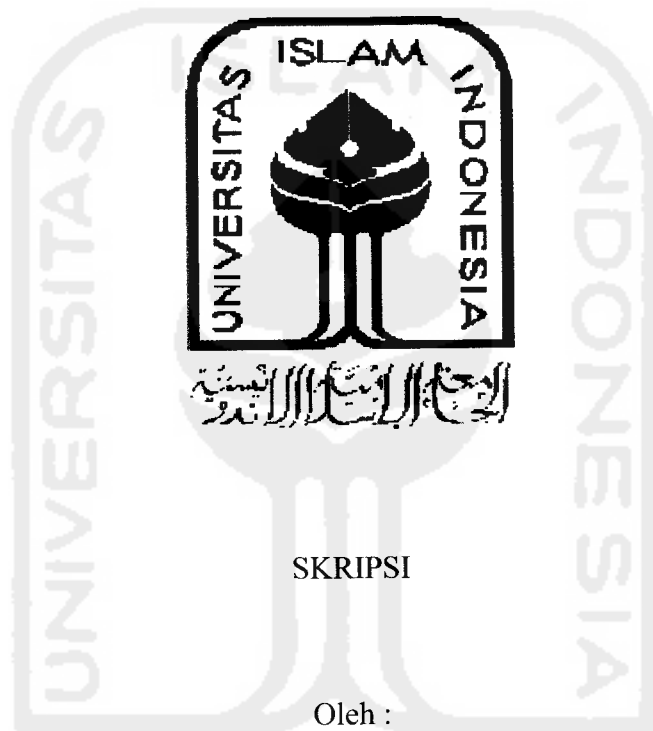


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KAJIAN PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA PADA ANGGARAN
BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG**



Oleh :

Nama : Adha Dewi
No. Mahasiswa : 01312292

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KAJIAN PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA PADA ANGGARAN BELANJA
DAERAH KOTA SINGKAWANG**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh :

Nama : Adha Dewi
No. Mahasiswa : 01312292

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN BEBAS PLAGARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 2005

Penyusun,

(Adha Dewi)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PACUAN HATI

Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Karena itu bila selesai suatu tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh

(QS. Asy Syarh : 5-7)

Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu, ketenangan, dan kehormatan diri, dan besikaplah rendah hati kepada orang-orang yang mengajarmu

(HR. Athabrani)

Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau Keberuntungan semata, sebuah sukses terwujud karena ikhtihar Melalui perencanaan yang matang, keyakinan, dan keuletan, Ketabahan dan karena niat baik kepad Allah SWT.

(Prof. Dr. Kuswadi Harjo Sumantri, SH)

makasiy dah dikasi tempat buat ngetik, palagi dukungan berupa ngorok-
ngorok kalian, benar-benar memberi inspirasi.

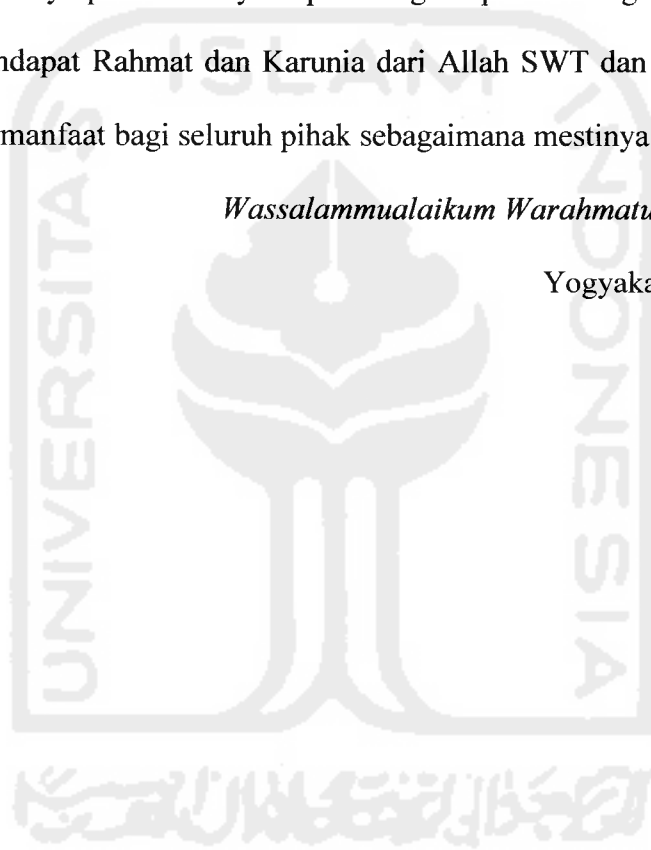
11. Ndyuutzzz, tukang nangkapin kodok-kodok yang meresahkan, *what a beautiful secret we have, thanks for be there for me, gonna mizz u always.*

12. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat dan Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 23 Maret 2006



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**KAJIAN PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA PADA ANGGARAN BELANJA
KOTA SINGKAWANG**

**Disusun Oleh: ADHA DEWI
Nomor mahasiswa: 01312292**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 April 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak.....

Penguji : Dra. Primanita Setyono, MBA, Ak.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dra. Primanita Setyono, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSEMBAHAN

be



Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ayah dan Mama Tercinta

(Semoga ini bukan akhir dari usaha ananda untuk membahagiakan kalian yang tercinta, tapi merupakan awal dari usaha itu, terimakasih yang tak terhingga atas tiap tetes keringat yang dikucurkan, tiap pelukan yang menenangkan, dan seluruh kebahagiaan karena telah menjadi bagian dari kehidupan kalian)

Uni dan Abang Tersayang

(Terimakasih atas dukungan yang sudah diberikan dari mulai awal skripsi ini dibuat hingga di saat akhir yang kritis, selalu bangga jadi adik kalian)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kata Pengantar

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat serta Hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja DAerah Kota Singkawang.**

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII). Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Achmad Sobirin, MBA, Ak sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan saran, nasehat, bimbingan dan kritikan dari awal hingga akhir terselainya skripsi ini.
3. Bapak Walikota dan wakil Walikota serta seluruh staf di lingkungan kantor Pemerintah Kota Singkawang atas izin melaksanakan penelitian ini, serta telah turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ayah (H. Mazmur Daud) dan Mama' (Mudarnis). Tiada pernah akan cukup kertas dan kata yang dapat mewakili ucapan terimakasih ku kepada kalian.
5. Uni-ku dan Suami ma calon keponakan, serta Abangku atas segala jenis dan bentuk dukungan, dan rela menyisihkan uang gaji buat ditransfer ke rekening ku, *u're all the greatest.*
6. Sahabat-sahabatku di kampus, Wiwik "my huny", Lia, Dian, Reni, Wika, Mayang, Andry, Wawan, Yoga, Gatot, Lucky, Sendy, dan Rino, terimakasih atas semua saran yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kos bunga, Bapak dan Ibu Agus Wirastomo, *My 2nd Parent*, dan para penyewa kamar, Tyas yang rajin nraktir, Qk yang rajin banget alergi, Desi yang rajin kelililing dunia sekarang, Ino yang rajin ngasi pendapat bijak, terimakasih atas semua pembelajaran tentang hidup yang telah dibagikan.
8. *The Most Fabulous friends*, yang selalu ada buat ku dari dulu hingga saat ini, Dies, Asep, Birrul, Irul, Marsis, Nanang, Tata, Tyas Kage, "*friendship is forever*">> *u all made those words not only just words, but something that is so real.*
9. Temen-temen KKN SL-119, Ina, Erni, Ida, Siffa, Khafiz, Mas Rino, Arafat, Teguh, Rahma, dan Arief.
10. All Sakura Net Crews, "Bapak-bapak Boz" Pak-Nur, Pak San, Si Admin, Jurexyz, dan Para Cso, Achie_kyo, Arum Vie_dya, Alid_mu, KurtBeArdy, Deddi_online, Agus Nunu_adn, waktu mainboard komputer rusak,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Berita Acara Ujian	iv
Halaman Persembahan	v
Pacuan Hati	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
2.2 Akuntansi Biaya	22
2.3 <i>Activity- Based Costing</i>	22
2.4 <i>Activity-Based Costing</i> Untuk Pemerintah Daerah	36

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

3.1	Sejarah Pembentukan Pemerintah Kota (PEMKOT) Singkawang	39
3.2	Administrasi Pemerintahan	41
3.3	Pengembangan Ekonomi	44
3.4	Kependudukan	46
3.5	Struktur Organisasi	50
3.6	Lingkungan Strategis	57

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1	Pengantar	59
4.2	Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang	59
4.3	Prosedur Penerapan Akuntansi Biaya <i>Activity-Based Costing</i> Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang	61

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	131
5.2	Keterbatasan dan saran	132

DAFTAR PUSTAKA	133
-----------------------	-----

LAMPIRAN	136
-----------------	-----

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Daftar Tabel

Tabel	Hal
1. Kategori Biaya dalam Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang	64
2. Hasil Identifikasi <i>Direct Cost</i> Terhadap Program	76
3. Hasil Identifikasi Resource Driver	84
4. Resource Driver Consumption Setiap Aktivitas	107
5. Perhitungan Activity Based Process Costing	108
6. Pembentukan <i>Activity Cost Pool</i>	118
7. Perhitungan Activity Consumption Factors dan Activity Cost	120
8. Activity Based Object Cost	124
9. Cost Per Unit	125
10. Ilustrasi Laporan Net Cost	127
11. Laporan Cost per Unit	130

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan,
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, Pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang sangat penting dimiliki, seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan keuangan publik terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pembelanjaan publik yang dapat digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money budget*).

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan

target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat, dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dalam siklus anggaran, yaitu pada persiapan dan penyusunan anggaran, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Dimana penentuan taksiran ini dilakukan dengan proses estimasi. Dalam persoalan estimasi, terdapat faktor *uncertainty* yang cukup tinggi. (Mardiasmo, 2001).

Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan.

Pelaksanaan akuntansi biaya khususnya sistem ABC dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Sistem ABC memperbaiki sistem penghitungan biaya dengan menekankan pada aktivitas sebagai objek biaya dasar. Aktivitas dapat berupa kejadian, tugas, atau unit pekerjaan dengan tujuan khusus (Hongren, 2005). Sistem ini akan menghasilkan penghitungan biaya aktivitas yang lebih akurat. Sehingga pengalokasian biaya ke produk yang berbeda akan menghasilkan

penghitungan biaya produk yang lebih akurat pula, dan pada akhirnya dapat tercipta pengendalian terhadap berbagai output yang dihasilkan.

Salah satu daerah otonomi yang menarik perhatian adalah Kota Singkawang, dimana kota ini merupakan kota termuda di Kalimantan Barat. Melalui perjalanan panjang dan kegigihan banyak pihak yang peduli, Kota Singkawang yang semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sambas, kini resmi menjadi daerah otonom. Sebagai kota baru, kegairahan dalam mengembangkan kota ini harus mendapatkan perhatian penuh. Ini sangat penting untuk mempertahankan Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan kedua di Kalimantan Barat.

Anggaran Belanja Kota Singkawang dalam penyusunan serta Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000, dimana anggaran disusun dengan basis kinerja, yang menghubungkan antara belanja yang dikeluarkan dengan program atau tujuan yang ingin dicapai.

Perbaikan di segala bidang dilakukan untuk mengembangkan daerah. Usaha-usaha dalam mengembangkan daerah dilakukan pemerintah melalui berbagai program. Dalam upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan program serta pengalokasian sumber-sumber pada aktivitas yang menambah nilai bagi publik. Dengan sistem akuntansi yang baik, kualitas suatu anggaran daerah akan dapat tercapai. Maka penelitian ini dilakukan untuk melihat efisiensi pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran daerah dengan suatu metode penghitungan biaya yaitu *Activity Based Costing*.

Penelitian yang serupa dengan objek penelitian yang berbeda pernah dilakukan oleh Astiwi (2001) yang membahas kajian penerapan akuntansi biaya dalam pelaksanaan pengendalian terhadap anggaran belanja kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa pengendalian terhadap pembebanan biaya dalam pelaksanaan aktivitas dari berbagai unit/dinas/instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan.

Berkenaan dengan penelitian di atas, peneliti ingin meneliti kembali permasalahan yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Astiwi diatas, dimana perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan, terletak pada objek penelitian. Astiwi (2001) menggunakan data rekening belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000/2001, sedangkan penelitian ini menggunakan data rekening belanja pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2003/2004.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul "***Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Kota Singkawang***".

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000 pada pasal 8 mengatur bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Pada pendekatan ini, anggaran alokasi biaya dilakukan sesuai dengan pertimbangan kelayakan alokasi dana dengan beban kerja yang harus diselesaikan.

Dalam anggaran kinerja yang digunakan oleh pemerintah daerah saat ini, *unit cost* seharusnya dapat terlihat, namun pada kenyataannya, masih banyak daerah yang belum menjalankan anggaran berbasis kinerja ini secara benar. Belanja atau pengeluaran yang dilakukan suatu unit kerja/dinas/instansi belum dikaitkan dengan program yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dalam penentuan biaya standar, mencoba menawarkan metode penghitungan biaya dalam menentukan *unit cost for service*.
2. Yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai standar efisiensi dan efektifitas belanja Pemerintah Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis data-data rekening belanja setiap unit/dinas/instansi pada Pemerintah Kota Singkawang. Hingga pada akhirnya dapat ditentukan *unit cost* untuk suatu program, dimana proses penentuan *unit cost* itu ditentukan dengan menggunakan *Activity-Based Costing System*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama

pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selanjutnya dapat sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

Sementara bagi PEMDA Kota Singkawang diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam penyusunan Anggaran Belanja Daerah yang menerapkan akuntansi biaya agar anggaran berkualitas.

Dan pada penulis sendiri, dimana diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pengembangan wawasan tentang akuntansi sektor publik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berbagai definisi yang berhubungan dengan penelitian ini, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III : Tinjauan Objek Penelitian

Berisi uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas obyek penelitian atau data umum dan data khusus. Data umum meliputi: sejarah dan perkembangan Kota Singkawang, perekonomian, kependudukan, dan informasi lainnya yang diperoleh dan mendukung dalam penelitian ini, data khusus berupa anggaran belanja Pemerintah Kota Singkawang, Tahun Anggaran 2003/2004

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Analisis dilakukan terhadap biaya dalam aktivitas operasi dan non operasi. Setelah diadakan pemisahan antara aktivitas operasi dan non operasi selanjutnya dilakukan kajian penerapan ABC terhadap komponen biaya yang masuk kategori aktivitas operasi. Rekening biaya dalam Anggaran Belanja Daerah kemudian dibebankan ke aktivitas yang membentuk proses.

Bab V : Penutup

Penutup berisi kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah dilakukan serta saran kepada pemerintah Kota Singkawang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bab II

Kajian Pustaka

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggungjawab Pemerintah Daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi dari para ahli dan undang-undang mengenai APBD:

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Mamesah (1995,19) APBD adalah “Rencana operasional keuangan daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Menurut Halim (2002, 24) APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya

sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Menurut Mardiasmo (2002,9) APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah:

1. Rencana Operasional daerah yang menggambarkan bahwa adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di mana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, sedang biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek.
4. Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

2.1.2 Jenis Sistem Penganggaran

Sistem penganggaran terdiri dari :

1. *Line Item Budgeting*

Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan kepada dan darimana itu berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).

Karakteristik dari sistem penganggaran *line item*:

- a. Titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan,
- b. Penekanan hanya pada segi administrasi.

Keunggulannya.:

- a. Penyusunan relatif mudah,
- b. Membantu dalam mengamankan komitmen di antara partisipasi sehingga dapat mengurangi konflik

Kelemahannya:

- a. Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat kurang pertimbangan,
- b. Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan,
- c. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

2. *Incremental Budgeting*

Sistem ini menggunakan revisi anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang.

tujuan dan proses pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang.

Keunggulannya:

- a. Dapat menggambarkan tujuan organisasi dengan lebih nyata,
- b. Dapat menghindarkan adanya overlapping program dan pertentangan di antara program.
- c. Dapat memungkinkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dan efektif berdasarkan analisa manfaat dan biaya untuk mencapai tujuan.

Kelemahannya:

- a. Terlalu sukar diterapkan baik secara teknis maupun praktis sehingga sulit diterapkan khususnya di negara-negara berkembang,
 - b. Merupakan proses yang multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan dan analisa.
 - c. Memerlukan kualitas pengelolaan yang sangat tinggi
4. *Zero Based Budgeting*

Zero based budgeting adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada sesuatu yang sedang dilakukan atau dilakukan merupakan sesuatu yang baru, dan tidak berdasarkan pada apa yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan dilihat sebagai sesuatu yang mandiri dan bukan merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan.

Keunggulannya:

- a. Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen,
- b. Dana dapat dialokasikan dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif bagi pelaksanaan keputusan tersebut,
- c. Setiap program dan kegiatan selalu direview setiap tahun,
- d. Pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dianggap kritik dan mendesak.

Kelemahannya:

- a. Tidak mudah untuk diterapkan,
- b. Tidak semua kegiatan dapat disusun ranking keputusannya secara konsisten dari tahun ke tahun,
- c. Terlalu mahal dan memakan banyak waktu,
- d. Memerlukan skill khusus terutama dalam menganalisa dan menentukan prioritas/ranking,
- e. Memerlukan data yang lebih banyak dan diperlukan dukungan analisa yang cukup kuat.
- f. Sulit untuk memutuskan bahwa kegiatan yang satu benar-benar lebih penting dibandingkan kegiatan yang lainnya.

5. *Performance Budgeting System*

Performance budgeting system adalah cara penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan yang berorientasi kepada

pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan/rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Keunggulannya:

- a. Memungkinkan adanya pendelegasian dalam wewenang dalam pengambilan keputusan,
- b. Merangsang partisipasi dan motivasi unit-unit operasional melalui proses usulan dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat faktual,
- c. Dapat membantu meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam keputusan pada semua tingkat,
- d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisiensi,
- e. Dapat menghindarkan pemborosan.

Kelemahannya:

- a. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan,
- b. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif,
- c. Tidak ada kejelasan mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban atas keputusan.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Penganggaran

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

3. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengupayakan pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

2.1.4 Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak terduga.

2.1.4.1. Anggaran Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus, yang dimaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah.

Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada output). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh. Belanja rutin terdiri dari:

1. Belanja administrasi umum
 - Belanja Pegawai,
 - Belanja barang,
 - Belanja perjalanan dinas,
 - Belanja pemeliharaan
2. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

2.1.4.2 Anggaran Belanja Pembangunan

Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam

pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektoral (sektor/sub sektor) pajak dan retribusi daerah. Belanja pembangunan terdiri dari:

1. Belanja Publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
2. Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.
3. pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria:
 - Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
 - Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

Pengeluaran transfer ini terdiri atas: angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

2.1.5 Fungsi Anggaran Daerah

Anggaran daerah mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan daerah. Peran anggaran daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu:

1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan,
2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian,
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal,
4. Anggaran sebagai alat politik,
5. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
6. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja.
7. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen.
8. Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat.

2.1.6 Siklus Perencanaan Anggaran Daerah

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD.
- 2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- 3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
- 4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- 5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
- 7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya.

- 8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

2.2 Akuntansi Biaya

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. (Mardiasmo, 2002)

2.3. Activity Based Costing

2.3.1 Pengertian Activity Based Costing

Activity Based Costing Yang selanjutnya disingkat menjadi ABC, merupakan suatu sistem informasi tentang pekerjaan (atau aktivitas) yang mengkonsumsi sumberdaya dan menghasilkan nilai bagi konsumen

Definisi lainnya mengenai ABC, antara lain ABC adalah sistem akuntansi dan alokasi yang menelusuri biaya ke produk menurut aktivitas-aktivitas yang dilakukan terhadap produk, yang dimaksudkan untuk menghasilkan informasi biaya bagi keputusan strategis, perancangan dan pengendalian operasional.

Menurut Turney ABC sistem didefinisikan sebagai metodologi yang mengukur biaya dan kinerja aktivitas-aktivitas sumber daya dan obyek biaya. Sumber daya dibebankan ke aktivitas kemudian aktivitas dibebankan ke obyek biaya sesuai dengan penggunaannya.

Definisi tersebut mencakup suatu range informasi biaya dan informasi kinerja yang luas, tidak hanya tefokus pada product costing saja. ABC system dapat juga dijadikan alat manajemen dalam melahirkan continuous improvement.

Model ABC yang berbasis pada definisi tersebut diatas mempunyai 2 sudut pandang yaitu:

1. *Cost Assignment View* (sudut pandang pembebanan biaya)

Sudut pandang ini ABC merefleksikan kebutuhan organisasi untuk membebankan biaya ke aktivitas dan obyek biaya (baik produk, jasa maupun konsumen) dan untuk menganalisis keputusan-keputusan yang diambil (misalnya dalam hal penetapan harga, bauran produk, perencanaan produk, perancangan produk dan lainnya). *Cost assignment view* ini dibentuk dari bebrapa building block, tiga yang utama adalah:

- a. Sumber daya, elemen-elemen ekonomi yang diarahkan ke kinerja aktivitas dan merupakan sumber biaya. Sumber daya dalam industri manufaktur meliputi tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, pendukung produksi, biaya tidak langsung produksi dan biaya-biaya diluar produksi. Sumber daya mengalir keaktivitas yang merupakan proses atau prosedur yang menyebabkan kerja.

- b. Aktivitas, yang saling berhubungan berada didalam *activity center*. *Activity center* merupakan kumpulan aktivitas yang biasanya terkumpul menurut fungsi/proses. Berbagai macam faktor yaitu *resource driver* digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas. Faktor-faktor ini dipilih untuk memperkirakan konsumsi sumberdaya oleh aktivitas. Setiap sumber daya yang dilacak ke aktivitas menjadi suatu elemen biaya dalam suatu *activity cost pool* dilacak ke obyek biaya melalui *activity drivers*.
- c. Obyek biaya, titik akhir pelacakan biaya. Suatu obyek biaya adalah mengapa suatu kerja dilakukan dalam perusahaan, dan dapat berbentuk produk ataupun customer.

2. *Process view*

Sudut pandang ini ABC menyediakan informasi mengenai kerja yang telah dilakukan dalam suatu aktivitas dan hubungan antara kerja tersebut dengan aktivitas yang lain.

Biaya jasa berdasar ABC dapat memberikan dasar yang layak dalam pengambilan keputusan, diantaranya keputusan untuk membeli atau membuat keputusan.

2.3.2. *Cost Driver*

Cost driver adalah faktor-faktor yang menentukan besar kerja dan usaha yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Pemicu biaya menjelaskan mengapa suatu aktivitas dikerjakan secara spesifik, aktivitas dilaksanakan sebagai reaksi atas kejadian yang sudah terjadi. *Cost driver* juga menjelaskan seberapa

besar usaha yang mesti dikeluarkan untuk melaksanakan kerja tersebut. Pemicu biaya sangat bermanfaat karena pemicu biaya mengungkap akan kesempatan untuk perbaikan. Sistem akuntansi yang berbasis aktivitas merupakan sistem informasi yang menyimpan dan memproses data berdasarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan, ABC mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan, menelusuri biaya aktivitas dan kemudian menggunakan berbagai cost driver untuk menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. *Cost driver* merefleksikan konsumsi aktivitas oleh suatu produk.

ABC menggunakan jenis *cost driver* yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem akuntansi biaya tradisional. ABC menggunakan *cost driver* non unit sebagai tambahan *cost driver* unit, termasuk *activity level batch* dan tahapan yang paling sulit bagi perusahaan yang akan mengimplementasikan ABC. Biaya-biaya yang berperan dalam produksi begitu banyak dan seringkali tidak sekelas hubungannya dengan produk. Selain itu dalam pemilihan jenis dan jumlah *cost driver*, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh (berupa keakuratan data dan informasi biaya) dengan biaya penggunaan ABC. Untuk menentukan jumlah *cost driver* perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Biaya pengukuran, dengan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan oleh *cost driver*.
2. Tingkat korelasi, aktualisasi konsumsi aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi yang ditimbulkan oleh *cost driver*.

2.3.3. Syarat- syarat Penerapan ABC

Persyaratan dasar yang membuat pertimbangan diterapkan ABC adalah:

1. *Non unit based cost* mempunyai prosentase yang signifikan dalam total *overhead cost*. Jika jumlah *unit based cost* tidak material, maka tidak menjadi masalah bagaimana pengalokasian ke *individual cost*.
2. Rasio konsumsi dari aktivitas *unit based cost* dan *non unit based cost* harus berbeda. Jika produk mengkonsumsi semua *overhead activities* dengan rasio yang kurang lebih sama, maka penggunaan *unit based cost driver* sebagai dasar pengalokasian biaya menjadi tidak masalah.

Jadi perusahaan dengan *product diversity* rendah dapat menggunakan sistem biaya tradisional tanpa masalah. Tetapi perusahaan dengan *unit based cost* signifikan dan *product university* tinggi pun belum tentu memerlukan ABC. ABC mensyaratkan 3 hal berikut agar pemanfaatannya menjadi lebih optimal.

1. Diversifikasi produk yang dihasilkan perusahaan tinggi.

Perusahaan memproduksi berbagai macam produk atau lini produk yang diproses dengan menggunakan beberapa fasilitas manufaktur yang sama. Dengan demikian akan timbul masalah untuk mengalokasikan atau membebaskan sumberdaya yang dikonsumsi masing-masing produk.

2. Perusahaan menghadapi persaingan yang ketat.

Informasi tentang harga pokok yang akurat akan lebih mendukung berbagai macam pengambilan keputusan manajemen untuk berkompetisi.

3. Biaya pengukuran relatif rendah.

Biaya-biaya pengukuran untuk menghasilkan informasi biaya aktivitas relatif rendah dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sistem tersebut di masa yang akan datang.

2.3.4. Konsep Dasar ABC Sistem

Anggapan yang mendasari konsep ABC adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan menimbulkan biaya

ABC berangkat dengan anggapan bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan.

2. Produk menyebabkan timbulnya permintaan dan kegiatan.

Untuk membuat produk diperlukakn berbagai kegiatan, dan setiap kegiatan memerlukan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan konsep dasar ABC tersebut, biaya merupakan konsumsi sumber daya (seperti bahan baku, sumber daya manusia, tekhnologi, modal) dihubungkan dengan kegiatan yang mengkonsumsi sumber daya tersebut. Dengan demikian hanya dengan mengelola dengan baik kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa, manajemen akan mampu membawa perusahaan unggul dalam persingan jangka panjang. Untuk mampu mengelola kegiatan perusahaan, manajemen memerlukan

informasi biaya yang mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan perusahaan.

Pada awal pengembangannya ABC digunakan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk dengan biaya overhead tinggi. Dalam merancang ABC, kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk dalam perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk dapat digolongkan ke dalam 4 macam kelompok besar yaitu:

1. *Facility Sustaining Activity Cost*

Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Biaya depresiasi dan amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan kunci perusahaan adalah contoh jenis biaya yang termasuk dalam *facility sustainining activity cost*. Biaya dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan kapasitas *activity cost*.

2. *Product Sustaining Activity Cost*

Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi dan jumlah *batch* produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual. Contoh biaya ini adalah biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, pengujian produk, biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tertentu (*product life cycle*).

3. *Batch Activity Cost*

Biaya ini berhubungan dengan jumlah *batch* produk yang diproduksi. Setiap *cost* yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan mesin dan peralatan sebelum suatu order produksi diproses adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan biaya ini, besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap order produksi. Pembeli dibebani *batch activity cost* berdasarkan jumlah *batch activity cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam setiap menerima order dari pembeli.

4. *Unit Level Activity Cost*

Biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya energi, biaya angkutan adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini, biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk dikalikan dengan jumlah produk yang sesungguhnya diperoleh.

2.3.5 **Manfaat dan Kendala ABC**

2.3.5.1 **Manfaat ABC**

ABC juga menekankan bahwa produk-produk atau jasa yang dihasilkan tidak secara langsung menyerap sumber daya, tetapi menyerap aktivitas-aktivitas. Aktivitas-aktivitas inilah yang secara langsung mengkonsumsi sumber daya.

Menurut Cooper, ABC punya maksud sebagai berikut:

1. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan.

Dengan informasi biaya produk yang lebih teliti, kemungkinan manajemen melakukan pengambilan keputusan dengan resiko yang lebih kecil, informasi biaya produk yang lebih teliti sangat penting artinya bagi manajemen jika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat tajam.

2. Kemungkinan manajemen melakukan perbaikan terus menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead.

ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. dengan demikian informasi biaya yang dihasilkan oleh ABC dapat digunakan oleh manajemen untuk memantau secara terus menerus berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan melayani konsumen. Perbaikan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan penghilangan kegiatan yang tidak menambah nilai bagi konsumen dapat dipertimbangkan oleh manajemen bedasar informasi biaya yang disajikan dengan sistem ABC.

3. Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.

Karena ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk, maka manajemen akan memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Misalnya manajemen mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan set up fasilitas produksi, ABC dengan cepat mampu menyediakan informasi *batch related activities*, sehingga

memungkinkan manajer mempertimbangkan akibat keputusan mereka terhadap konsumsi sumber daya untuk kegiatan tersebut.

2.3.5.2 Kendala-kendala Penerapan ABC

Adanya kerancuan bahwa manajemen yang menggunakan ABC menganggap produknya bisa lebih bersaing karena informasi biaya lebih akurat. ABC memang merupakan alat yang dapat digunakan manajemen dalam memperbaiki daya saing. Ebenarnya yang harus dilakukan adalah manage aktivitas, bukan biaya. Sebab jika hanya sekedar manage biaya, bisa saja aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (*non value added*) yang biasanya tinggi, manajemen bukannya berusaha meniadakan aktivitas tersebut, tetapi malah memotong biaya secara keseluruhan, pandangan bahwa ABC dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif adalah hal yang berbahaya dan untuk menghindarinya sejak awal manajemen harus mengelola aktivitas bukannya biaya.

Manajemen perlu menyadari apakah sistem manajemen biaya dengan ABC ini memberikan informasi biaya yang benar-benar merupakan biaya produksi. Tiga kendala dari biaya produksi yang dilaporkan berdasar ABC adalah:

a. Alokasi

Walaupun data aktivitas penting diperoleh, tetapi beberapa biaya masih memerlukan alokasi biaya yang bersarkan volume. Misalnya biaya-biaya yang berhubungan dengan gedung yaitu biaya sewa, asuransi dan pajak bangunan.

Usaha-usaha untuk menelusuri aktivitas-aktivitas penyebab biaya ini merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak praktis.

b. Biaya pengukuran yang tinggi

ABC memerlukan biaya pengeluaran yang tinggi untuk mengoperasikan sistem ini. Kebanyakan perusahaan hanya punya sedikit *activity center* untuk memulainya yang sama untuk pengelompokan *activity center*.

c. Periode-periode akuntansi

Periode-periode waktu yang *arbiter* masih digunakan dalam menghitung biaya-biaya. Banyak manajer yang ingin mengetahui apakah produk yang dihasilkan menguntungkan atau tidak. Tujuannya tidak saja untuk mengukur seberapa banyak biaya yang sudah diserap oleh produk tersebut, tetapi juga mengukur segi kompetitifnya dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Manajemen dalam hal ini memerlukan pengukuran dan pelaporan yang *interim*. Informasi untuk mengevaluasi perilaku aktivitas biaya tersebut dapat diberikan pada saat siklus hidup produk itu berakhir sehingga untuk pengukuran produk yang dimiliki siklus hidup lebih lama membutuhkan bentuk pengukuran yang *interin* (sementara).

Selain kendala-kendala tersebut diatas, kendala-kendala yang timbul dalam penerapan ABC adalah:

- a. Banyak perusahaan yang belum secara *ekstensif* terotomatisasi sehingga manajer merasa belum perlu mengganti sistem akuntansi biaya tradisional untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan manufaktur tersebut.

- b. Pelaksanaan otomatisasi dilaksanakan secara bertahap sehingga para manajer hanya memusatkan perhatian pada proses produksi.
- c. Kegiatan operasional secara otomatis dan manual dilakukan bersamaan tetapi sistem akuntansi biaya tradisional disediakan bagi keduanya.
- d. Para manajer sering berpendapat bahwa yang utama adalah pelaksanaan produksi, urutan kertas kerja belakangan.
- e. Kebutuhan, pelaporan eksternal mendorong akuntansi keuangan dipakai juga untuk tujuan akuntansi manajemen internal karena pusat perhatian sering diarahkan untuk mempersiapkan laporan keuangan eksternal, dengan demikian banyak manajer meras tidak ada waktu untuk mengubah bentuk laporan manajemen biaya dengan bentuk baru yang lebih relevan.
- f. Keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan sistem akuntansi manajemen biaya yang baru.
- g. Para manajer sering bertahan untuk tidak berubah karena konflik antar manajer.

2.3.5.3 Proses Pembebanan Biaya Pada ABC Sistem

Ada dua tahap prosedur pembebanan biaya pada *ABC system*, yaitu:

1. Prosedur tahap pertama

Pada tahap pertama ABC, aktivitas diidentifikasi, biaya dihubungkan dengan masing-masing aktivitas. Aktivitas dan biayanya dibagi menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Suatu perusahaan dapat

memiliki banyak aktivitas yang berbeda-beda. Setelah aktifitas diidentifikasi, biaya untuk menjalankan aktifitas juga ditentukan, dengan demikian perusahaan harus menentukan *activity driver* yang sesuai untuk tipe-tipe aktivitas dan menghitung tiap *activity overhead rules*. Untuk mengurangi jumlah *rate overhead* dan untuk menyederhanakan prosesnya, maka aktivitas dikelompokkan bersama-sama dalam satu set yang homogen berdasar karakteristik yang sejenis, yaitu aktivitas tersebut saling berhubungan secara logis dan mempunyai rasio konsumsi untuk semua produk.

Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menjumlahkan biaya dengan semua set yang homogen itu, hal ini disebut dengan *homogeneous cost pool* mempunyai rasio konsumsi yang sama, variasi biaya untuk *pool* ini dapat dijelaskan dengan *activity driver* dihitung dengan menghasilkan tarif kelompok/*pool rate*. Pada akhir pembebanan biaya pada tahap pertama ABC menghasilkan:

- a. Identifikasi aktivitas
- b. Pembebanan biaya pada aktivitas
- c. Pengelompokan aktivitas terkait ke dalam suatu *homogeneous cost pool*
- d. penjumlahan biaya pada suatu aktivitas untuk mengidentifikasi *homogeneous cost pool*
- e. penghitungan *pool/overhead rates*.

2. Prosedur Tahap kedua

Pada tahap kedua, biaya setiap kelompok dilacak ke produk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tarif kelompok yang sudah dihitung pada tahap pertama dan mengukur jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. Jumlah sumber daya dikonsumsi setiap produk dinyatakan oleh jumlah *activity center* yang digunakan setiap produk, oleh karena itu, biaya overhead yang dibebankan dari setiap kelompok biaya ke pada setiap produk dihitung dengan cara mengalikan tarif kelompok dengan penggunaan aktivitas.

Secara lebih rinci, langkah-langkah yang harus diambil dalam merancang sistem penentuan arga pokok berdasar aktivitas adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua biaya yang dibebankan pada setiap departemen.
2. Memisahkan biaya-biaya ke dalam *product driver cost* dan *customer driver cost*.
3. Memisahkan departemen pendukung ke dalam fungsi utama, fungsi utama tersebut harus mempunyai biaya yang signifikan dan dipengaruhi aktivitas yang berbeda.
4. memindahkan biaya-biaya ke departem ke dalam kelompok biaya fungsional (*funsional cost pool*).

5. mengidentifikasi pusat aktivitas
6. mengidentifikasi driver tahap pertama (proses yang homogen).
7. mengidentifikasi driver tahap kedua berdasarkan data yang tersedia, korelasi sumber daya dan pengaruh perilaku.
8. mengidentifikasi tingkat aktifitas.
9. memilih jumlah *cost driver*.

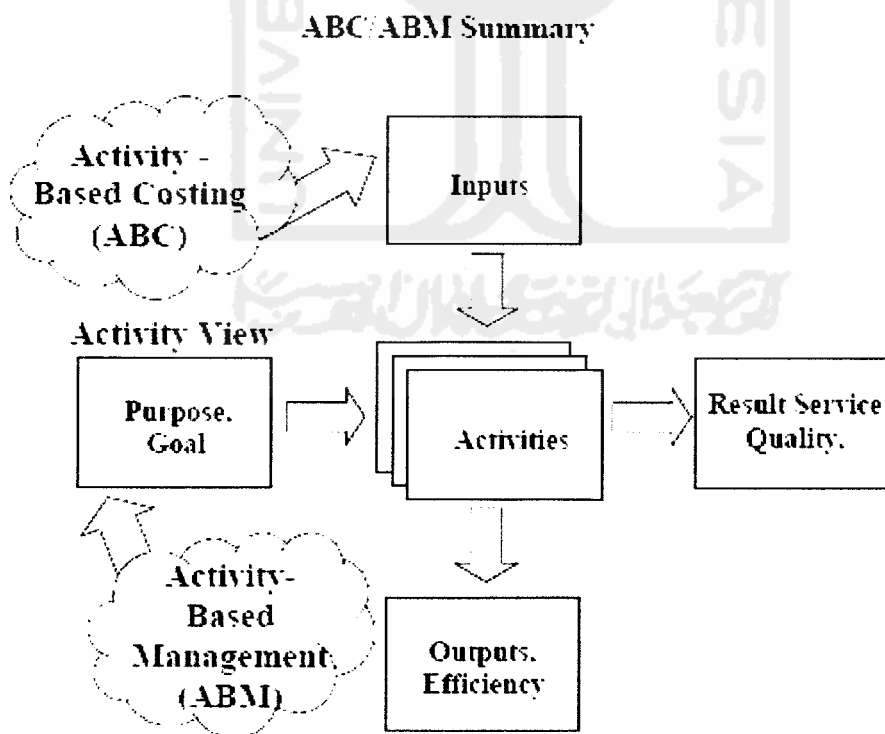
2.4 Activity-Based Costing Untuk Pemerintah Daerah

Activity-Based costing banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Dalam penelitian ini akan dikembangkan penerapan ABC untuk organisasi sektor publik yang dalam hal ini diambil organisasi pemerintahan.

Pemerintah sebagai organisasi yang tidak berorientasi mengejar laba sebenarnya dapat menerapkannya ABC. Penerapan ABC pada sektor publik berbeda dibandingkan penerapan ABC sektor privat, hal ini disebabkan karakteristik kegiatan pemerintah sedikit berbeda dibandingkan organisasi swasta pada umumnya. Karakteristik aktivitas pemerintah daerah sebenarnya hampir mirip dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang kadangkala menimbulkan kesulitan, misalnya karakteristik output yang sulit didefinisikan tidak terwujud. Selain itu, biaya kapasitas gabungan mewakili sebagian besar proporsi dari total biaya dan sukar untuk dikaitkan dengan aktivitas yang menghasilkan output.

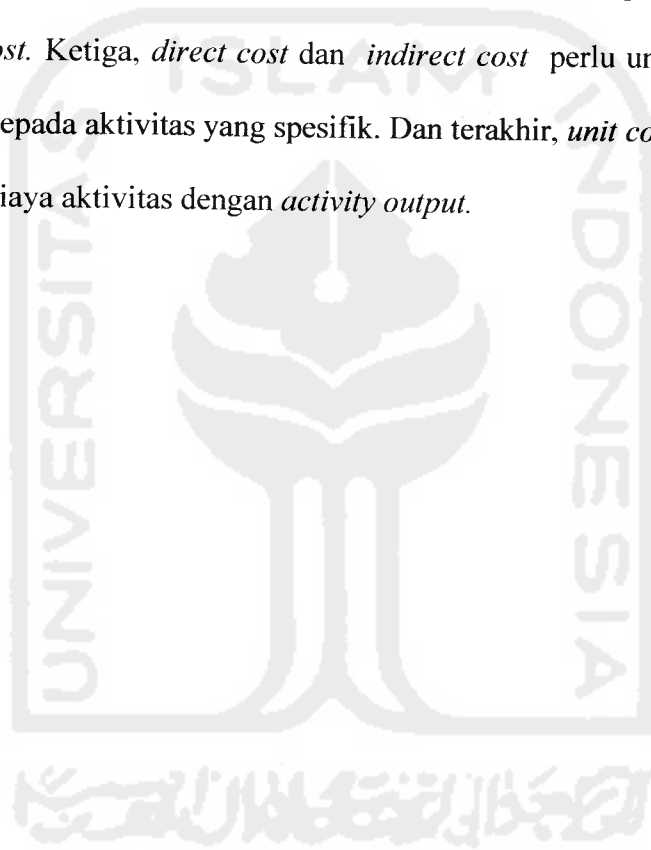
Menurut Mark D. Abrahams dalam tulisannya yang berjudul *Activity Based Costing: Illustrations from the State of Iowa* menyatakan bahwa *Activity Based Costing* dalam lingkungan pemerintahan telah dilakukan di negara bagian Iowa.

Konsep ABC serta langkah-langkahnya dianggap dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan. Activity based costing telah membuktikan bahwa sistem ini merupakan alat manajemen yang handal pada kinerja sistem manajemen negara bagian Iowa dengan menyediakan informasi biaya yang penting. Manajer negara bagian Iowa menganjurkan menggunakan pendekatan ini untuk penentuan peleyanaan pemerintah dengan menjalankan metode “*keep it simple*” untuk mencapai pembiayaan yang spesifik dengan pencapaian yang minimum dan kerumitan yang tidak terlalu banyak dalam metode penentuan biaya. Metode ini memungkinkan program secara tersendiri untuk dikerjakan dengan biaya tersendiri untuk menghubungkana antara biaya dan data program untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyampaian pelayanan masyarakat.



Penerapan Sistem ABC

Ada 4 langkah dasar untuk mengimplementasikan sistem ABC. Pertama, sumber daya dan biaya harus terorganisasi dalam bentuk biaya unit kerja. Kedua, biaya perlu dikategorikan kedalam kategori berpengaruh secara langsung atau tidak langsung kah biaya tersebut terhadap aktivitas. Untuk biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan aktivitas, sebuah metode *indirect cost* perlu untuk dipilih, apakah dengan menggunakan KIS (*Keep it simple*) ataukah dengan metode *full cost*. Ketiga, *direct cost* dan *indirect cost* perlu untuk ditunjukan atau dialokasikan kepada aktivitas yang spesifik. Dan terakhir, *unit cost* dihitung dengan memisahkan biaya aktivitas dengan *activity output*.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB III

Tinjauan Objek Penelitian

Nama Singkawang berasal dari bahasa China 'San Kew Jong' yang berarti kota di kaki gunung dekat muara dan laut. Kota ini dikelilingi Gunung Pasi, Gunung Sakok, Gunung Poteng dan Laut Natuna. Hampir 50% warga kota Singkawang adalah keturunan China. Dengan demikian kota Singkawang mendapat sebutan khas sebagai Kota Amoy, Kota Seribu Vihara.

3.1 Sejarah Pembentukan Pemerintah Kota (PEMKOT) Singkawang

Kota Singkawang semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sambas sesuai UU RI No.27 Tahun 1999 tentang penetapan UU Darurat No.3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Diawali dengan aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Sambas, disikapi Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas No.326 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 406 tahun 1996 tanggal 18 Oktober 1996 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Evaluasi Pemekaran Daerah Tingkat II Sambas.

Tanggapan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Bupati Daerah Tingkat II Sambas melalui suratnya No. 135/083/Tapem tanggal 29 Januari 1997 disampaikan usulan pemekaran wilayah kepada DPRD Tk.II Sambas No.DPRD

12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997, dukungan Gubernur Kalimantan Barat tertuang dalam suratnya No.118/2313/Pem-C tanggal 5 Juli 1997 serta dukungan DPRD Tk.I Kal-Bar melalui Kputusan DPRD Tk.I Kal-Bar No.DPRD 6 Tahun 1998 tentang persetujuan usul pemekaran wilayah Daerah Tk. II di Propinsi Kal-Bar sebagai pada Tahun 1997 dan usul pemekaran Daerah Tk.II Sambas melalui DPRD Tk.II pada Tahun 1.

Usulan pemekaran wilayah sebagaimana disetujui DPRD melalui keputusan DPRD Tk.II Smabas No.12 Tahun 1997 menjadi 3 (tiga) daerah otonom meliputi: Kabupaten Daerah Tk.II Sambas beribukota di Sambas, Kabupaten Daerah Tk.II Bengkayang beribukota di Bengkayang dan Kotamadya Daerah Tk.II Singkawang beribukota di Singkawang.

Lahirnya UU RI No.10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Bengkayang dan sekaligus kepindahan Ibukota Kabupaten Sambas di Sambas, maka 1 (satu) daerah otonom yaitu pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Singkawang dapat direalisasi dan masih berstatus Kota Administratif yang berada dalam eilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

Perjuangan dan gelora tuntutan aspirasi masyarakat yang menyuarakan peningkatan Kotif Singkawang menjadi Daerah Otonom terus berlanjut, Pemerintah Daerah Tk.II Sambas dengan dukungan semua elemen masyarakat yang ada di Singkawang seperti: KPS, GPPKS, KEKERTIS, GENMAS, TIM SUKSES. LKMD dan kelompok lainnya. Dalam hal ini Bupati Sambas melalui suratnya No.135/580/Tapem tanggal 9 Agustus usul peningkatan status kotif Singkawang kemabali disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Upaya

penelitian dan pengkajian terus dilakukan baik oleh Gubernur Kalimantan Barat maupun oleh Tim Pemekaran Kabupaten Sambas yang dibentuk dengan Surat Keputusan bersama antara Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang No.257 Tahun 1999 dan No.1a Tahun 1999 tanggal 28 September 1999. dukungan usulan peningkatan status Kota Administratif Singkawang ini juga diperoleh dari Bupati Bengkayang melalui suratnya No. 100/125/Pem tanggal 12 Agustus 1999 dan juga DPRD Kabupaten Bengkayang melalui Keputusan No. DPRD 04 Tahun 2000 tanggal 19 September 2000, dan dari elemen masyarakat yang dipelopori Kelompok Peduli Singkawang (KPS) tertuang dalam suratnya No.024/KPS-5/2000 yang ditujukan kepada DPR RI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah.

Akhirnya perjuangan mewujudkan Singkawang sebagai Daerah Otonom dari berbagai pihak seperti: Pemerintah Daerah Tk.I, Pemerintah Daerah Tk.II, Tim Assistensi, Tim CRAIS dan Badan Pertimbangan Otonomi Daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam terwujudnya Singkawang sebagai Daerah Otonom melalui UU No.12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.

3.2 Administrasi Pemerintahan

Setelah resmi menjadi Daerah Otonom, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001, pemerintahan Kota Singkawang secara wilayah

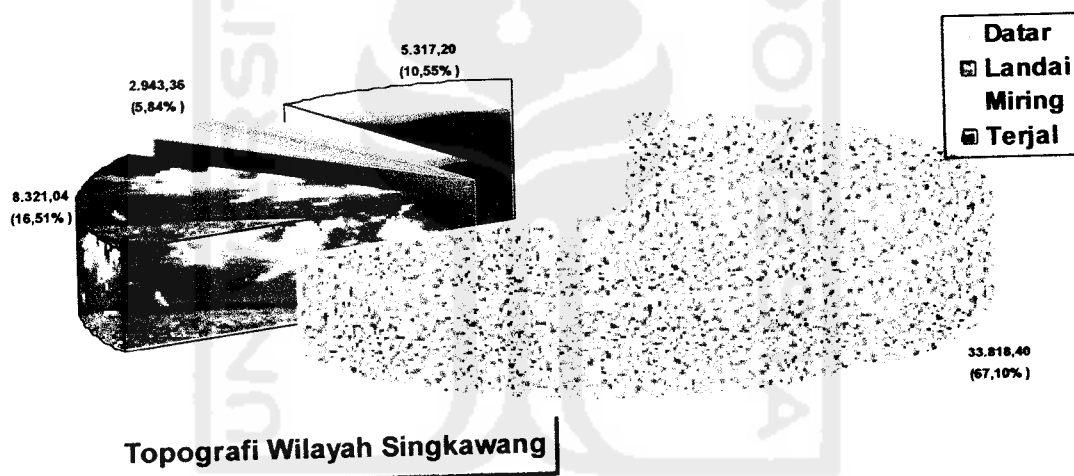
administratif terbagi 5 (lima) Kecamatan dan terdapat 26 Kelurahan, secara rinci sebagai berikut:

Tabel
Wilayah Administrasi Kota Singkawang

No	KECAMATAN	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	Kecamatan Singkawang Timur	16.626	32,99
	a. Pajintan	1.791	3,55
	b. Nyarumkop	2.473	4,91
	c. Mayasopa	7.064	14,02
	d. Bagak Sahwa	2.261	4,49
	e. Sanggau Kulor	3.038	6,03
2	Kecamatan Singkawang Tengah	3.157	6,26
	a. Roban	2.000	3,97
	b. Condong	200	0,40
	c. Sekip Lama	218	0,43
	d. Jawa	75	0,15
	e. Bukit Batu	362	0,72
	f. Sungai Wle	302	0,60
3	Kecamatan Singkawang Selatan	22.447	44,54
	a. Sedau	10.155	20,15
	b. Sagatani	7.064	14,02
	c. Sijangkung	3.391	6,73
	d. Pangmilang	1.837	3,64
4	Kecamatan Singkawang Utara	6.665	13,22
	a. Sungai Garam	424	0,84
	b. Naram	954	1,89
	c. Sungai Bulan	636	1,26
	d. Sungai Rasau	636	1,26
	e. Setapuk Kecil	848	1,68
	f. Setapuk Besar	1.445	2,87
	g. Semelagi Kecil	1.724	3,42
5	Kecamatan Singkawang Barat	1.504	2,98
	a. Pasiran	720	1,43
	b. Melayu	141	0,28
	c. Tengah	18	0,04
	d. Kuala	625	1,24
	Jumlah	50.400	100,00

Kota Singkawang terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada koordinat $0^{\circ} 44' 57''$ Lintang Utara dan $108^{\circ} 52' 14'' - 109^{\circ} 09' 46''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $504,00 \text{ Km}^2$ atau sekitar 0,34% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna



Geomorfologi Kota Singkawang terdiri dari daerah datar dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 2 M di atas permukaan laut dan daerah perbukitan pada bagian Timur, serta daerah pesisir di bagian Barat. Kota Singkawang memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2.819 mm per tahun, dengan rata-rata hari hujan 157 hari per tahun atau rata-rata 13 hari hujan per bulan. Secara umum jenis tanah di

wilayah Kota Singkawang terdiri dari : Aluvial, Latosol, Organosol/Clay Humus, Pod Solid Merah Kuning.

3.3 Pengembangan Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kota Singkawang Tahun 2003, pertumbuhan sektor ekonomi yang paling domina di Kota Singkawang dalam memberikan Kontribusi terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, kemudian diikuti oleh sektor jasa, pertanian, yang selanjutnya sektor industri, angkutan dan sektor bangunan.

Meningkatnya pembangunan diberbagai sektor banyak memberikan perubahan terhadap Kota Singkawang. Berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2003, telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,14%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terbesar disumbangkan dari sektor bangunan sebesar 5,85%, selanjutnya diikuti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,96%. Pada tahun 2003 hampir semua sektor mengalami pertumbuhan lebih besar dibandingkan tahun 2002 kecuali sektor listrik dan air minum pertumbuhannya cenderung menurun. Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi kota Singkawang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi terbesar disumbangkan dari sektor pertanian sebesar 5,83% di atas rata-rata, selanjutnya diikuti sektor-sektor jasa sebesar 6,34%. Perekonomian Kota Singkawang pada Tahun 2004 didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Peranan sektor ini mencapai 34,55% dengan pertumbuhan 4,70%. Sedangkan sektor jasa menempati urutan kedua dalam pembentukan PDRB, sektor ini menyumbang

sebesar 14,22%. Disamping itu, sektor pertanian juga menguasai kehidupan masyarakat yang memberikan kontribusi sebesar 13,16% mengalami pertumbuhan 5,83%. Secara rinci pertumbuhan ekonomi tahun 2002, 2003 dan 2004 tergambar pada tabel berikut:

Tabel
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kota Singkawang Tahun 2001 – 2004

No	Sektor / Sub Sektor	PERTUMBUHAN EKONOMI		
		2002	2003	2004
1	Pertanian	0,87	3,01	5,83
2	Pertambangan & Penggalian	1,57	4,92	3,87
3	Industri Pengolahan	-2,38	3,85	5,06
4	Listrik & Air Minum	10,60	4,80	4,28
5	Bangunan	-2,14	5,85	4,25
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4,66	4,45	4,70
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,55	3,48	5,50
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,34	4,96	3,47
9	Jasa-Jasa	2,65	3,74	6,34
KOTA SINGKAWANG		2,19	4,14	5,04

Income perkapita masyarakat Kota Singkawang berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2003 sebesar Rp.6.223.657,88. jika dibandingkan pada tahun 2002 adanya peningkatan sebesar 1,10%, sedangkan income perkapita masyarakat Kota Sngkawang berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (1993) sebesar Rp.1.906.242,54. Jika terlihat dibandingkan pada tahun 2002 adanya peningkatan sebesar 1,10%. Sedangkan income perkapita masyarakat Kota Singkawang berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (1993) sebesar Rp.1.906.242,54. jika dibandingkan dengan tahun 2002 adanya peningkatan sebesar 1,04%. Kemudian apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2004,

jumlah pendapatan perkapita sebesar Rp. 6.723.681,61. Dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan adalah Rp. 1.997.063,16. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan penduduk yang konstan, yaitu sebesar 1,04%. Secara rinci terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel
Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Perkapita
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993
Kota Singkawang Tahun 1999-2004

No	Sektor / Subsektor	2002	2003	2004
I	ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
1	PDRB Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rp.)	995.308,28	1.081.460,94	1.197.048,74
2	Penyusutan (Jutaan Rp.)	94.056,63	102.198,06	113.121,11
3	PDRN Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rp.)	901.251,65	979.262,88	1.083.927,63
4	Pajak Tak Langsung (Jutaan Rp.)	6.161,12	6.162,12	6.820,73
5	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi (Jutaan Rp.)	895.090,53	973.100,76	1.077.106,90
6	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	158.304	159.247,00	160.196
7	PDRB Perkapita (Rupiah)	6.287.322,39	6.791.091,47	7.472.400,93
8	Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	5.654.250,88	6.110.637,97	6.723.681,61
II	ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993			
1	PDRB Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rp.)	325.154,89	338.630,26	355.561,67
2	Penyusutan (Jutaan Rp.)	30.727,14	32.000,56	33.613,39
3	PDRN Atas Dasar Harga Pasar (Jutaan Rp.)	294.427,75	306.629,70	321.948,28
4	Pajak Tak Langsung (Jutaan Rp.)	2.944,28	3.066,30	2.026,75
5	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi (Jutaan Rp.)	291.483,47	303.563,41	319.921,53
6	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	158.304	159.247	160.196
7	PDRB Perkapita (Rupiah)	2.053.990,33	2.126.446,74	2.219.541,50
8	Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	1.841.289,36	1.906.242,54	1.997.063,16

3.4 Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Singkawang pada tahun 2004 tercatat sebanyak 176.993 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 91.060 jiwa dan perempuan sebanyak 85.993. dengan demikian, tingkat kepadatan penduduk Kota Singkawang adalah sebesar 351/km².

Penduduk Kota Singkawang memeluk berbagai agama yaitu: Islam (39,25%), Katholik (8,71%), Protestan (6,50%), Budha (44,92%), Hindu (0,62%).

Salah satu karakteristik Kota Singkawang yang membedakan dengan daerah lainnya di Kalimantan Barat adalah penduduknya yang sebagian besar etnis Tionghoa. Oleh sebab itu disetiap sudut wilayah Kota Singkawang hingga ke daerah-daerah pinggiran dapat ditemukan tempat ibadah warga Tionghoa yang khas, yaitu Wihara. Itulah sebabnya Kota Singkawang terkenal dengan sebutan “Kota Seribu Wihara” atau “Chinese Town of Indonesia”.

Jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan pendataan (registrasi penduduk) Tahun 2004 adalah sebanyak 176.993 jiwa, dengan karakteristik yang cukup unik. Kota Singkawang memiliki struktur penduduk/ masyarakat yang heterogen yaitu didominasi oleh etnis 3 besar yang hidup secara berdampingan dengan damai. Pada tabel berikut ini dapat dilihat Penggolongan penduduk menurut suku bangsa (tahun 2004).

Tabel
Penduduk Kota Singkawang
Berdasarkan Suku Bangsa
Tahun 2004

No	Suku Bangsa	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tionghoa	73.824	41,71
2	Melayu	49.505	27,97
3	Dayak	12.548	7,11
4	Jawa	13.151	7,43
5	Madura	9.362	5,29
6	Lainnya	18.567	10,49
Jumlah		176.993	100,00

Dari total penduduk Kota Singkawang pada Tahun 2004, terdapat penduduk laki-laki berjumlah: 91.060 atau 51%, dan penduduk perempuan berjumlah 85.993 jiwa atau 49% dari total penduduk. Komposisi penduduk Kota Singkawang tahun 2004 menurut jenis kelamin per kecamatan sebagai berikut:

Tabel
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kota Singkawang Tahun 2004

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kecamatan Singkawang Timur	10.187	8.325	18.512
2	Kecamatan Singkawang Tengah	25.436	24.925	50.361
3	Kecamatan Singkawang Barat	28.038	28.045	56.083
4	Kecamatan Singkawang Utara	9.102	8.538	17.640
5	Kecamatan Singkawang Selatan	18.297	16.100	34.397
Jumlah		91.060	85.933	176.993

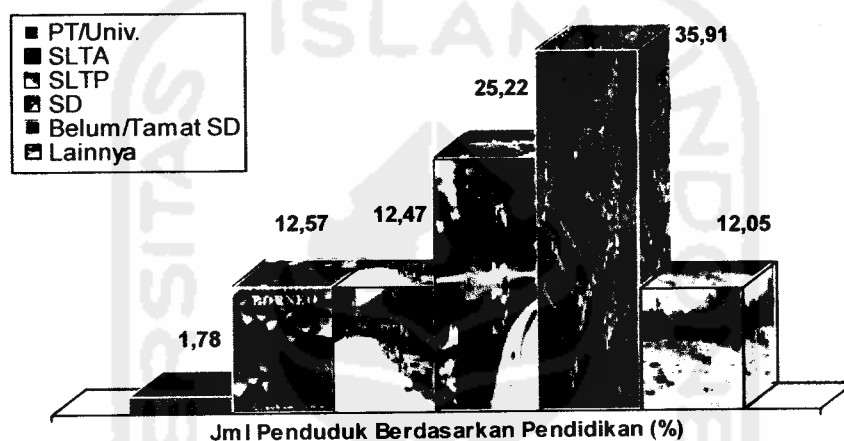
Persebaran penduduk Kota Singkawang tidak merata dengan kepadatan yang tinggi pada pusat perkotaan dan kepadatan yang rendah untuk diluar pusat perkotaan/pinggir kota. Persebaran penduduk Kota Singkawang dengan komposisi penduduk yang demikian, sesuai data yang ada maka kepadatannya adalah berkisar 351 jiwa/km².

Tabel
Persebaran Penduduk
Kota Singkawang Tahun 2004

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kecamatan Singkawang Timur	166,26	18.512	111
2	Kecamatan Singkawang Tengah	31,57	50.361	1.552

3	Kecamatan Singkawang Barat	15.04	56.083	3.705
4	Kecamatan Singkawang Utara	66.65	17.640	263
5	Kecamatan Singkawang Selatan	224.47	34.397	151
Jumlah		504.00	176.993	346

. Bila dilihat dari tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan faktor imigrasi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang selama 3 tahun terakhir rata-rata 1,38%.

Disamping itu, kondisi penduduk Kota Singkawang jika dicerminkan pada trend piramida adanya keterkaitan antara usia produktif dengan usia non produktif, pada tahun 2004 penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah = 110.206 jiwa, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun + >65 tahun) berjumlah = 66.787 jiwa.

Dengan demikian Dependency Ratio (angka ketergantungan) sebesar 60,61%, artinya setiap 100 orang penduduk berusia produktif menanggung @ 61 orang penduduk berusia tidak produktif.

3.5 Struktur Organisasi

Kota Singkawang merupakan daerah otonom yang diberikan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan lainnya yang meliputi Kebijakan Perencanaan Nasional, Pengendalian secara makro, Perimbangan Keuangan, Sistem Administrasi Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tinggi yang strategis serta Konservasi dan Standarisasi Nasional. Kewenangan pemerintah kota sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri dari kewenangan wajib meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah kota juga menyelenggarakan lain-lain urusan seperti urusan pengembangan otonomi daerah, sosial, politik dalam negeri, olah raga, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, penerangan, pertambangan dan energi, kelautan dan pariwisata.

Pemerintahan Kota Singkawang dipimpin oleh walikota dan dibantu oleh seorang wakil walikota, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Singkawang yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin berlandaskan Iman dan Taqwa, dalam rangka menjadikan Kota Singkawang sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Agropolitan Termaju di Kawasan Utara Kalimantan Barat.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan Aparatur Pemerintah Kota Singkawang. Tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2002), susunan organisasi Pemerintahan Kota Singkawang meliputi 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, 12 (dua belas) Dinas dan 2 (dua) lembaga teknis daerah, serta 5 (lima) Pemerintahan Kecamatan dan 26 (dua puluh enam) Kelurahan.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan

tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota, yang mempunyai fungsi :

- ☉ Pengkoordinasian perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kota yang meliputi bidang aparatur, dan pemerintahan umum, ekonomi, sosial, kekayaan dan keuangan daerah;
- ☉ Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- ☉ Pembinaan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah;
- ☉ Pembinaan teknis dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- ☉ Pembinaan dan penyelenggaraan tata usaha kesekretariatan;
- ☉ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, sekretaris daerah dibantu oleh Asisten Kebijakan Pemerintahan; Asisten Keuangan dan Kekayaan; dan Asisten Administrasi Umum.

2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang, pelayanan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif

DPRD, pengurusan rumah tangga, keuangan, perawatan, perlengkapan dan kepegawaian Sekretariat DPRD, yang mempunyai fungsi :

- ⊗ Penyelenggaraan fasilitas rapat dan penyusunan risalah rapat anggota DPRD Kota;
- ⊗ Pelayanan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD;
- ⊗ Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD;
- ⊗ Pengelolaan tata usaha DPRD;
- ⊗ Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Ketua DPRD.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Dinas-Dinas Daerah

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, yang mempunyai fungsi perumusan dan perencanaan dalam lingkup tugasnya; perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dalam lingkup tugasnya; pelaksanaan pemberian perizinan dan rekomendasi dalam lingkup tugasnya; pembinaan

terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh walikota.

Adapun Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Agribisnis dan Kelautan
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (3) Dinas Kimpraswil dan Energi Sumber Daya Mineral
- (4) Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
- (5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- (6) Dinas Pendapatan
- (7) Dinas Pendidikan
- (8) Dinas Kesehatan
- (9) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan.
- (10) Dinas Ketentraman dan Ketertiban
- (11) Dinas Kesbang dan Linmas
- (12) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan

4) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- (1) Badan Pengembangan Kota,
- (2) Badan Pengawasan Kota,

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kota yang berbentuk Badan, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga teknis daerah bertugas melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga teknis daerah mempunyai fungsi perencanaan dalam lingkup tugasnya; perumusan dan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup tugasnya; pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya; melaksanakan urusan ketatausahaan Badan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

5) Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, yang terdiri dari:

- (1) 5 Kecamatan
- (2) 26 Kelurahan

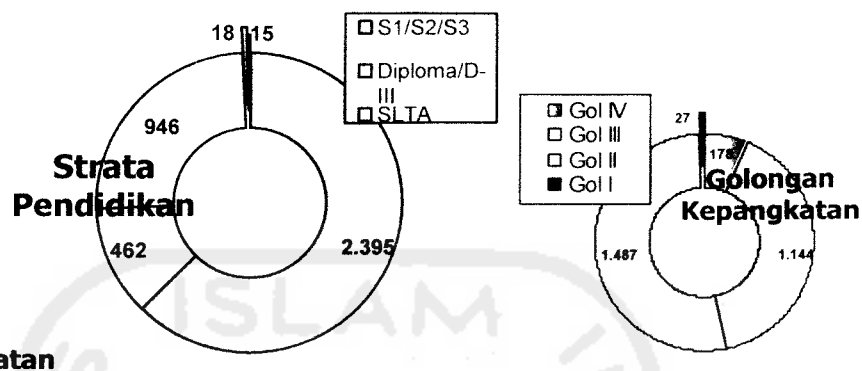
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 11 Februari 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang telah membentuk susunan organisasi perangkat daerah yang baru, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Dinas-Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 - (1) Dinas Agribisnis

- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja
 - (4) Dinas Pekerjaan Umum
 - (5) Dinas Tata Kota dan Pertanahan
 - (6) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - (7) Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi
 - (8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - (9) Dinas Pendidikan
 - (10) Dinas Kesehatan
 - (11) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
 - (12) Dinas Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga
- 3) Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
- Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah
 - Badan Pengawasan Daerah
 - Rumah Sakit Umum Daerah
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 5) Sekretariat DPRD
 - 6) Kecamatan
 - 7) Kelurahan

Untuk menjalankan organisasi pemerintahan tersebut, Pemerintah Kota Singkawang didukung oleh 2.836 orang pegawai, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan



Kepangkatan

3.6 Lingkungan Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Singkawang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- 3.6.1 Implementasi otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas dalam arti yang sebenar-benarnya.
- 3.6.2 Kedudukan geografis yang terletak antara atau berada pada wilayah penghubung dari dua kabupaten (Sambas dan Bengkayang), mempunyai hinterland Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak, dan terletak pada posisi yang berhadapan dengan Laut Natuna, serta mudah dijangkau dari Serawak dan Brunei.

- 3.6.3 Memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dapat dikembangkan bagi kegiatan pertanian/agropolitan dan pariwisata.
- 3.6.4 Jumlah penduduk yang cukup besar dalam keragaman etnik, apabila dapat dibina dan dikelola dengan baik maka akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.
- 3.6.5 Adanya komitmen rasa kebersamaan untuk maju dalam keanekaragaman budaya, agama dan golongan adalah merupakan suatu tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi pembangunan yang dapat membawa Kota Singkawang menuju cita-cita ataupun visinya.
- 3.6.6 Tersedianya konsepsi dasar perencanaan tata ruang yang menyeluruh
- 3.6.7 Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- 3.6.8 Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan (jangka panjang) dan berwawasan lingkungan.
- 3.6.9 Menjaga dan mengembangkan kerjasama regional, nasional dan internasional untuk pelaksanaan pembangunan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB IV

Analisis Data

4.1. Pengantar

Bab ini merupakan analisa terhadap penerapan akuntansi biaya untuk pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Singkawang. Analisa dan data berkaitan dengan prosedur yang harus dilakukan untuk menerapkan akuntansi biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2004/2005.

Analisa data ini juga mengupayakan suatu format pelaporan biaya. Hal itu dimaksudkan agar manfaat penerapan akuntansi biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang dapat lebih dimengerti. Adapun tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui kemungkinan penerapan akuntansi biaya, khususnya *Activity Based Costing* pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang.

4.2 Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang

Kajian penerapan akuntansi biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang dilakukan dengan mengumpulkan data rekening belanja dari masing-masing unit kerja/dinas/Instansi.

Akuntansi biaya khususnya ABC mensyaratkan beberapa hal agar pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Syarat-syarat tersebut antara lain produk yang dihasilkan memiliki tingkat diversifikasi yang tinggi. Pemerintah daerah Kota Singkawang dalam menjalankan kegiatannya menghasilkan produk yang bervariasi yaitu berupa berbagai program yang berbeda-beda. Ini berarti bahwa syarat tersebut dipenuhi. Syarat yang lain adalah bahwa organisasi yang menjalankan bisnisnya memiliki prosentase biaya overhead yang signifikan. Jika dilihat dari data Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2004/2005, biaya yang dikeluarkan oleh beberapa unit kerja/Dinas/Instansi tidak hanya mendukung satu program tetapi lebih dari satu. Dengan demikian biaya-biaya dari satu unit kerja/dinas/Instansi secara keseluruhan bisa merupakan biaya overhead.

Anggaran Belanja Daerah khususnya Kota Singkawang saat ini tidak memperlihatkan *cost* dari masing-masing produk yang dihasilkan. Untuk itu analisis berikut akan mempergunakan metodologi *Activity Based Costing* untuk menggambarkan penghitungan *cost* dari masing-masing produk.

4.3 Prosedur penerapan akuntansi biaya Activity Based Costing Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang

Urutan kajian penerapan akuntansi biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang dapat dilihat dari prosedur berikut.

4.3.1. Menganalisis Nilai Suatu Proses (*Process Value Analysis*)

Dalam langkah ini penulis mencoba mengidentifikasi biaya-biaya yang *value added* dan *non value added*. Karena biaya nya tidak memberi nilai tambah

langsung pada program/target kinerja yang telah ditetapkan. Biaya-biaya tersebut antara lain, biaya bunga hutang bank, belanja bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan, belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan kepada organisasi profesi, belanja bantuan kepada organisasi vertikal, dan belanja tidak tersangka, karena pada pemerintahan daerah, pengeluaran yang dilakukan harus berdasar pada pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat secara umum, bukan pada satu kelompok atau bagian saja. Selain biaya-biaya tersebut diatas ada biaya-biaya lain pada masing-masing dinas yang tidak ada hubungannya dengan nilai tambah bagi pemerintah kota. Pada tabel I ditampilkan data rekening biaya pada Anggaran Belanja Pemerintah Kota Singkawang yang diperoleh dari bagian keuangan Pemkot Singkawang. Biaya-biaya tersebut kemudian penulis kategorikan sebagai biaya aktivitas operasi dan non operasi. Rekening biaya dalam anggaran belanja daerah kemudian dibebankan ke aktivitas yang membentuk proses.

4.3.2. Mengidentifikasi Pusat-pusat Aktivitas (*Activity Center*)

Dari kegiatan yang dilakukan Pemkot Singkawang dilakukan identifikasi aktivitas dari berbagai unit kerja/dinas/instansi yang memberikan kontribusi terhadap lebih dari satu program. Dalam analisis ini unit kerja/instansi/dinas yang dimaksud adalah

DPRD : Penyusunan dan Evaluasi Program dan Anggaran

Kepala Daerah : Koordinasi Program dan Kegiatan Daerah

Sekda (Sekretariat Daerah) :

- Seleksi surat masuk dan keluar
- Pengarsipan dan rekapitulasi
- Observasi dan peninjauan lapangan
- Penyebarluasan informasi
- Monitoring Data
- Prakualifikasi

Bawasda (Badan Pengawas Daerah) :

- Peninjauan Lapangan
- Monitoring Program

Bapeda (Badan Pembangunan Daerah) :

- Pengumpulan data
- Pengolahan data
- Pendistribusian Data

Dinas Pendapatan : Pengumpulan Sumber dana Masyarakat

Tabel 1
Kategori Biaya dalam Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang

Kode Rekening	Nama Rekening	
Belanja Aparatur		
2-x-x-1- . . . -1		
2-x-x-1-1- . . . -1	Belanja Pegawai/Personalia	
2-x-x-1-1-03-01-1	Gaji Pokok	Operasi
2-x-x-1-1-03-02-1	Tunjangan Keluarga	Operasi
2-x-x-1-1-03-03-1	Tunjangan Jabatan	Operasi
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Beras	Operasi
2-x-x-1-1-03-06-1	Pembayaran PPH	Operasi
2-x-x-1-1-03-07-1	Iuran Asuransi Kesehatan	Operasi
2-x-x-1-1-04-04-1	General Check UP	Operasi
2-x-x-1-1-04-05-1	Pemeliharaan Kesehatan	Operasi
2-x-x-1-1-05-01-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas	Operasi
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan	Operasi
2-x-x-1-1-05-03-1	Biaya Bantuan Penelitian Studi	Operasi
2-x-x-1-1-05-04-1	Biaya Bantuan Penyerangan Calon Mahasiswa	Operasi
2-x-x-1-1-05-05-1	Bantuan Izin Belajar Diploma, Strata I, Strata II.	Operasi
2-x-x-1-1-05-06-1	Bantuan Biaya Pendidikan	Operasi
2-x-x-1-1-05-07-1	Biaya Studi Banding keluar Daerah	Operasi
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	Operasi
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus	Operasi
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Brg	Operasi
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten	Operasi
2-x-x-1-1-06-05-1	Dana Taktis Kepala Dinas	Operasi
2-x-x-1-1-06-06-1	Uang Tunjangan Jasa Pengabdian	Operasi
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Kesejahteraan Pegawai	Operasi
2-x-x-1-1-07-02-1	Uang Duka	Operasi
2-x-x-1-1-07-03-1	Penunjang Kegiatan DPRD	Operasi
2-x-x-1-1-07-04-1	Penunjang Kegiatan Sekretaris DPRD	Operasi
2-x-x-1-2- . . . -1	Belanja Barang dan Jasa	Operasi
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	Operasi
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	Operasi
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Operasi
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	Operasi
2-x-x-1-2-01-05-1	Biaya Pengisian Tabung	Operasi
2-x-x-1-2-01-06-1	Biaya pengisian Gas	Operasi
2-x-x-1-2-01-07-1	Biaya BBM	Operasi
2-x-x-1-2-01-08-1	Biaya Keperluan Rumah Tangga Pimpinan	Operasi
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik	Operasi
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon	Operasi
2-x-x-1-2-02-03-1	Biaya Air	Operasi
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah	Operasi
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman	Operasi
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	Operasi
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Upah Pungut (Bahan Galian golongan C)	Operasi
2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan	Operasi
2-x-x-1-2-02-12-1	Biaya Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Operasi
2-x-x-1-2-02-13-1	Biaya Pajak Jasa Giro	Operasi
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	Operasi
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	Operasi
2-x-x-1-2-04-01-1	Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Operasi
2-x-x-1-2-04-02-1	Biaya Sewa gedung Kantor	Operasi
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian	Operasi
2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat	Operasi
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu	Operasi
2-x-x-1-2-06-01-1	Biaya Pakaian Sipil Harian	Operasi
2-x-x-1-2-06-04-1	Biaya Pakaian Sipil Lengkap	Operasi
2-x-x-1-2-06-07-1	Biaya Pakaian Pol PP Lengkap	Operasi
2-x-x-1-3- . . . -1	Belanja Perjalanan Dinas	Operasi
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Operasi
2-x-x-1-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Operasi
2-x-x-1-3-01-03-1	Biaya Operasional	Operasi
2-x-x-1-4- . . . -1	Belanja Pemeliharaan	Operasi
2-x-x-1-4-04-01-1	Biaya Pemeliharaan Alat studio	Operasi
2-x-x-1-4-04-02-1	Biaya pemeliharaan alat Komunikasi	Operasi
2-x-x-1-4-05-02-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik	Operasi
2-x-x-1-4-05-03-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Telepon	Operasi

2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	Operasi
2-x-x-1-4-06-02-1	Biaya Pemeliharaan Bangunan gedung tempat tinggal	Operasi
2-x-x-1-4-06-04-1	Biaya Pemeliharaan halaman dan taman	Operasi
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor	Operasi
2-x-x-1-4-09-04-1	Biaya Asuransi Kendaraan Roda 4 (46 Unit)	Operasi
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	Operasi
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Operasi
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Operasi
2-x-x-1-4-12-04-1	Biaya Pemeliharaan meja dan kursi	Operasi
2-x-x-1-4-12-05-1	Biaya Pemeliharaan AC	Operasi
2-x-x-1-4-12-06-1	Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik Manual	Operasi
2-x-x-2- - - -1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Operasi
2-x-x-2-1- - -1	Belanja Pegawai/Personalia	Operasi
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia	Operasi
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upah Harian	Operasi
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan	Operasi
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian	Operasi
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas	Operasi
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif	Operasi
2-x-x-2-1-03-03-1	Upah Pungut/Uang Perangsang	Operasi
2-x-x-2-2- - -1	Belanja Barang dan Jasa	Operasi
2-x-x-2-2-01-01-1	Biaya Bahan Bangunan	Operasi
2-x-x-2-2-01-04-1	Biaya Bahan Percontohan	Operasi
2-x-x-2-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis	Operasi
2-x-x-2-2-02-01-1	Biaya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Operasi
2-x-x-2-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi	Operasi
2-x-x-2-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi	Operasi
2-x-x-2-2-02-04-1	Biaya dekorasi	Operasi
2-x-x-2-2-02-05-1	Biaya Alat Tulis Kantor	Operasi
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak	Operasi
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	Operasi
2-x-x-2-2-04-01-1	Biaya Sewa Tempat	Operasi
2-x-x-2-2-04-02-1	Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan	Operasi
2-x-x-2-2-04-03-1	Biaya Sewa Perlengkapan	Operasi
2-x-x-2-2-04-04-1	Biaya Sewa peralatan	Operasi
2-x-x-2-2-05-01-1	Biaya Makan dan Minum	Operasi
2-x-x-2-3- - -1	Belanja Perjalanan Dinas	Operasi
2-x-x-2-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah	Operasi
2-x-x-2-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Operasi
2-x-x-2-4- - -1	Belanja Pemeliharaan	Operasi
2-x-x-2-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Operasi
2-x-x-2-4-14-03-1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan	Operasi
2-x-x-3- - - -1	Belanja Modal Aparatur	Operasi
2-x-x-3-9-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua	Operasi
2-x-x-3-10-02-01-1	Belanja Modal Alat Bengkel Pengujian	Operasi
2-x-x-3-12-01- -1	Belanja Modal Alat Kantor	Operasi
2-x-x-3-12-02- -1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Operasi
2-x-x-3-12-03- -1	Belanja Modal Komputer	Operasi
2-x-x-3-12-04- -1	Belanja Modal Meja Kursi	Operasi
2-x-x-3-13-01- -1	Belanja Modal Alat Studio	Operasi
2-x-x-3-13-02- -1	Belanja Modal Alat Komunikasi	Operasi
2-x-x-3-16-01- -1	Belanja Modal Buku	Operasi
	Belanja Publik	Operasi
2-x-x-1- - - -2	Belanja Administrasi Umum	Operasi
2-x-x-1-1- - -2	Belanja Pegawai/Personalia	Operasi
2-x-x-1-1-01- -2	<i>Belanja tetap dan tunj. Pimpinan dan anggota DPRD</i>	Operasi
2-x-x-1-1-01-01-2	Uang Representasi	Operasi
2-x-x-1-1-01-02-2	Uang Paket	Operasi
2-x-x-1-1-01-03-2	Tunjangan Jabatan	Operasi
2-x-x-1-1-01-04-2	Tunjangan Panitia	Operasi
2-x-x-1-1-01-05-2	Tunjangan Komisi	Operasi
2-x-x-1-1-01-06-2	Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH 21	Operasi
2-x-x-1-1-01-07-2	Tunjangan Keluarga	Operasi
2-x-x-1-1-01-08-2	Tunjangan Beras	Operasi
2-x-x-1-1-02- -2	<i>Gaji dan Tunj. Walikota/Wakil Walikota</i>	Operasi
2-x-x-1-1-02-01-2	Gaji Pokok	Operasi
2-x-x-1-1-02-02-2	Tunjangan Jabatan	Operasi
2-x-x-1-1-02-03-2	Tunjangan Keluarga	Operasi
2-x-x-1-1-02-06-2	Tunjangan Beras	Operasi

2-x-x-1-1-02-07-2	Tunjangan PPh	Operasi
2-x-x-1-1-02-09-2	Tunjangan Kesehatan	Operasi
2-x-x-1-1-03- .-2	<i>Gaji dan Tunjangan Pegawai</i>	Operasi
2-x-x-1-1-03-09-2	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	Operasi
2-x-x-1-1-05- .-2	<i>Biaya Pengembangan Sumber daya Manusia</i>	Operasi
2-x-x-1-1-05-01-2	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Operasi
2-x-x-1-1-05-03-2	Biaya Bantuan penelitian dan studi	Operasi
2-x-x-1-1-05-04-2	Biaya Bantuan Penyerangan calon siswa	Operasi
2-x-x-1-1-05-06-2	Bantuan Biaya Pendidikan	Operasi
2-x-x-1-1-05-07-2	Biaya Studi Banding Keluar daerah	Operasi
2-x-x-1-1-06- .-2	<i>Santunan</i>	Operasi
2-x-x-1-2- .- .-2	Belanja Barang dan Jasa	Operasi
2-x-x-1-2-01-01-2	Biaya Alat Listrik dan Elektronik	Operasi
2-x-x-1-2-01-02-2	Biaya Alat Tulis	Operasi
2-x-x-1-2-01-03-2	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Operasi
2-x-x-1-2-01-04-2	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Operasi
2-x-x-1-2-01-06-2	Biaya Gas	Operasi
2-x-x-1-2-01-07-2	Biaya Keperluan Rumah Tangga	Operasi
2-x-x-1-2-01-08-2	Biaya Bahan Linen/Rumah Tangga	Operasi
2-x-x-1-2-01-09-2	Biaya Pembuatan Plat Uji Kendaraan	Operasi
2-x-x-1-2-02-01-2	Biaya Listrik	Operasi
2-x-x-1-2-02-02-2	Biaya telepon	Operasi
2-x-x-1-2-02-03-2	Biaya Air	Operasi
2-x-x-1-2-02-04-2	Biaya Surat Kabar/Majalah	Operasi
2-x-x-1-2-02-07-2	Biaya Jasa Pegawai Non PNS	Operasi
2-x-x-1-2-02-12-2	Biaya Penunjang kegiatan walikota/Wakil (operasional)	Operasi
2-x-x-1-2-01-13-2	Biaya Penunjang Pembinaan Kemasyarakatan	Operasi
2-x-x-1-2-03-01-2	Biaya Cetak	Operasi
2-x-x-1-2-03-01-2	Biaya Fotocopy	Operasi
2-x-x-1-2-05- .-2	<i>Biaya Makan dan Minum Kantor</i>	Operasi
2-x-x-1-2-06- .-2	<i>Biaya Pakaian Dinas</i>	Operasi
2-x-x-1-4- .- .-2	Belanja Pemeliharaan	Operasi
2-x-x-1-4-05-02-2	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik	Operasi
2-x-x-1-4-06-04-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan TPS	Operasi
2-x-x-1-4-08- .-2	Biaya Pemeliharaan Buldozer	Operasi
2-x-x-1-4-09-01-2	Biaya Pemeliharaan alat-alat Akt. Darat Bermotor	Operasi
2-x-x-1-4-09-02-2	Biaya Pemeliharaan alat-alat Akt. Darat tidak Bermotor	Operasi
2-x-x-1-4-10-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin	Operasi
2-x-x-1-4-11-02-2	Biaya Pemeliharaan mesin pemotong rumput	Operasi
2-x-x-2- .- .- .-2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Operasi
2-x-x-2-1- .- .-2	Belanja Pegawai/Personalia	Operasi
2-x-x-2-1-01-01-2	Honorarium Tim/Panitia	Operasi
2-x-x-2-1-01-02-2	Honor/Upah Bulanan	Operasi
2-x-x-2-1-01-03-2	Honor/Upah Harian	Operasi
2-x-x-2-1-01-04-2	Tunjangan Khusus Tenaga Kesehatan	Operasi
2-x-x-2-1-02-02-2	Uang Lembur Harian	Operasi
2-x-x-2-1-03-01-2	Insentif untuk Panitia Pelaksana	Operasi
2-x-x-2-1-03-02-2	Upah Pungut	Operasi
2-x-x-2-1-03-03-2	Insentif Untuk Peserta	Operasi
2-x-x-2-2- .- .-2	Belanja Barang Dan Jasa	Operasi
2-x-x-2-2-01-01-2	Biaya Bahan baku	Operasi
2-x-x-2-2-01-02-2	Biaya Bahan/Bibit Tanaman/Benih Ikan	Operasi
2-x-x-2-2-01-03-2	Biaya bahan obat-obatan	Operasi
2-x-x-2-2-01-04-2	Biaya Stimulan	Operasi
2-x-x-2-2-01-05-2	Biaya Alat tulis	Operasi
2-x-x-2-2-01-06-2	Biaya bahan pelajaran, bahan material lainnya	Operasi
2-x-x-2-2-01-07-2	Biaya Bahan Kampanye Kesehatan/Materi Pameran	Operasi
2-x-x-2-2-01-08-2	Biaya Penunjang Kegiatan	Operasi
2-x-x-2-2-02-01-2	Biaya Jasa tenaga Kerja Non PNS	Operasi
2-x-x-2-2-02-02-2	Biaya Transportasi dan Akomodasi	Operasi
2-x-x-2-2-02-03-2	Biaya Dokumentasi	Operasi
2-x-x-2-2-02-04-2	Biaya dekorasi	Operasi
2-x-x-2-2-02-05-2	Biaya Jasa Pelaksana dan Pihak Ketiga	Operasi
2-x-x-2-2-02-06-2	Biaya Jasa Konsultan	Operasi
2-x-x-2-2-02-07-2	Biaya Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Operasi
2-x-x-2-2-03-01-2	Biaya Cetak	Operasi
2-x-x-2-2-03-02-2	Biaya Fotocopy	Operasi
2-x-x-2-2-03-03-2	Biaya Penggandaan	Operasi
2-x-x-2-2-04-01-2	Biaya Sewa Tempat	Operasi

2-x-x-2-2-04-02-2	Biaya Sewa Kendaraan/alat angkutan	Operasi
2-x-x-2-2-04-03-2	Biaya Sewa Perlengkapan	Operasi
2-x-x-2-2-04-04-2	Biaya Sewa Peralatan	Operasi
2-x-x-2-2-04-05-2	Biaya Sewa Sound System/OHP	Operasi
2-x-x-2-2-05-01-2	Biaya Makanan dan Minuman	Operasi
2-x-x-2-2-06-01-2	Biaya Bunga Hutang Bank	Non Operasi
2-x-x-2-2-07-01-2	Biaya Pakaian Kerja	Operasi
2-x-x-2-2-07-02-2	Biaya Pakaian Petugas Parkir	Operasi
2-x-x-2-3- - -2	Belanja Perjalanan Dinas	Operasi
2-x-x-2-3-01-01-2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	Operasi
2-x-x-2-3-01-02-2	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Operasi
2-x-x-2-4- - -2	Belanja Pemeliharaan	Operasi
2-x-x-2-4-02-01-2	Biaya Pemeliharaan Jalan Kota Singkawang	Operasi
2-x-x-2-4-02-04-2	Biaya Pemeliharaan fasilitas jalan	Operasi
2-x-x-2-4-03-01-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan Air	Operasi
2-x-x-2-4-03-03-2	Biaya Pemeliharaan Jaringan Drainage (swakelola)	Operasi
2-x-x-2-4-06-01-2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Operasi
2-x-x-2-4-06-02-2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Operasi
2-x-x-2-4-06-03-2	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Sekolah	Operasi
2-x-x-2-4-06-04-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung SD/MI	Operasi
2-x-x-2-4-07-03-2	Biaya Pemeliharaan Taman	Operasi
2-x-x-2-4-09-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan darat Bermotor	Operasi
2-x-x-2-4-12-01-2	Biaya Pemeliharaan alat Kantor	Operasi
2-x-x-2-4-12-02-2	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Operasi
2-x-x-2-4-12-03-2	Biaya Pemeliharaan Komputer	Operasi
2-x-x-2-4-12-04-2	Biaya Pemeliharaan Meja/Kursi	Operasi
2-x-x-2-4-14-02-2	Biaya pemeliharaan alat kesehatan	Operasi
2-x-x-2-4-15-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium	Operasi
2-x-x-2-4-18-03-2	Biaya Pemeliharaan pohon/Tanaman Pelindung	Operasi
2-x-x-3- - -2	Belanja Modal	Operasi
2-x-x-3-1-11-01-2	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung	Operasi
2-x-x-3-1-13-01-2	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan bukan gedung	Operasi
2-x-x-3-2-01-01-2	Belanja Modal Jalan Lingkungan Aspal	Operasi
2-x-x-3-2-01-02-2	Belanja Modal jalan Pembuatan Jalan Setapak Beton	Operasi
2-x-x-3-2-02-01-2	Belanja Modal Peningkatan Jalan dan Jembatan	Operasi
2-x-x-3-3-01-01-2	Belanja Modal Pengembangan daerah rawa semelagi	Operasi
2-x-x-3-3-01-02 -2	Pengembangan Daerah Rawa Sungai Rasau	Operasi
2-x-x-3-3-01-03-2	Pengembangan Irigasi	Operasi
2-x-x-3-3-02-01-2	Pembuatan Saluran Pasangan Batu Jalan Semelagi	Operasi
2-x-x-3-3-02-02-2	Normalisasi Saluran dan Sungai	Operasi
2-x-x-3-3-02-03-2	Perkutan Tebing Sungai	Operasi
2-x-x-3-3-03-01-2	Belanja Modal Pelabuhan Laut Kota Singkawang	Operasi
2-x-x-3-4-01-01-2	Rehabilitasi intake Perdesaan	Operasi
2-x-x-3-4-01-02-2	Pembangunan Sarana air bersih	Operasi
2-x-x-3-4-02-01-2	Belanja Modal Pembangunan Drainage lingk.Permukiman	Operasi
2-x-x-3-5-01-01-2	Belanja Modal Jaringan Perpipaan Perdesaan	Operasi
2-x-x-3-5-02-01-2	Belanja Modal Jaringan Listrik	Operasi
2-x-x-3-6-01-01-2	Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Kerja	Operasi
2-x-x-3-6-01-02-2	Belanja Modal Pemb. Dan Pemeliharaan Sarana Perikanan	Operasi
2-x-x-3-6-01-03-2	Belanja Modal Pemb. dan Peningkatan Sarana Kesehatan	Operasi
2-x-x-3-6-01-04-2	Belanja Modal Pemb. Dan Pemeliharaan Gedung	Operasi
2-x-x-3-6-01-05-2	Belanja Modal Pemb. Sarana promosi Perindagkop	Operasi
2-x-x-3-6-01-06-2	Belanja Modal Pemb. Sarana dan prasarana sekolah	Operasi
2-x-x-3-6-02-01-2	Belanja Modal bangunan	Operasi
2-x-x-3-6-04-01-2	Belanja Modal Prasarana Kota/Gedung OR	Operasi
2-x-x-3-11-02-02-2	Belanja Modal Peralatan Taman	Operasi
2-x-x-3-11-02-03-2	Belanja Modal Peralatan Kebersihan	Operasi
2-x-x-3-12-01-01-2	Belanja Modal Alat Kantor	Operasi
2-x-x-3-12-02-01-2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Operasi
2-x-x-3-12-03-01-2	Belanja Modal Komputer	Operasi
2-x-x-3-12-04-01-2	Belanja Modal Meja Kursi	Operasi
2-x-x-3-14-02-01-2	Belanja Modal alat-alat kesehatan	Operasi
2-x-x-3-15-01-01-2	Belanja Modal alat Laboratorium	Operasi
2-x-x-3-15-02-01-2	Belanja Modal alat praktik/peraga sekolah	Operasi
2-x-x-3-18-02-01-2	Belanja Modal Bibit Tanaman Pohon Tanjung	Operasi
2-x-x-4- - -2	Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan	Non Operasi
2-x-x-4-4- - -2	Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	Non Operasi
2-x-x-4-4-01- -2	Bantuan Raskin Melalui Desa/Kelurahan	Non Operasi
2-x-x-4-4-02- -2	Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Aparat Desa	Non Operasi

2-x-x-4-4-03- .-2	Bantuan Keuangan kepada desa dan kelurahan	Non Operasi
2-x-x-4-5- .- .-2	Bel. Bantuan Keuangan Kepada Org. Kemasyarakatan	Non Operasi
2-x-x-4-5-01- .-2	Panti Asuhan	Non Operasi
2-x-x-4-5-03- .-2	PKK	Non Operasi
2-x-x-4-5-04- .-2	PMI	Non Operasi
2-x-x-4-5-05- .-2	Bantuan Pembangunan Rmh Ibadah dan Sarana Ibadah	Non Operasi
2-x-x-4-5-06- .-2	Forum Komunikasi Antar Etnis dan Agama	Non Operasi
2-x-x-4-5-07- .-2	Dharma Wanita dan GN-OTA	Non Operasi
2-x-x-4-5-08- .-2	Dharma Pertiwi	Non Operasi
2-x-x-4-5-09- .-2	Bantuan Kegiatan LPQ/MTQ	Non Operasi
2-x-x-4-5-10- .-2	Generasi Muda/Pramuka	Non Operasi
2-x-x-4-5-11- .-2	Bantuan Kesenian dan Kebudayaan	Non Operasi
2-x-x-4-5-12- .-2	Bantuan Keolahragaan	Non Operasi
2-x-x-4-5-13- .-2	Bantuan Bhakti Sosial	Non Operasi
2-x-x-4-5-14- .-2	Pesparawi/Mudika	Non Operasi
2-x-x-4-5-15- .-2	Bantuan keagamaan Lain	Non Operasi
2-x-x-4-5-16- .-2	Pengadaan Kitab Suci	Non Operasi
2-x-x-4-5-17- .-2	Bantuan Asrama Mahasiswa di Pontianak	Non Operasi
2-x-x-4-5-18- .-2	Bantuan TPHD	Non Operasi
2-x-x-4-5-19- .-2	Bantuan Kepada Radio Suara Singkawang	Non Operasi
2-x-x-4-5-20- .-2	Bantuan Kegiatan hari-hari Besar Sejarah Nasional	Non Operasi
2-x-x-4-5-21- .-2	Bantuan Kegiatan Sosial Lainnya	Non Operasi
2-x-x-4-5-22- .-2	Bantuan Kegiatan P2WKSS	Non Operasi
2-x-x-4-5-23- .-2	Bantuan Sengketa Hukum	Non Operasi
2-x-x-4-5-25- .-2	Bantuan Natal Oikumene	Non Operasi
2-x-x-4-5-26- .-2	Bantuan UKS	Non Operasi
2-x-x-4-5-27- .-2	Bantuan TPA	Non Operasi
2-x-x-4-5-28- .-2	Bantuan Organisasi wanita lainnya	Non Operasi
2-x-x-4-5-29- .-2	Bantuan Pelatihan Baca Al-Quran	Non Operasi
2-x-x-4-5-30- .-2	Bantuan JPKM bagi masyarakat kurang Mampu	Non Operasi
2-x-x-4-5-31- .-2	Bantuan Mesin Peralatan pada Sentra IKM	Non Operasi
2-x-x-4-5-32- .-2	Bantuan subsidi paket Pasar Murah	Non Operasi
2-x-x-4-5-34- .-2	Bantuan Legiun Veteran	Non Operasi
2-x-x-4-6- .- .-2	Belanja Bantuan Kepada Org.Profesi	Non Operasi
2-x-x-4-6-02- .-2	PGRI	Non Operasi
2-x-x-4-6-03- .-2	KONI	Non Operasi
2-x-x-4-6-04- .-2	MUI	Non Operasi
2-x-x-4-6-05- .-2	Veteran RI Singkawang	Non Operasi
2-x-x-4-6-08- .-2	Apeksi dan Organisasi Profesi Lain	Non Operasi
2-x-x-4-6-09- .-2	Perguruan Tinggi	Non Operasi
2-x-x-4-6-11- .-2	PEPABRI	Non Operasi
2-x-x-4-6-13- .-2	PWRI	Non Operasi
2-x-x-4-6-14- .-2	PKBI	Non Operasi
2-x-x-4-6-15- .-2	Bantuan GOW	Non Operasi
2-x-x-4-6-16- .-2	Bantuan KNPI	Non Operasi
2-x-x-4-6-17- .-2	ICMI	Non Operasi
2-x-x-4-6-18- .-2	IBI	Non Operasi
2-x-x-4-6-20- .-2	Bantuan Koordinasi Narkoba	Non Operasi
2-x-x-4-6-21- .-2	Dekopinda	Non Operasi
2-x-x-4-6-22- .-2	HKTI	Non Operasi
2-x-x-4-6-23- .-2	LPM	Non Operasi
2-x-x-4-6-24- .-2	PIKI	Non Operasi
2-x-x-4-6-25- .-2	ISKA	Non Operasi
2-x-x-4-6-26- .-2	Ikatan cendikiawan Budha	Non Operasi
2-x-x-4-7- .- .-2	Bantuan Keuangan Kepada Instansi Vertikal	Non Operasi
2-x-x-4-7-01- .-2	Bantuan Koordinasi dengan Pemrov dan pusat	Non Operasi
2-x-x-4-7-02- .-2	Bantuan Kemuspidaan, Instansi Vertical dan LSM	Non Operasi
2-x-x-4-7-07- .-2	Bantuan Kepada Sekretariat KPU dan PANWASLU	Non Operasi
2-x-x-4-7-08- .-2	Bantuan Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Pemilu	Non Operasi
2-x-x-5- .- .-2	Belanja Tidak Tersangka	Non Operasi
2-x-x-5-01- .- .-2	Belanja Tidak Tersangka	Non Operasi

4.3.4. Menelusuri Biaya ke Unit Kerja/Dinas/Instansi

Hasil identifikasi atas rekening biaya dari berbagai unit kerja/dinas/instansi adalah sebagai berikut:

1. Semua Biaya pada pusat biaya DPRD, Kepala Daerah, sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Badan Pengawasan Kota, serta Badan Pembangunan Daerah merupakan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan berbagai program.
2. *Analisis value added pada berbagai unit kerja/dinas/Instansi:*
 - Pada dinas Agribisnis jumlah anggaran yang diajukan sebesar 1.700.486.837,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.647.606.830. Berdasarkan program yang dimiliki dinas agribisnis, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan program-program tersebut, secara garis besar terdapat *non value added cost* sehingga menyebabkan inefisiensi. Biaya tersebut antara lain, biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 136.100.000,00, program yang dimiliki oleh dinas agribisnis ini diwujudkan dalam kegiatan yang berada pada satu tempat. Melihat luas wilayah Kota Singkawang, untuk mencapai satu tempat ke tempat lainnya dapat ditempuh dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga tanpa biaya sebesar ini program dapat tetap berlangsung
 - Pada dinas tata kota, biaya yang dianggap *non value added* adalah biaya makanan dan minuman pada belanja publik sebesar

Rp7.300.000,00. Biaya ini tidak menambah nilai bagi program yang dimiliki oleh dinas ini, karena tanpa biaya ini tidak berpengaruh terhadap program dan kegiatan dalam pelaksanaan program tersebut dapat tetap terlaksana.

- Pada Dinas Kelautan, Biaya yang tidak berhubungan langsung dengan program yang dimiliki, adalah biaya dekorasi sebesar Rp. 10.000.000,00, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas ini dalam melaksanakan kegiatannya untuk menjalankan programnya tidak membutuhkan sehingga dapat tidak diikuti sertakan. Biaya lainnya yang tidak menambah nilai bagi program yang dimiliki adalah biaya makanan dan minuman pada bagian belanja publik, sebesar Rp. 18.025.000,00.
- Pada Dinas Kesbagpora, Biaya yang *non value added* adalah biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 79.615.400,00. dan biaya makanan dan minuman pada belanja publik sebesar Rp. 71.673.000,00. Kedua biaya ini tidak berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Kesbagpora ini, dan apabila ditiadakan program serta kegiatan masih tetap dapat dilaksanakan.
- Pada Dinas Sosnakerduk, Biaya yang *non value added*, adalah biaya makanan dan minuman pada bagian belanja publik, sebesar Rp. 34.108.000,00. pelaksanaan kegiatan dan program dapat tetap berlangsung tanpa biaya ini.

- Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, rekening biaya alat tulis muncul di 3 bagian. Yaitu pada bagian barang pakai habis, serta bagian biaya bahan material pada belanja aparatur, dan belanja modal pada belanja publik. Jumlah dari ketiga biaya ini sebesar Rp. 56.063.850,00. dari keseluruhan biaya ini tidak seluruh biaya yang mendukung secara langsung pelaksanaan program pada dinas ini. Biaya alat tulis pada sub bagian barang pakai habis sebesar Rp. 30.000.000,00, dan belanja modal alat tulis sebesar Rp. 23.563.850,00. dapat ditiadakan karena tanpa kedua rekening biaya ini program yang direncanakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan ini dapat tetap dilakukan, biaya makanan dan minuman rapat Rp. 49.998.000,00. Dari analisis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dinas Perindag, hanya dua kegiatan yang berhubungan dengan biaya ini yaitu kegiatan penyusunan pola konsumsi dan produksi serta kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan. Biaya makanan dan minuman kemudian muncul lagi pada sub bagian belanja publik sebesar Rp. 76.850.000,00. Sehingga salah satu komponen biaya ini dapat digabungkan menjadi satu. Biaya makanan dan minuman pada belanja publik dianggap tidak mempengaruhi program yang direncanakan apabila ditiadakan. Jumlah biaya non value added pada dinas ini sebesar Rp.130.413.850,00

- Pada dinas pendidikan, terdapat biaya makan dan minum tamu sebesar Rp. 15.000.000,00, biaya ini tidak secara langsung berhubungan dengan program-program yang dimiliki oleh dinas pendidikan, serta biaya surat kabar/majalah Rp.45.100.800,00, biaya transportasi dan akomodasi pada belanja publik sebesar Rp. 75.082.250,00. Dan biaya makanan dan minuman pada belanja publik sebesar Rp. 297.306.000,00. sehingga biaya ini dapat ditiadakan.
- Pada dinas kesehatan, biaya yang dianggap *non value added*, adalah biaya makanan dan minuman pada belanja publik sebesar Rp.33.175.000,00, dan biaya transportasi dan akomodasi pada belanja publik sebesar Rp.54.621.500,00.
- Pada dinas Pekerjaan Umum, biaya alat tulis muncul dalam bagian belanja aparatur dan belanja publik. Masing-masing sebesar Rp.91.917.895,00 dan Rp. 42.395.500,00. terjadi inefisiensi biaya disini, karena biaya alat tulis yang telah dikeluarkan pada bagian belanja aparatur dapat dimanfaatkan juga dalam pelaksanaan program serta kegiatan dinas. Sehingga biaya alat tulis pada belanja publik dianggap sebagai biaya yang *non value added* disini.
- Pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biaya yang dianggap *non value added* adalah biaya Transportasi dan akomodasi

sebesar Rp.131.930.000,00 serta biaya makanan dan minuman pada belanja publik sebesar Rp. 93.300.000,00

- Pada dinas Trantib terdapat biaya dekorasi sebesar Rp. 1.400.000,00, dan biaya makanan dan minuman pada belanja publik sebesar Rp. 75.000.000,00. biaya ini tidak berhubungan langsung dalam pelaksanaan program yang dimiliki oleh dinas trantib, dan apabila biaya ini ditiadakan, program-program yang dimiliki oleh dinas ini tidak terganggu dalam pelaksanaan kegiatannya.
3. Semua biaya yang muncul di pusat biaya DPRD berkaitan dengan aktivitas penyusunan dan evaluasi program dan anggaran. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dibebankan secara langsung ke dalam aktivitas penyusunan dan evaluasi program dan anggaran.
 4. Semua biaya yang muncul di pusat biaya Kepala Daerah berkaitan dengan segala urusan mengenai kelangsungan program dari mulai awal sampai selesai. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dibebankan secara langsung ke dalam aktivitas koordinasi program dan kegiatan daerah.
 5. Biaya bantuan penyarangan calon mahasiswa, bantuan izin belajar diploma, Strata I, Strata II, bantaun biaya pendidikan, dan biaya studi banding keluar daerah baik pada belanja aparatur maupun pada belanja publik, yang muncul pada pusat biaya Sekretariat Daerah merupakan *direct cost* terhadap program pendidikan (program G) sehingga dibebankan secara langsung pada program tersebut. Biaya penunjang

kegiatan pemerintah merupakan *direct cost* terhadap program administrasi umum (program A). Belanja modal tanah untuk bangunan buakn gedung, belanja modal jalan lingkungan aspal merupakan *direct cost* terhadap program K.

6. Biaya cetak, biaya fotocopy, serta biaya dokumentasi berkaitan dengan aktivitas penggandaan dan penerangan untuk keperluan berbagai program. Oleh karena itu, ketiga biaya tersebut harus dibebankan secara langsung ke dalam aktivitas penggandaan dan penerangan. Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda dua, belanja modal alat bengkel pengujian, belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, belanja modal komputer, belanja modal meja dan kursi, belanja modal alat studio, dan belanja modal alat komunikasi, berkaitan langsung dengan aktivitas pengadaan dan pendataan inventarisasi kota untuk keperluan berbagai program, karena itu biaya-biaya tersebut diatas harus dibebankan secara langsung ke dalam aktivitas pengadaan dan pendataan inventarisasi kota.
7. Semua Biaya yang muncul di pusat biaya dinas pendapatan berkaitan dengan aktivitas pengumpulan sumber dana masyarakat dari berbagai program. Oleh karena itu, biaya tersebut harus dibebankan secara langsung ke dalam aktivitas pengumpulan sumber daya masyarakat.
8. Biaya paket pengiriman yng muncul pada pusat biaya badan pengawasan kota berkaitan langsung dengan aktivitas pendistribusian data untuk keperluan berbagai program, oleh karena itu, biaya tersebut harus dibebankana secara langsung ke dalam aktivitas pendistribusian data.

Tabel 2
Hasil Identifikasi Direct Cost Terhadap Program

Kode Rekening	Nama Rekening	Dinas Agrobisnis	Dinas Tata Kota	RSUD Abdul Aziz	Dinas Kelautan	Dinas Kesbagpora
Belanja Aparatur						
2-x-x-1-1-03-01-1	Belanja Administrasi Umum	1.647.606.830,00	353.621.954,00	2.685.705.986,00	520.059.357,00	594.969.554,00
2-x-x-1-1-03-02-1	Belanja Pegawai/Personalia	1.371.115.830,00	351.731.954,00	2.685.705.986,00	502.066.857,00	578.505.554,00
2-x-x-1-1-03-03-1	Gaji Pokok	1.261.581.595,00	286.313.147,00	2.568.429.436,00	413.592.821,00	516.941.922,00
2-x-x-1-1-03-04-1	Tunjangan Keluarga	847.492.785,00	188.479.102,00	1.877.142.736,00	261.710.620,00	320.590.052,00
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Jabatan	94.293.496,00	19.521.170,00	151.828.772,00	23.732.934,00	31.894.322,00
2-x-x-1-1-03-06-1	Tunjangan Beras	130.565.000,00	18.360.000,00	258.716.900,00	51.205.000,00	62.580.000,00
2-x-x-1-1-03-07-1	Pembayaran PPH	74.262.120,00	14.744.100,00	136.698.870,00	18.636.340,00	24.252.540,00
2-x-x-1-1-04-01-1	Iuran Asuransi Kesehatan	31.468.194,00	6.508.775,00	69.242.158,00	10.407.927,00	13.275.008,00
2-x-x-1-1-04-02-1	General Check UP					
2-x-x-1-1-04-03-1	Pemeliharaan Kesehatan					
2-x-x-1-1-05-01-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas					
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan			28.000.000,00		
2-x-x-1-1-05-03-1	Biaya Bantuan Penelitian Studi					
2-x-x-1-1-05-04-1	Biaya Bantuan Penyerangan Calon Mahasiswa					
2-x-x-1-1-05-05-1	Bantuan Izin Belajar Diploma, Strata I, Strata II.					
2-x-x-1-1-05-06-1	Bantuan Biaya Pendidikan					
2-x-x-1-1-05-07-1	Biaya Studi Banding keluar Daerah					
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	55.100.000,00	18.450.000,00	16.200.000,00	27.450.000,00	37.350.000,00
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus	10.400.000,00	66.750.000,00	12.600.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Penggala Pemegang Kas/Brg	18.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten					
2-x-x-1-1-06-05-1	Dana Taktis Kepala Dinas					
2-x-x-1-1-06-06-1	Uang Tunjangan Jasa Pengabdian					
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Kesejahteraan Pegawai					
2-x-x-1-1-07-02-1	Uang Duka					
2-x-x-1-1-07-03-1	Penunjang Kegiatan DPRD					
2-x-x-1-1-07-04-1	Penunjang Kegiatan Sekretaris DPRD					
2-x-x-1-2-01-01-1	Belanja Barang dan Jasa	74.034.235,00	41.924.507,00	117.276.550,00	60.474.036,00	40.207.152,00
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	1.999.750,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.497.100,00
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	8.000.000,00	6.498.750,00		5.000.000,00	5.999.655,00
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	1.500.000,00	149.000,00		1.500.000,00	983.730,00
2-x-x-1-2-01-05-1	Biaya Pengisian Tabung					
2-x-x-1-2-01-06-1	Biaya pengisian Gas					
2-x-x-1-2-01-07-1	Biaya BBM					
2-x-x-1-2-01-08-1	Biaya Keperluan Rumah Tangga Pimpinan	3.972.145,00	2.873.400,00		5.775.110,00	1.034.400,00
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik	6.463.140,00	4.994.157,00		7.198.926,00	4.202.299,00
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon	500.000,00	160.500,00		500.000,00	600.000,00
2-x-x-1-2-02-03-1	Biaya Air	1.500.000,00	900.000,00		1.500.000,00	1.005.500,00
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00			1.000.000,00	
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman					

2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	3.600.000,00			9.900.000,00	3.600.000,00
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Upah Pungut (Bahan Galian golongan C)					
2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan					
2-x-x-1-2-02-12-1	Biaya Penunjang Kegiatan Pemerintahan					
2-x-x-1-2-02-13-1	Biaya Pajak Jasa Giro	4.999.200,00	6.999.300,00		7.000.000,00	2.489.080,00
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	4.500.000,00	4.999.400,00		5.000.000,00	1.999.580,00
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy			10.000.000,00		
2-x-x-1-2-04-01-1	Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas					
2-x-x-1-2-04-02-1	Biaya Sewa gedung Kantor					
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian	33.000.000,00	8.000.000,00	107.276.550,00	11.600.000,00	11.999.808,00
2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00	3.296.000,00
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu		1.000.000,00			1.000.000,00
2-x-x-1-2-06-01-1	Biaya Pakaian Sipil Harian					
2-x-x-1-2-06-04-1	Biaya Pakaian Sipil Lengkap					
2-x-x-1-2-06-07-1	Biaya Pakaian Pol PP Lengkap					
2-x-x-1-3- - -1	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	7.500.000,00		20.000.000,00	11.632.500,00
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	7.500.000,00		20.000.000,00	11.632.500,00
2-x-x-1-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					
2-x-x-1-3-01-03-1	Biaya Operasional					
2-x-x-1-4- - -1	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	15.994.300,00		8.000.000,00	9.723.980,00
2-x-x-1-4-04-01-1	Biaya Pemeliharaan Alat studio					
2-x-x-1-4-04-02-1	Biaya pemeliharaan alat Komunikasi					
2-x-x-1-4-05-02-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik					
2-x-x-1-4-05-03-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Telepon					
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	5.000.000,00	6.497.300,00		4.000.000,00	1.865.180,00
2-x-x-1-4-06-02-1	Biaya Pemeliharaan Bangunan gedung tempat tinggal					
2-x-x-1-4-06-04-1	Biaya Pemeliharaan halaman dan taman		2.500.000,00			
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor	12.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	6.083.800,00
2-x-x-1-4-09-04-1	Biaya Asuransi Kendaraan Roda 4 (46 Unit)					
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	1.500.000,00	1.497.000,00		1.500.000,00	1.125.000,00
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga		1.000.000,00			
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer		2.000.000,00			650.000,00
2-x-x-1-4-12-04-1	Biaya Pemeliharaan meja dan kursi					
2-x-x-1-4-12-05-1	Biaya Pemeliharaan AC					
2-x-x-1-4-12-06-1	Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik Manual					
2-x-x-2- - - -1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	8.500.000,00			9.492.500,00	12.500.000,00
2-x-x-2-1- - -1	Belanja Pegawai/Personalia	6.000.000,00			7.500.000,00	12.500.000,00
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia	2.500.000,00			2.000.000,00	
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upah Harian					
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan					
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian	2.000.000,00			2.500.000,00	
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas					
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif	1.500.000,00			3.000.000,00	12.500.000,00
2-x-x-2-1-03-03-1	Upah Pungut/Uang Perangsang					
2-x-x-2-2- - -1	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00				
2-x-x-2-2-01-01-1	Biaya Bahan Bangunan					

2-x-x-2-2-01-04-1	Biaya Bahan Percontohan							
2-x-x-2-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis							
2-x-x-2-2-02-01-1	Biaya Jasa Tenaga Kerja Non PNS							
2-x-x-2-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi	2.500.000,00						
2-x-x-2-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi							
2-x-x-2-2-02-04-1	Biaya dekorasi							
2-x-x-2-2-02-05-1	Biaya Alat Tulis Kantor							
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak							
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy							
2-x-x-2-2-04-01-1	Biaya Sewa Tempat							
2-x-x-2-2-04-02-1	Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan							
2-x-x-2-2-04-03-1	Biaya Sewa Perlengkapan							
2-x-x-2-2-04-04-1	Biaya Sewa peralatan							
2-x-x-2-2-05-01-1	Biaya Makanan dan Minum							
2-x-x-2-3-.-.-1	Belanja Perjalanan Dinas							1.992.500,00
2-x-x-2-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah							1.992.500,00
2-x-x-2-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah							
2-x-x-2-4-.-.-1	Belanja Pemeliharaan							
2-x-x-2-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer							
2-x-x-2-4-14-03-1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan							
2-x-x-3-.-.-.-1	Belanja Modal Aparatur							
2-x-x-3-9-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua					1.890.000,00		3.964.000,00
2-x-x-3-10-02-01-1	Belanja Modal Alat Bengkel Pengujian							
2-x-x-3-12-01-.-1	Belanja Modal Alat Kantor					1.890.000,00		6.000.000,00
2-x-x-3-12-02-.-1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga							429.000,00
2-x-x-3-12-03-.-1	Belanja Modal Komputer							2.485.000,00
2-x-x-3-12-04-.-1	Belanja Modal Meja Kursi							
2-x-x-3-13-01-.-1	Belanja Modal Alat Studio							
2-x-x-3-13-02-.-1	Belanja Modal Alat Komunikasi							
2-x-x-3-16-01-.-1	Belanja Modal Buku							1.050.000,00
	Belanja Publik							
2-x-x-1-.-.-.-2	Belanja Administrasi Umum							
2-x-x-1-1-.-.-2	Belanja Pegawai/Personalia							
2-x-x-1-1-01-.-2	Belanja tetap dan tunj. Pimpinan dan anggota DPRD							
2-x-x-1-1-01-01-2	Uang Representase							
2-x-x-1-1-01-02-2	Uang Paket							
2-x-x-1-1-01-03-2	Tunjangan Jabatan							
2-x-x-1-1-01-04-2	Tunjangan Panitia							
2-x-x-1-1-01-05-2	Tunjangan Komisi							
2-x-x-1-1-01-06-2	Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH 21							
2-x-x-1-1-01-07-2	Tunjangan Keluarga							
2-x-x-1-1-01-08-2	Tunjangan Beras							
2-x-x-1-1-02-.-2	Gaji dan Tunj. Walikota/Wakil Walikota							
2-x-x-1-1-02-01-2	Gaji Pokok							
		267.991.000,00	930.229.100,00	2.628.472.814,00	295.077.500,00	1.092.449.745,00		
				980.400.989,00				

Kode Rekening	Nama Rekening	Sosnakerduk	Dinas Perindag	DISHUB	Dinas Pdtkn	Dinas Kesehatan
Belanja Aparatur						
2-x-x-1-1-03-01-1	Belanja Administrasi Umum	1.326.089.684,00	1.323.386.118,00	1.016.209.013,00	39.489.326.403,00	3.467.295.442,00
2-x-x-1-1-03-02-1	Belanja Pegawai/Personalia	1.320.597.184,00	1.192.393.618,00	923.784.013,00	39.474.386.403,00	3.387.313.142,00
2-x-x-1-1-03-03-1	Gaji Pokok	1.207.938.223,00	1.027.582.418,00	772.912.817,00	39.377.046.023,00	3.023.588.969,00
2-x-x-1-1-03-04-1	Tunjangan Keluarga	853.434.625,00	69.332.835,00	511.041.305,00	28.597.630.198,00	2.224.903.366,00
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Jabatan	79.361.880,00	73.548.992,00	66.507.426,00	2.575.267.902,00	183.875.612,00
2-x-x-1-1-03-06-1	Tunjangan Beras	94.981.000,00	92.516.000,00	63.660.000,00	4.922.434.840,00	293.529.100,00
2-x-x-1-1-03-07-1	Pembayaran PPH	64.242.150,00	57.351.540,00	49.618.410,00	2.047.927.620,00	165.856.080,00
2-x-x-1-1-04-01-1	Iuran Asuransi Kesehatan	30.968.568,00	25.533.051,00	17.985.673,00	1.149.485.463,00	80.124.811,00
2-x-x-1-1-04-02-1	General Check UP					
2-x-x-1-1-04-03-1	Pemeliharaan Kesehatan					
2-x-x-1-1-05-01-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas					
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan					
2-x-x-1-1-05-03-1	Biaya Bantuan Penelitian Studi					
2-x-x-1-1-05-04-1	Biaya Bantuan Penyerangan Calon Mahasiswa					
2-x-x-1-1-05-05-1	Bantuan Izin Belajar Diploma, Strata I, Strata II.					
2-x-x-1-1-05-06-1	Bantuan Biaya Pendidikan					
2-x-x-1-1-05-07-1	Biaya Studi Banding keluar Daerah					
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	57.950.000,00	52.850.000,00	40.800.000,00	57.300.000,00	44.700.000,00
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus					
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Brg	9.000.000,00	9.450.000,00	10.800.000,00	9.000.000,00	12.600.000,00
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten	18.000.000,00	18.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2-x-x-1-1-06-05-1	Dana Taktis Kepala Dinas					
2-x-x-1-1-06-06-1	Uang Tunjangan Jasa Pengabdian					
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Kesejahteraan Pegawai					
2-x-x-1-1-07-02-1	Uang Duka					
2-x-x-1-1-07-03-1	Penunjang Kegiatan DPRD					
2-x-x-1-1-07-04-1	Penunjang Kegiatan Sekretaris DPRD					
2-x-x-1-2-01-01-1	Belanja Barang dan Jasa	79.700.511,00	130.711.700,00	123.642.196,00	86.840.380,00	284.734.923,00
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	2.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.982.250,00
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	28.496.580,00
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.200.000,00	499.000,00	1.998.000,00	3.999.000,00
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan		1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.791.233,00
2-x-x-1-2-01-05-1	Biaya Pengisian Tabung		500.000,00			
2-x-x-1-2-01-06-1	Biaya pengisian Gas		740.000,00		52.500,00	
2-x-x-1-2-01-07-1	Biaya BBM					
2-x-x-1-2-01-08-1	Biaya Keperluan Rumah Tangga Pimpinan					
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik	6.713.030,00	17.771.000,00	3.894.570,00	6.332.380,00	18.638.290,00
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon	6.117.656,00	9.590.800,00	4.901.696,00	5.947.250,00	19.421.450,00
2-x-x-1-2-02-03-1	Biaya Air		1.690.500,00	1.000.000,00	1.410.250,00	2.002.320,00
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah	641.500,00	621.400,00	1.298.000,00		
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman					
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	3.250.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	125.000.000,00
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Upah Pungut (Bahan Galian golongan C)					2.392.900,00

2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan				8.852.050,00			
2-x-x-1-2-02-12-1	Biaya Penunjang Kegiatan Pemerintahan							
2-x-x-1-2-02-13-1	Biaya Pajak Jasa Giro							
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	6.000.000,00			32.500.000,00		6.000.000,00	17.894.000,00
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	4.500.000,00			7.500.000,00		9.000.000,00	12.999.900,00
2-x-x-1-2-04-01-1	Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas							
2-x-x-1-2-04-02-1	Biaya Sewa gedung Kantor							
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian	34.000.000,00			17.400.000,00		23.000.000,00	30.960.000,00
2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat	2.978.325,00			49.998.000,00		3.000.000,00	11.157.000,00
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu				1.000.000,00		15.000.000,00	2.000.000,00
2-x-x-1-2-06-01-1	Biaya Pakaian Sipil Harian					49.625.000,00		
2-x-x-1-2-06-04-1	Biaya Pakaian Sipil Lengkap							
2-x-x-1-2-06-07-1	Biaya Pakaian Pol PP Lengkap							
2-x-x-1-3- - -1	Belanja Perjalanan Dinas	18.097.500,00			11.600.000,00		5.550.000,00	29.520.000,00
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.097.500,00			11.600.000,00		555.000,00	29.520.000,00
2-x-x-1-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah							
2-x-x-1-3-01-03-1	Biaya Operasional							
2-x-x-1-4- - -1	Belanja Pemeliharaan	14.860.950,00			22.499.500,00		10.500.000,00	49.469.250,00
2-x-x-1-4-04-01-1	Biaya Pemeliharaan Alat studio							
2-x-x-1-4-04-02-1	Biaya pemeliharaan alat Komunikasi							
2-x-x-1-4-05-02-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik			500.000,00				
2-x-x-1-4-05-03-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Telepon			500.000,00				
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	5.000.000,00			4.999.500,00		4.000.000,00	9.996.750,00
2-x-x-1-4-06-02-1	Biaya Pemeliharaan Bangunan gedung tempat tinggal							
2-x-x-1-4-06-04-1	Biaya Pemeliharaan halaman dan taman							
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor							
2-x-x-1-4-09-04-1	Biaya Asuransi Kendaraan Roda 4 (46 Unit)							
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	4.990.950,00			7.000.000,00		1.000.000,00	9.500.000,00
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga							
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	1.250.000,00			2.000.000,00		1.000.000,00	4.445.000,00
2-x-x-1-4-12-04-1	Biaya Pemeliharaan meja dan kursi	120.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
2-x-x-1-4-12-05-1	Biaya Pemeliharaan AC	1.500.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	20.588.500,00
2-x-x-1-4-12-06-1	Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik Manual							
2-x-x-2- - - -1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	115.992.500,00			110.492.500,00		82.110.000,00	63.007.300,00
2-x-x-2-1- - -1	Belanja Pegawai/Personalia							
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia							
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upan Harian						4.950.000,00	
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan							
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian							
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas							
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif	110.492.500,00					82.110.000,00	6.060.000,00
2-x-x-2-1-03-03-1	Upah Pungut/Uang Perangsang							
2-x-x-2- - - -1	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00			5.500.000,00			30.242.300,00
2-x-x-2-01-01-1	Biaya Bahan Bangunan							4.950.000,00
2-x-x-2-01-04-1	Biaya Bahan Percontohan							4.285.000,00
2-x-x-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis	2.500.000,00						

2-x-x-2-2-02-01-1	Biaya Jasa Tenaga Kerja Non PNS							920.000,00
2-x-x-2-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi							1.150.000,00
2-x-x-2-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi							1.300.000,00
2-x-x-2-2-02-04-1	Biaya dekorasi							
2-x-x-2-2-02-05-1	Biaya Alat Tulis Kantor	1.500.000,00						5.497.500,00
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak	1.500.000,00						3.239.800,00
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy							1.600.000,00
2-x-x-2-2-04-01-1	Biaya Sewa Tempat							
2-x-x-2-2-04-02-1	Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan							
2-x-x-2-2-04-03-1	Biaya Sewa Perlengkapan							250.000,00
2-x-x-2-2-04-04-1	Biaya Sewa peralatan							7.050.000,00
2-x-x-2-2-05-01-1	Biaya Makanan dan Minum							8.530.000,00
2-x-x-2-3- - -1	Belanja Perjalanan Dinas							
2-x-x-2-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah							
2-x-x-2-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah							9.990.000,00
2-x-x-2-4- - -1	Belanja Pemeliharaan							
2-x-x-2-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer							
2-x-x-2-4-14-03-1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan							
2-x-x-3- - - -1	Belanja Modal Aparatur							
2-x-x-3-9-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua	15.000.000,00						
2-x-x-3-10-02-01-1	Belanja Modal Alat Bengkel Pengujian							4.590.000,00
2-x-x-3-12-01- -1	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00						4.500.000,00
2-x-x-3-12-02- -1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.000.000,00						1.225.000,00
2-x-x-3-12-03- -1	Belanja Modal Komputer							
2-x-x-3-12-04- -1	Belanja Modal Meja Kursi	3.492.500,00						
2-x-x-3-13-01- -1	Belanja Modal Alat Studio							
2-x-x-3-13-02- -1	Belanja Modal Alat Komunikasi							
2-x-x-3-16-01- -1	Belanja Modal Buku							
Belanja Publik								
2-x-x-1- - - -2	Belanja Administrasi Umum	339.700.222,00	556.903.950,00				328.680.000,00	6.697.845.952,00
2-x-x-1-1- - -2	Belanja Pegawai/Personalia	13.692.722,00					53.187.500,00	290.388.785,00
2-x-x-1-1-01- -2	Belanja tetap dan tunj. Pimpinan dan anggota DPRD							
2-x-x-1-1-01-01-2	Uang Representase							
2-x-x-1-1-01-02-2	Uang Paket							
2-x-x-1-1-01-03-2	Tunjangan Jabatan							
2-x-x-1-1-01-04-2	Tunjangan Panitia							
2-x-x-1-1-01-05-2	Tunjangan Komisi							
2-x-x-1-1-01-06-2	Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH 21							
2-x-x-1-1-01-07-2	Tunjangan Keluarga							
2-x-x-1-1-01-08-2	Tunjangan Beras							
2-x-x-1-1-02- -2	Gaji dan Tunj. Walikota/Wakil Walikota							
2-x-x-1-1-02-01-2	Gaji Pokok							
2-x-x-1-1-02-02-2	Tunjangan Jabatan							
2-x-x-1-1-02-03-2	Tunjangan Keluarga							
2-x-x-1-1-02-06-2	Tunjangan Beras							

Belanja Aparatur		Dinas Kebershn	Dinas PU	DisBud&prwst	Dinas Trantib
2-x-x-1-1-03-01-1	Belanja Administrasi Umum	814.187.239,00	1.093.379.050,00	768.449.610,00	1.976.722.813,00
2-x-x-1-1-03-02-1	Belanja Pegawai/Personalia	743.387.239,00	1.012.343.900,00	674.519.610,00	1.692.742.813,00
2-x-x-1-1-03-03-1	Gaji Pokok	621.110.727,00	796.134.914,00	562.524.243,00	1.078.604.649,00
2-x-x-1-1-03-04-1	Tunjangan Keluarga	394.485.354,00	543.275.545,00	361.452.367,00	677.982.356,00
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Jabatan	41.527.412,00	60.042.730,00	31.230.792,00	43.113.016,00
2-x-x-1-1-03-06-1	Tunjangan Beras	66.780.000,00	56.340.000,00	61.860.000,00	57.780.000,00
2-x-x-1-1-03-07-1	Pembayaran PPH	31.775.040,00	49.889.220,00	25.185.330,00	50.701.650,00
2-x-x-1-1-04-01-1	Iuran Asuransi Kesehatan	15.592.921,00	17.387.419,00	14.395.754,00	21.277.627,00
2-x-x-1-1-04-04-1	General Check UP				
2-x-x-1-1-04-05-1	Pemeliharaan Kesehatan				
2-x-x-1-1-05-01-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas				
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan				
2-x-x-1-1-05-03-1	Biaya Bantuan Penelitian Studi				159.500.000,00
2-x-x-1-1-05-04-1	Biaya Bantuan Penyerangan Calon Mahasiswa				
2-x-x-1-1-05-05-1	Bantuan Izin Belajar Diploma, Strata I, Strata II.				
2-x-x-1-1-05-06-1	Bantuan Biaya Pendidikan				
2-x-x-1-1-05-07-1	Biaya Studi Banding keluar Daerah				
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	42.150.000,00	41.200.000,00	41.400.000,00	41.250.000,00
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus				
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Big	10.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2-x-x-1-1-06-05-1	Dana Taktis Kepala Dinas				
2-x-x-1-1-06-06-1	Uang Tunjangan Jasa Pengabdian				
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Kesejahteraan Pegawai				
2-x-x-1-1-07-02-1	Uang Duka				
2-x-x-1-1-07-03-1	Penunjang Kegiatan DPRD				
2-x-x-1-1-07-04-1	Penunjang Kegiatan Sekretaris DPRD				
2-x-x-1-2-01-01-1	Belanja Barang dan Jasa	104.777.162,00	141.576.486,00	70.622.867,00	569.098.164,00
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	1.500.000,00	4.926.300,00	1.500.000,00	500.000,00
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	7.500.000,00	42.395.550,00	5.500.000,00	6.000.000,00
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko/Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	3.120.000,00	1.500.000,00	500.000,00
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	1.000.000,00	2.907.592,00	1.500.000,00	500.000,00
2-x-x-1-2-01-05-1	Biaya Pengisian Tabung				
2-x-x-1-2-01-06-1	Biaya pengisian Gas			720.000,00	
2-x-x-1-2-01-07-1	Biaya BBM				
2-x-x-1-2-01-08-1	Biaya Keperluan Rumah Tangga Pimpinan				
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik	7.152.300,00	10.013.040,00	5.962.760,00	5.859.900,00
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon	6.962.787,00	6.518.233,00	9.472.607,00	6.844.264,00
2-x-x-1-2-02-03-1	Biaya Air	1.200.000,00	2.680.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah	1.137.500,00	1.985.500,00		
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman				
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS		3.600.000,00	3.600.000,00	346.700.000,00
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Upah Pungut (Bahan Galian golongan C)		12.160.531,00	360.000,00	

2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan	43.902.375,00				
2-x-x-1-2-02-12-1	Biaya Penunjang Kegiatan Pemerintahan					
2-x-x-1-2-02-13-1	Biaya Pajak Jasa Giro					
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	6.998.200,00	9.942.800,00	7.000.000,00	2.000.000,00	
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	6.000.000,00	14.974.190,00	4.000.000,00	3.000.000,00	
2-x-x-1-2-04-01-1	Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas					
2-x-x-1-2-04-02-1	Biaya Sewa gedung Kantor					
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian	17.424.000,00	20.616.750,00	11.680.000,00	38.400.000,00	
2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	5.756.000,00	7.146.500,00	3.000.000,00	
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu	500.000,00		8.981.000,00		
2-x-x-1-2-06-01-1	Biaya Pakaian Sipil Harian					
2-x-x-1-2-06-04-1	Biaya Pakaian Sipil Lengkap					
2-x-x-1-2-06-07-1	Biaya Pakaian Poli PP Lengkap					153.394.000,00
2-x-x-1-3-.-.-1	Belanja Perjalanan Dinas					
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		26.452.000,00	21.574.500,00	7.500.000,00	
2-x-x-1-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah		26.452.000,00	21.574.500,00	7.500.000,00	
2-x-x-1-3-01-03-1	Biaya Operasional					
2-x-x-1-4-.-.-1	Belanja Pemeliharaan					
2-x-x-1-4-04-01-1	Biaya Pemeliharaan Alat studio	17.499.350,00	48.180.500,00	19.498.000,00	37.540.000,00	
2-x-x-1-4-04-02-1	Biaya pemeliharaan alat Komunikasi					
2-x-x-1-4-05-02-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik					
2-x-x-1-4-05-03-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Telepon					
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	2.500.000,00	16.305.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	
2-x-x-1-4-06-02-1	Biaya Pemeliharaan Bangunan gedung tempat tinggal					
2-x-x-1-4-06-04-1	Biaya Pemeliharaan halaman dan taman					
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor	10.999.350,00	24.975.500,00	1.000.000,00	27.540.000,00	
2-x-x-1-4-09-04-1	Biaya Asuransi Kendaraan Roda 4 (46 Unit)					
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	1.500.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga					
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
2-x-x-1-4-12-04-1	Biaya Pemeliharaan meja dan kursi	500.000,00				
2-x-x-1-4-12-05-1	Biaya Pemeliharaan AC					
2-x-x-1-4-12-06-1	Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik Manual		900.000,00	2.000.000,00		
2-x-x-2-.-.-1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	70.800.000,00	31.300.600,00	87.120.000,00	279.000.000,00	
2-x-x-2-1-.-.-1	Belanja Pegawai/Personalia					
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia					
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upah Harian					
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan					
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian					
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas					
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif	70.800.000,00	31.300.000,00	53.950.000,00	279.000.000,00	
2-x-x-2-1-03-03-1	Upah Pungut/Upah Perangsang					
2-x-x-2-.-.-1	Belanja Barang dan Jasa					
2-x-x-2-01-01-1	Biaya Bahan Bangunan					
2-x-x-2-01-04-1	Biaya Bahan Percontohan					
2-x-x-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis					

2-x-x-2-2-02-01-1	Biaya Jasa Tenaga Kerja Non PNS						
2-x-x-2-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi						
2-x-x-2-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi						
2-x-x-2-2-02-04-1	Biaya dekorasi						
2-x-x-2-2-02-05-1	Biaya Alat Tulis Kantor						
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak						
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy						
2-x-x-2-2-04-01-1	Biaya Sewa Tempat						
2-x-x-2-2-04-02-1	Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan						
2-x-x-2-2-04-03-1	Biaya Sewa Perlengkapan						
2-x-x-2-2-04-04-1	Biaya Sewa peralatan						
2-x-x-2-2-05-01-1	Biaya Makan dan Minum						
2-x-x-2-3-.-.-1	Belanja Perjalanan Dinas						
2-x-x-2-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah					33.170.000,00	
2-x-x-2-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					33.170.000,00	
2-x-x-2-4-.-.-1	Belanja Pemeliharaan						
2-x-x-2-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer						
2-x-x-2-4-14-03-1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan						
2-x-x-3-.-.-1	Belanja Modal Aparatur						
2-x-x-3-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua					49.735.150,00	4.980.000,00
2-x-x-3-10-02-01-1	Belanja Modal Alat Bengkel Pengujian						
2-x-x-3-12-01-.-1	Belanja Modal Alat Kantor					49.735.150,00	4.980.000,00
2-x-x-3-12-02-.-1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						
2-x-x-3-12-03-.-1	Belanja Modal Komputer						
2-x-x-3-12-04-.-1	Belanja Modal Meja Kursi						
2-x-x-3-13-01-.-1	Belanja Modal Alat Studio					7.110.000,00	
2-x-x-3-13-02-.-1	Belanja Modal Alat Komunikasi						
2-x-x-3-16-01-.-1	Belanja Modal Buku						
Belanja Publik							
2-x-x-1-.-.-2	Belanja Administrasi Umum					27.998.233.925,00	203.700.000,00
2-x-x-1-1-.-.-2	Belanja Pegawai/Personalia						
2-x-x-1-1-01-.-2	Belanja tetap dan tunj. Pimpinan dan anggota DPRD					1.617.168.040,00	75.000.000,00
2-x-x-1-1-01-01-2	Uang Representase					325.148.500,00	
2-x-x-1-1-01-02-2	Uang Paket						
2-x-x-1-1-01-03-2	Tunjangan Jabatan						
2-x-x-1-1-01-04-2	Tunjangan Panitia						
2-x-x-1-1-01-05-2	Tunjangan Komisi						
2-x-x-1-1-01-06-2	Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH 21						
2-x-x-1-1-01-07-2	Tunjangan Keluarga						
2-x-x-1-1-01-08-2	Tunjangan Beras						
2-x-x-1-1-02-.-2	Gaji dan Tunj. Walikota/Wakil Walikota						
2-x-x-1-1-02-01-2	Gaji Pokok						
2-x-x-1-1-02-02-2	Tunjangan Jabatan						
2-x-x-1-1-02-03-2	Tunjangan Keluarga						
2-x-x-1-1-02-06-2	Tunjangan Beras						

2-x-x-1-1-02-07-2	Tunjangan PPh						
2-x-x-1-1-02-09-2	Tunjangan Kesehatan						
2-x-x-1-1-03- -2	Gaji dan Tunjangan Pegawai						
2-x-x-1-1-03-09-2	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa						
2-x-x-1-1-05- -2	Biaya Pengembangan Sumber daya Manusia						
2-x-x-1-1-05-01-2	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas						
2-x-x-1-1-05-03-2	Biaya Bantuan penelitian dan studi						
2-x-x-1-1-05-04-2	Biaya Bantuan Penyerangan calon siswa						
2-x-x-1-1-05-06-2	Bantuan Biaya Pendidikan						
2-x-x-1-1-05-07-2	Biaya Studi Banding Keluar daerah						
2-x-x-1-1-06- -2	Santunan						
2-x-x-1-2- -2	Belanja Barang dan Jasa	1.201.832.500,00					75.000.000,00
2-x-x-1-2-01-01-2	Biaya Alat Listrik dan Elektronik						
2-x-x-1-2-01-02-2	Biaya Alat Tulis						
2-x-x-1-2-01-03-2	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
2-x-x-1-2-01-04-2	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	90.000.000,00					
2-x-x-1-2-01-06-2	Biaya Gas						
2-x-x-1-2-01-07-2	Biaya Keperluan Rumah Tangga						
2-x-x-1-2-01-08-2	Biaya Bahan Linen/Rumah Tangga						
2-x-x-1-2-01-09-2	Biaya Pembuatan Plat Uji Kendaraan						
2-x-x-1-2-02-01-2	Biaya Listrik						
2-x-x-1-2-02-02-2	Biaya telepon						
2-x-x-1-2-02-03-2	Biaya Air						
2-x-x-1-2-02-04-2	Biaya Surat Kabar/Majalah						
2-x-x-1-2-02-07-2	Biaya Jasa Pegawai Non PNS						
2-x-x-1-2-02-12-2	Biaya Penunjang kegiatan walikota/Wakil (operasional)						
2-x-x-1-2-01-13-2	Biaya Penunjang Pembinaan Kemasyarakatan						
2-x-x-1-2-03-01-2	Biaya Cetak						
2-x-x-1-2-03-01-2	Biaya Fotocopy						
2-x-x-1-2-05- -2	Biaya Makan dan Minum Kantor						
2-x-x-1-2-06- -2	Biaya Pakaiat Dinas	61.620.000,00					75.000.000,00
2-x-x-1-4- -2	Belanja Pemeliharaan	415.335.540,00					
2-x-x-1-4-05-02-2	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik	325.148.500,00					
2-x-x-1-4-06-04-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan TPS	324.648.500,00					
2-x-x-1-4-08- -2	Biaya Pemeliharaan Buldozer	18.000.000,00					
2-x-x-1-4-09-01-2	Biaya Pemeliharaan alat-alat Akt. Darat Bermotor	50.000.000,00					
2-x-x-1-4-09-02-2	Biaya Pemeliharaan alat-alat Akt. Darat tidak Bermotor	304.175.550,00					
2-x-x-1-4-10-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin	15.000.000,00					
2-x-x-1-4-11-02-2	Biaya Pemeliharaan mesin pemotong rumput	500.000,00					
2-x-x-2- - -2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	28.159.990,00					
2-x-x-2-1- -2	Belanja Pegawai/Personalia	423.850.900,00					128.700.000,00
2-x-x-2-1-01-01-2	Honorarium Tim/Panitia	191.612.500,00					22.600.000,00
2-x-x-2-1-01-02-2	Honor/Upah Bulanan	67.750.000,00					13.300.000,00
2-x-x-2-1-01-03-2	Honor/Upah Harian						
2-x-x-2-1-01-04-2	Tunjangan Khusus Tenaga Kesehatan						
2-x-x-2-1-02-02-2	Uang Lembur Harian						

2-x-x-2-1-03-01-2	Insentif untuk Panitia Pelaksana	123.862.500,00	242.638.000,00	98.700.000,00	9.300.000,00
2-x-x-2-1-03-02-2	Upah Pungut				
2-x-x-2-1-03-03-2	Insentif Untuk Peserta			94.500.000,00	
2-x-x-2-2-.-.-2	Belanja Barang Dan Jasa	177.325.900,00	2.280.788.825,00	1.043.158.827,00	91.820.000,00
2-x-x-2-2-01-01-2	Biaya Bahan baku				
2-x-x-2-2-01-02-2	Biaya Bahan/Bibit Tanaman/Benih Ikan				
2-x-x-2-2-01-03-2	Biaya bahan obat-obatan	2.990.000,00			
2-x-x-2-2-01-04-2	Biaya Stimulan				
2-x-x-2-2-01-05-2	Biaya Alat tulis	1.605.000,00	91.917.895,00	13.470.000,00	5.000.000,00
2-x-x-2-2-01-06-2	Biaya bahan pelajaran, bahan material lainnya			13.500.000,00	24.190.000,00
2-x-x-2-2-01-07-2	Biaya Bahan Kampanye Kesehatan/Materi Pameran				
2-x-x-2-2-01-08-2	Biaya Penunjang Kegiatan				
2-x-x-2-2-02-01-2	Biaya Jasa tenaga Kerja Non PNS	116.000.000,00		577.104.000,00	8.200.000,00
2-x-x-2-2-02-02-2	Biaya Transportasi dan Akomodasi	5.885.000,00		131.930.000,00	6.700.000,00
2-x-x-2-2-02-03-2	Biaya Dokumentasi	9.000.000,00	3.718.645,00	9.000.000,00	1.300.000,00
2-x-x-2-2-02-04-2	Biaya dekorasi	700.000,00		22.000.000,00	1.400.000,00
2-x-x-2-2-02-05-2	Biaya Jasa Pelaksana dan Pihak Ketiga				
2-x-x-2-2-02-06-2	Biaya Jasa Konsultan		2.043.740.500,00		
2-x-x-2-2-02-07-2	Biaya Pelayanan Pengaduan Masyarakat				
2-x-x-2-2-03-01-2	Biaya Cetak	14.250.000,00	40.816.125,00	98.802.327,00	1.400.000,00
2-x-x-2-2-03-02-2	Biaya Fotocopy	2.249.900,00	60.841.635,00	15.622.500,00	3.000.000,00
2-x-x-2-2-03-03-2	Biaya Penggandaan		19.689.525,00		
2-x-x-2-2-04-01-2	Biaya Sewa Tempat	3.000.000,00		27.150.000,00	1.100.000,00
2-x-x-2-2-04-02-2	Biaya Sewa Kendaraan/alat angkutan			11.500.000,00	
2-x-x-2-2-04-03-2	Biaya Sewa Perlengkapan			14.280.000,00	300.000,00
2-x-x-2-2-04-04-2	Biaya Sewa Peralatan			15.500.000,00	2.800.000,00
2-x-x-2-2-04-05-2	Biaya Sewa Sound System/OHP				
2-x-x-2-2-05-01-2	Biaya Makanan dan Minuman	21.646.000,00	20.064.500,00	93.300.000,00	18.210.000,00
2-x-x-2-2-07-01-2	Biaya Pakaian Kerja				18.220.000,00
2-x-x-2-2-07-02-2	Biaya Pakaian Petugas Parkir				
2-x-x-2-3-.-.-2	Belanja Perjalanan Dinas				
2-x-x-2-3-01-01-2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	9.912.500,00	116.402.500,00		14.280.000,00
2-x-x-2-3-01-02-2	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.912.500,00	116.402.500,00		14.280.000,00
2-x-x-2-4-.-.-2	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	8.719.632.660,00		
2-x-x-2-4-02-01-2	Pemeliharaan Jalan Kota Singkawang		5.733.683.045,00		
2-x-x-2-4-02-04-2	Biaya Pemeliharaan fasilitas jalan				
2-x-x-2-4-03-01-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan Air		298.981.500,00		
2-x-x-2-4-03-03-2	Biaya Pemeliharaan Jaringan Drainage (swakelola)		284.874.500,00		
2-x-x-2-4-06-01-2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		1.011.921.615,00		
2-x-x-2-4-06-02-2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		642.979.000,00		
2-x-x-2-4-06-03-2	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Sekolah				
2-x-x-2-4-06-04-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung SD/MI				
2-x-x-2-4-07-03-2	Biaya Pemeliharaan Taman	30.000.000,00			
2-x-x-2-4-09-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan darat Bermotor				
2-x-x-2-4-12-01-2	Biaya Pemeliharaan alat Kantor				
2-x-x-2-4-12-02-2	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga				

2-x-x-2-4-12-03-2	Biaya Pemeliharaan Komputer				
2-x-x-2-4-12-04-2	Biaya Pemeliharaan Meja/Kursi				
2-x-x-2-4-14-02-2	Biaya pemeliharaan alat kesehatan				
2-x-x-2-4-15-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium				
2-x-x-2-4-18-03-2	Biaya Pemeliharaan pohon/Tanaman Pelindung	15.000.000,00			
2-x-x-3- - - -2	Belanja Modal	52.700.000,00			
2-x-x-3-1-11-01-2	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung				
2-x-x-3-1-13-01-2	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan bukan gedung				
2-x-x-3-2-01-01-2	Belanja Modal Jalan Lingkungan Aspal	574.681.000,00			
2-x-x-3-2-01-02-2	Belanja Modal Jalan Pembuatan Jalan Setapak Beton	213.931.000,00			
2-x-x-3-2-02-01-2	Belanja Modal Peningkatan Jalan dan Jembatan	1.153.913.000,00			
2-x-x-3-3-01-01-2	Belanja Modal Pengembangan daerah rawa semelagi	499.900.000,00			
2-x-x-3-3-01-02 -2	Pengembangan Daerah Rawa Sungai Rasau	99.638.000,00			
2-x-x-3-3-01-03-2	Pengembangan Irigasi	99.875.000,00			
2-x-x-3-3-02-01-2	Pembuatan Saluran Pasangan Batu Jalan Semelagi	499.850.000,00			
2-x-x-3-3-02-02-2	Normalisasi Saluran dan Sungai	1.062.809.000,00			
2-x-x-3-3-02-03-2	Perkutan Tebing Sungai	449.899.000,00			
2-x-x-3-3-03-01-2	Belanja Modal Pelabuhan Laut Kota Singkawang	3.569.863.500,00			
2-x-x-3-4-01-01-2	Rehabilitasi intake Perdesaan	79.841.000,00			
2-x-x-3-4-01-02-2	Pembangunan Sarana air bersih	20.939.000,00			
2-x-x-3-4-02-01-2	Belanja Modal Pembangunan Drainage lingk.Permukiman	704.416.000,00			
2-x-x-3-5-01-01-2	Belanja Modal Jaringan Perpipaan Perdesaan	482.122.000,00			
2-x-x-3-5-02-01-2	Belanja Modal Jaringan Listrik	387.197.200,00			
2-x-x-3-6-01-01-2	Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Kerja	391.118.700,00			
2-x-x-3-6-01-02-2	Belanja Modal Pemb. Dan Pemeliharaan Sarana Perikanan	845.999.500,00			
2-x-x-3-6-01-03-2	Belanja Modal Pemb. dan Peningkatan Sarana Kesehatan	1.417.198.275,00			
2-x-x-3-6-01-04-2	Belanja Modal Pemb. Dan Pemeliharaan Gedung	2.590.548.235,00			
2-x-x-3-6-01-05-2	Belanja Modal Pemb. Sarana promosi Perindagkop	112.616.750,00			
2-x-x-3-6-01-06-2	Belanja Modal Pemb. Sarana dan prasarana sekolah	99.930.000,00			
2-x-x-3-6-02-01-2	Belanja Modal bangunan	562.182.280,00			
2-x-x-3-6-04-01-2	Belanja Modal Prasarana Kota/Gedung OR	311.355.000,00			
2-x-x-3-11-02-02-2	Belanja Modal Peralatan Taman	20.000.000,00			
2-x-x-3-11-02-03-2	Belanja Modal Peralatan Kebersihan	25.200.000,00			
2-x-x-3-12-01-01-2	Belanja Modal Alat Kantor				
2-x-x-3-12-02-01-2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
2-x-x-3-12-03-01-2	Belanja Modal Komputer				
2-x-x-3-12-04-01-2	Belanja Modal Meja Kursi				
2-x-x-3-14-02-01-2	Belanja Modal alat-alat kesehatan				
2-x-x-3-15-01-01-2	Belanja Modal alat Laboratorium				
2-x-x-3-15-02-01-2	Belanja Modal alat praktik/peraga sekolah				
2-x-x-3-18-02-01-2	Belanja Modal Bibit Tanaman Pohon Tanjung	7.500.000,00			
		Direct Cost Program M	Direct Cost Program J,K	Direct Cost Program O	Direct Cost Program A

Tabel 3
Hasil Identifikasi Resource Driver

Kode Rekening	Nama Rekening	DPRD	Walikota/Wakil	SEKDA
Belanja Aparatur				23.954.608.222,28
2-x-x-1-1-01-1	Belanja Administrasi Umum			15.922.162.462,28
2-x-x-1-1-02-1	Belanja Pegawai/Personalia			9.616.345.295,00
2-x-x-1-1-03-01-1	Gaji Pokok			2.678.888.908,00
2-x-x-1-1-03-02-1	Tunjangan Keluarga			232.796.386,00
2-x-x-1-1-03-03-1	Tunjangan Jabatan			232.796.386,00
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Beras			210.944.670,00
2-x-x-1-1-03-06-1	Pembayaran PPH			87.975.133,00
2-x-x-1-1-03-07-1	Juran Asuransi Kesehatan			220.993.068,00
2-x-x-1-1-04-04-1	General Check UP			
2-x-x-1-1-04-05-1	Pemeliharaan Kesehatan			
2-x-x-1-1-05-01-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas			
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan			404.840.000,00
2-x-x-1-1-05-03-1	Biaya Bantuan Penelitian Studi			728.087.000,00
2-x-x-1-1-05-04-1	Biaya Bantuan Penyerangan Calon Mahasiswa			0,00
2-x-x-1-1-05-05-1	Bantuan Izin Belajar Diploma, Strata I, Strata II.			19.487.000,00
2-x-x-1-1-05-06-1	Bantuan Biaya Pendidikan			74.615.000,00
2-x-x-1-1-05-07-1	Biaya Studi Banding keluar Daerah			114.780.000,00
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon			96.440.000,00
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus			193.480.096,00
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Brig			49.185.250,00
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten			19.791.000,00
2-x-x-1-1-06-05-1	Dana Taktis Kepala Dinas			82.420.000,00
2-x-x-1-1-06-06-1	Uang Tunjangan Jasa Pengabdian			899.960.000,00
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Kesejahteraan Pegawai			
2-x-x-1-1-07-02-1	Uang Duka			3.250.496.784,00
2-x-x-1-1-07-03-1	Penunjang Kegiatan DPRD			
2-x-x-1-1-07-04-1	Penunjang Kegiatan Sekretaris DPRD			
2-x-x-1-2-1-1	Belanja Barang dan Jasa			3.816.557.884,28
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika			34.979.290,00
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis			199.983.878,00
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya			19.948.400,00
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan			99.979.325,00
2-x-x-1-2-01-05-1	Biaya Pengisian Tabung			
2-x-x-1-2-01-06-1	Biaya pengisian Gas			
2-x-x-1-2-01-07-1	Biaya BBM			
2-x-x-1-2-01-08-1	Biaya Keperluan Rumah Tangga Pimpinan			
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik			148.479.915,00
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon			149.982.732,00
2-x-x-1-2-02-03-1	Biaya Air			34.963.500,00
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah			95.108.900,00
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman			

2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS			284.115.000,00	Jumlah Orang
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Upah Pungut (Bahan Galian golongan C)			399.842.100,00	Jumlah Orang
2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan			245.246.815,00	Jumlah Orang
2-x-x-1-2-02-12-1	Biaya Penunjang Kegiatan Pemerintahan			698.526.472,00	Direct Cost Program A
2-x-x-1-2-02-13-1	Biaya Pajak Jasa Giro			23.084.824,28	
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak			749.996.478,00	Direct Tracing A6
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy			99.978.724,00	Direct Tracing A6
2-x-x-1-2-04-01-1	Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas				
2-x-x-1-2-04-02-1	Biaya Sewa gedung Kantor				
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian			19.970.000,00	Luas gedung
2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat			117.011.000,00	Luas gedung
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu			79.989.230,00	
2-x-x-1-2-06-01-1	Biaya Pakaian Sipil Harian			199.997.301,00	Alokasi pro rata
2-x-x-1-2-06-04-1	Biaya Pakaian Sipil Lengkap				
2-x-x-1-2-06-07-1	Biaya Pakaian Pol PP Lengkap			115.374.000,00	
2-x-x-1-3- - -1	Belanja Perjalanan Dinas				
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.624.856.400,00	
2-x-x-1-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah			74.903.900,00	Jumlah frekuensi perjalanan
2-x-x-1-3-01-03-1	Biaya Operasional			1.449.970.000,00	Jumlah frekuensi perjalanan
2-x-x-1-4- - -1	Belanja Pemeliharaan			99.982.500,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-1-4-04-01-1	Biaya Pemeliharaan Alat studio			864.402.883,00	
2-x-x-1-4-04-02-1	Biaya pemeliharaan alat Komunikasi			5.325.000,00	jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-1-4-05-02-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik			5.000.000,00	jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-1-4-05-03-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Telepon				
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja				
2-x-x-1-4-06-02-1	Biaya Pemeliharaan Bangunan gedung tempat tinggal			99.646.613,00	luas gedung
2-x-x-1-4-06-04-1	Biaya Pemeliharaan halaman dan taman			74.659.775,00	luas gedung
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor			74.943.400,00	luas gedung
2-x-x-1-4-09-04-1	Biaya Asuransi Kendaraan Roda 4 (46 Unit)			349.976.097,00	Jumlah frekuensi perjalanan
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor			105.000.000,00	Jumlah frekuensi perjalanan
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga			49.943.348,00	jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer			49.985.600,00	jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-1-4-12-04-1	Biaya Pemeliharaan meja dan kursi			49.923.050,00	jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-1-4-12-05-1	Biaya Pemeliharaan AC				
2-x-x-1-4-12-06-1	Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik Manual				
2-x-x-2- - - -1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan				
2-x-x-2-1- - -1	Belanja Pegawai/Personalia				
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia			5.299.503.485,00	
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upah Harian			2.048.499.865,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan			913.000.825,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian			24.945.000,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas			134.971.040,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif			5.710.000,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-2-1-03-03-1	Upah Pungut/Uang Perangsang			2.825.000,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-2- - - -1	Belanja Barang dan Jasa			967.048.000,00	Jumlah Orang
2-x-x-2-2-01-01-1	Biaya Bahan Bangunan			2.257.466.620,00	
				19.550.000,00	Luas Gedung

2-x-x-2-2-01-04-1	Biaya Bahan Percontohan				131.143.135,00	Jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-2-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis				1.114.583.188,00	Jumlah Orang
2-x-x-2-2-02-01-1	Biaya Jasa Tenaga Kerja Non PNS				110.027.000,00	Jmlh frekuensi perjalanan
2-x-x-2-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi				194.536.000,00	Direct Tracing A6
2-x-x-2-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi					
2-x-x-2-2-02-04-1	Biaya dekorasi					
2-x-x-2-2-02-05-1	Biaya Alat Tulis Kantor				92.723.930,00	Direct Tracing A6
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak				91.019.029,00	Direct Tracing A6
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy				66.648.384,00	Luas Gedung
2-x-x-2-2-04-01-1	Biaya Sewa Tempat				6.962.000,00	jmlh. Pemakaian kendaraan
2-x-x-2-2-04-02-1	Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan				1.870.000,00	jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-2-2-04-03-1	Biaya Sewa Perlengkapan				4.200.000,00	jml. Pemakaian inventaris
2-x-x-2-2-04-04-1	Biaya Sewa peralatan				412.625.474,00	
2-x-x-2-2-05-01-1	Biaya Makan dan Minum				984.221.700,00	
2-x-x-2-3- - - -1	Belanja Perjalanan Dinas				71.684.500,00	Frekuensi Perjalanan
2-x-x-2-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah				912.537.200,00	Frekuensi Perjalanan
2-x-x-2-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah				9.315.300,00	
2-x-x-2-4- - - -1	Belanja Pemeliharaan				4.315.300,00	jmlh pemakaian inventaris
2-x-x-2-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer				5.000.000,00	Alokasi Pro rata
2-x-x-2-4-14-03-1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan				2.732.942.275,00	
2-x-x-3- - - - -1	Belanja Modal Aparatur				493.500.000,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-9-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua					
2-x-x-3-10-02-01-1	Belanja Modal Alat Bengkel Pengujian				432.862.145,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-12-01- - -1	Belanja Modal Alat Kantor				319.110.130,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-12-02- - -1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				596.160.000,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-12-03- - -1	Belanja Modal Komputer				348.995.000,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-12-04- - -1	Belanja Modal Meja Kursi				68.315.000,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-13-01- - -1	Belanja Modal Alat Studio				449.000.000,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-13-02- - -1	Belanja Modal Alat Komunikasi				25.000.000,00	Direct Tracing A7
2-x-x-3-16-01- - -1	Belanja Modal Buku				13.241.619.190,00	
Belanja Publik					1.688.117.386,00	
2-x-x-1- - - - -2	Belanja Administrasi Umum				2.310.579.475,00	
2-x-x-1-1- - - -2	Belanja Pegawai/Personalia				1.688.117.386,00	
2-x-x-1-1-01- -2	Belanja tetap dan tunj. Pimpinan dan anggota DPRD				2.310.579.475,00	
2-x-x-1-1-01-01-2	Uang Representase				194.464.742,00	
2-x-x-1-1-01-02-2	Uang Paket				511.560.000,00	
2-x-x-1-1-01-03-2	Tunjangan Jabatan				51.156.000,00	
2-x-x-1-1-01-04-2	Tunjangan Panitia				646.632.000,00	
2-x-x-1-1-01-05-2	Tunjangan Komisi				140.005.650,00	
2-x-x-1-1-01-06-2	Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH 21				28.364.175,00	
2-x-x-1-1-01-07-2	Tunjangan Keluarga				185.656.761,00	
2-x-x-1-1-01-08-2	Tunjangan Beras				69.064.800,00	
2-x-x-1-1-02- -2	Gaji dan Tunj. Walikota/Wakil Walikota				55.678.000,00	
2-x-x-1-1-02-01-2	Gaji Pokok				194.464.742,00	
2-x-x-1-1-02-02-2	Tunjangan Jabatan				50.700.300,00	
2-x-x-1-1-02-03-2	Tunjangan Keluarga				91.260.000,00	
					7.176.000,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Dinas Pdptn	Bawasko	Bawasda
Belanja Aparatur				
2-x-x-1-1-03-01-1	Belanja Administrasi Umum	145.689.779,00	580.034.622,00	1.028.872.516,00
2-x-x-1-1-03-02-1	Belanja Pegawai/Personalia	145.689.779,00	534.687.622,00	840.126.416,00
2-x-x-1-1-03-03-1	Gaji Pokok	137.770.390,00	437.687.543,00	470.645.997,00
2-x-x-1-1-03-04-1	Tunjangan Keluarga	106.099.169,00	252.392.374,00	278.075.470,00
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Jabatan	9.854.624,00	20.594.720,00	29.504.728,00
2-x-x-1-1-03-06-1	Tunjangan Beras	9.360.000,00	66.300.000,00	66.120.000,00
2-x-x-1-1-03-07-1	Pembayaran PPH	8.756.190,00	17.181.390,00	22.627.680,00
2-x-x-1-1-04-04-1	Iuran Asuransi Kesehatan	3.700.407,00	11.119.059,00	11.418.119,00
2-x-x-1-1-04-05-1	General Check UP			
2-x-x-1-1-05-01-1	Pemeliharaan Kesehatan			
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas			
2-x-x-1-1-05-03-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan			
2-x-x-1-1-05-04-1	Biaya Bantuan Penelitian Studi			
2-x-x-1-1-05-05-1	Biaya Bantuan Penyerangan Calon Mahasiswa			
2-x-x-1-1-05-06-1	Bantuan Izin Belajar Diploma, Strata I, Strata II.			
2-x-x-1-1-06-01-1	Bantuan Biaya Pendidikan			
2-x-x-1-1-06-02-1	Biaya Studi Banding keluar Daerah			
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon			
2-x-x-1-1-06-04-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus			
2-x-x-1-1-06-05-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Big			
2-x-x-1-1-06-06-1	Biaya Emelumenten			
2-x-x-1-1-06-07-1	Dana Taktis Kepala Dinas			
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Tunjangan Jasa Pengabdian			
2-x-x-1-1-07-02-1	Uang Kesejahteraan Pegawai			
2-x-x-1-1-07-03-1	Uang Duka			
2-x-x-1-1-07-04-1	Penunjang Kegiatan DPRD			
2-x-x-1-2-01-01-1	Penunjang Kegiatan Sekretaris DPRD			
2-x-x-1-2-01-02-1	Belanja Barang dan Jasa	7.419.389,00	74.055.079,00	82.400.069,00
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika		1.500.000,00	957.700,00
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Alat Tulis	750.000,00	12.000.000,00	14.990.300,00
2-x-x-1-2-01-05-1	Biaya Prangko, Materi dan Benda Pos Lainnya		1.350.000,00	996.900,00
2-x-x-1-2-01-06-1	Biaya Perawatan Kebersihan		1.500.000,00	1.389.900,00
2-x-x-1-2-01-07-1	Biaya Pengisian Tabung			
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya pengisian Gas			
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya BBM			
2-x-x-1-2-02-03-1	Biaya Keperluan Rumah Tangga Pimpinan			
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Listrik	745.080,00		3.908.065,00
2-x-x-1-2-02-05-1	Biaya Telepon	1.234.609,00	12.794.379,00	4.331.129,00
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Air			1.200.500,00
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya Surat Kabar/Majalah			45.400,00
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Paket Pengiriman		975.200,00	1.200.000,00
2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	3.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya penyusunan P Hasil Pemeriksaan (PHP 1).					5.300.000,00	Direct Tracing A13
2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan						
2-x-x-1-2-02-12-1	Biaya Penunjang Kegiatan Pemerintahan						
2-x-x-1-2-02-13-1	Biaya Pajak Jasa Giro						
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	989.700,00	7.000.000,00	Jmlh pemakaian inv	10.120.600,00	Jmlh pemakaian inv	
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	500.000,00	18.000.000,00	Jmlh pemakaian inv	14.998.575,00	Jmlh pemakaian inv	
2-x-x-1-2-04-01-1	Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas						
2-x-x-1-2-04-02-1	Biaya Sewa gedung Kantor						
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian		12.940.500,00	Alokasi pro rata	11.000.000,00	Alokasi pro rata	
2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat		3.795.000,00	Alokasi pro rata	6.961.000,00	Alokasi pro rata	
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu		1.000.000,00	Alokasi pro rata	5.000.000,00	Alokasi pro rata	
2-x-x-1-2-06-01-1	Biaya Pakaian Sipil Harian						
2-x-x-1-2-06-04-1	Biaya Pakaian Sipil Lengkap						
2-x-x-1-2-06-07-1	Biaya Pakaian Pol PP Lengkap						
2-x-x-1-3- - -1	Belanja Perjalanan Dinas		13.445.000,00		275.000.000,00		
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		13.445.000,00	Direct Tracing A9	275.000.000,00	Direct Tracing A12	
2-x-x-1-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah						
2-x-x-1-3-01-03-1	Biaya Operasional						
2-x-x-1-4- - -1	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	9.500.000,00		12.080.350,00		
2-x-x-1-4-04-01-1	Biaya Pemeliharaan Alat studio						
2-x-x-1-4-04-02-1	Biaya pemeliharaan alat Komunikasi						
2-x-x-1-4-05-02-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik						
2-x-x-1-4-05-03-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Telepon		3.000.000,00	Luas Gedung	4.909.850,00	Luas Gedung	
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja						
2-x-x-1-4-06-02-1	Biaya Pemeliharaan Bangunan gedung tempat tinggal						
2-x-x-1-4-06-04-1	Biaya Pemeliharaan halaman dan taman						
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor						
2-x-x-1-4-09-04-1	Biaya Asuransi Kendaraan Roda 4 (46 Unit)						
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor		1.000.000,00	Direct Tracing A9		Direct Tracing A12	
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga		1.000.000,00	Jmlh Pemakaian Inv.	1.930.000,00	Jmlh Pemakaian Inv.	
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	500.000,00	1.000.000,00	Jmlh Pemakaian Inv.	2.250.000,00	Jmlh Pemakaian Inv.	
2-x-x-1-4-12-04-1	Biaya Pemeliharaan meja dan kursi		3.500.000,00	Direct Tracing A10	1.499.500,00	Jmlh Pemakaian Inv.	
2-x-x-1-4-12-05-1	Biaya Pemeliharaan AC						
2-x-x-1-4-12-06-1	Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik Manual		43.347.000,00		175.755.700,00		
2-x-x-2- - -1	Belanja Operasi dan Pemeliharaan		41.247.000,00		82.700.000,00		
2-x-x-2-1- - -1	Belanja Pegawai/Personalia				70.700.000,00	Jumlah orang	
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia						
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upah Harian						
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan						
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian		41.427.000,00	Jumlah Jam Kerja	12.000.000,00	jumlah jam kerja	
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas						
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif						
2-x-x-2-1-03-03-1	Upah Pungut/Uang Perangsang						
2-x-x-2-2- - -1	Belanja Barang dan Jasa		2.100.000,00		93.055.700,00		
2-x-x-2-2-01-01-1	Biaya Bahan Bangunan						
2-x-x-2-2-01-04-1	Biaya Bahan Percontohan						

				500.000,00	Jmlh Pemakaian Inv	3.749.400,00	Jmlh Pemakaian Inv
2-x-x-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis						
2-x-x-2-02-01-1	Biaya Jasa Tenaga Kerja Non PNS					29.998.500,00	Jumlah orang
2-x-x-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi					12.840.000,00	Direct Tracing A12
2-x-x-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi					500.000,00	Jmlh Pemakaian Inv
2-x-x-2-02-04-1	Biaya dekorasi					400.000,00	Jmlh Pemakaian Inv
2-x-x-2-02-05-1	Biaya Alat Tulis Kantor						
2-x-x-2-03-01-1	Biaya Cetak					7.878.000,00	Jmlh Pemakaian Inv
2-x-x-2-03-02-1	Biaya Fotocopy			1.600.000,00	Jmlh pemakaian inv.	3.499.800,00	Jmlh Pemakaian Inv
2-x-x-2-04-01-1	Biaya Sewa Tempat						
2-x-x-2-04-02-1	Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan						
2-x-x-2-04-03-1	Biaya Sewa Perlengkapan						
2-x-x-2-04-04-1	Biaya Sewa peralatan						
2-x-x-2-05-01-1	Biaya Makan dan Minum						
2-x-x-2-3- -1	Belanja Perjalanan Dinas						
2-x-x-2-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah						
2-x-x-2-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah						
2-x-x-2-4- -1	Belanja Pemeliharaan						
2-x-x-2-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer						
2-x-x-2-4-14-03-1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan						
2-x-x-3- -1	Belanja Modal Aparatur			2.000.000,00		12.990.400,00	
2-x-x-3-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua						
2-x-x-3-10-02-01-1	Belanja Modal Alat Bengkel Pengujian						
2-x-x-3-12-01- -1	Belanja Modal Alat Kantor						
2-x-x-3-12-02- -1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					450.000,00	Jmlh pemakaian inv
2-x-x-3-12-03- -1	Belanja Modal Komputer					1.500.000,00	Jmlh pemakaian inv
2-x-x-3-12-04- -1	Belanja Modal Meja Kursi					2.500.000,00	Jmlh pemakaian inv
2-x-x-3-13-01- -1	Belanja Modal Alat Studio					3.750.000,00	Jmlh pemakaian inv
2-x-x-3-13-02- -1	Belanja Modal Alat Komunikasi			2.000.000,00			
2-x-x-3-16-01- -1	Belanja Modal Buku						
	Belanja Publik					4.790.400,00	Alokasi pro-rata
2-x-x-1- - -2	Belanja Administrasi Umum			1.066.300.550,00			
2-x-x-1-1- - -2	Belanja Pegawai/Personalia						
2-x-x-1-1-01- -2	Belanja tetap dan tunj. Pimpinan dan anggota DPRD						
2-x-x-1-1-01-01-2	Uang Representase						
2-x-x-1-1-01-02-2	Uang Paket						
2-x-x-1-1-01-03-2	Tunjangan Jabatan						
2-x-x-1-1-01-04-2	Tunjangan Panitia						
2-x-x-1-1-01-05-2	Tunjangan Komisi						
2-x-x-1-1-01-06-2	Tunjangan Khusus/Tunjangan PPH 21						
2-x-x-1-1-01-07-2	Tunjangan Keluarga						
2-x-x-1-1-01-08-2	Tunjangan Beras						
2-x-x-1-1-02- -2	Gaji dan Tunj. Walikota/Wakil Walikota						
2-x-x-1-1-02-01-2	Gaji Pokok						
2-x-x-1-1-02-02-2	Tunjangan Jabatan						
2-x-x-1-1-02-03-2	Tunjangan Keluarga						
2-x-x-1-1-02-06-2	Tunjangan Beras						

2-x-x-1-1-02-07-2	Tunjangan PPh						
2-x-x-1-1-02-09-2	Tunjangan Kesehatan						
2-x-x-1-1-03--2	Gaji dan Tunjangan Pegawai						
2-x-x-1-1-03-09-2	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa						
2-x-x-1-1-05--2	Biaya Pengembangan Sumber daya Manusia						
2-x-x-1-1-05-01-2	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas						
2-x-x-1-1-05-03-2	Biaya Bantuan penelitian dan studi						
2-x-x-1-1-05-04-2	Biaya Bantuan Penyinggahan calon siswa						
2-x-x-1-1-05-06-2	Bantuan Biaya Pendidikan						
2-x-x-1-1-05-07-2	Biaya Studi Banding Keluar daerah						
2-x-x-1-1-06--2	Santunan						
2-x-x-1-2--2	Belanja Barang dan Jasa						
2-x-x-1-2-01-01-2	Biaya Alat Listrik dan Elektronik						
2-x-x-1-2-01-02-2	Biaya Alat Tulis						
2-x-x-1-2-01-03-2	Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya						
2-x-x-1-2-01-04-2	Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih						
2-x-x-1-2-01-06-2	Biaya Gas						
2-x-x-1-2-01-07-2	Biaya Keperluan Rumah Tangga						
2-x-x-1-2-01-08-2	Biaya Bahan Lini/Rumah Tangga						
2-x-x-1-2-01-09-2	Biaya Pembuatan Plat Uji Kendaraan						
2-x-x-1-2-02-01-2	Biaya Listrik						
2-x-x-1-2-02-02-2	Biaya telepon						
2-x-x-1-2-02-03-2	Biaya Air						
2-x-x-1-2-02-04-2	Biaya Surat Kabar/Majalah						
2-x-x-1-2-02-07-2	Biaya Jasa Pegawai Non PNS						
2-x-x-1-2-02-12-2	Biaya Penunjang kegiatan walikota/Wakil (operasional)						
2-x-x-1-2-01-13-2	Biaya Penunjang Pembinaan Kemasyarakatan						
2-x-x-1-2-03-01-2	Biaya Cetak						
2-x-x-1-2-03-01-2	Biaya Fotocopy						
2-x-x-1-2-05--2	Biaya Makan dan Minum Kantor						
2-x-x-1-2-06--2	Biaya Pakaian Dinas						
2-x-x-1-4--2	Belanja Pemeliharaan						
2-x-x-1-4-05-02-2	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik						
2-x-x-1-4-06-04-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan TPS						
2-x-x-1-4-08--2	Biaya Pemeliharaan Buldozer						
2-x-x-1-4-09-01-2	Biaya Pemeliharaan alat-alat Akt. Darat Bermotor						
2-x-x-1-4-09-02-2	Biaya Pemeliharaan alat-alat Akt. Darat tidak Bermotor						
2-x-x-1-4-10-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin						
2-x-x-1-4-11-02-2	Biaya Pemeliharaan mesin pemotong rumput						
2-x-x-2--2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan					1.066.300.550,00	
2-x-x-2-1--2	Belanja Pegawai/Personalia					337.775.000,00	
2-x-x-2-1-01-01-2	Honorarium Tim/Panitia					76.025.000,00	Jumlah jam kerja
2-x-x-2-1-01-02-2	Honor/Upah Bulanan						
2-x-x-2-1-01-03-2	Honor/Upah Harian						
2-x-x-2-1-01-04-2	Tunjangan Khusus Tenaga Kesehatan						
2-x-x-2-1-02-02-2	Uang Lembur Harian						

2-x-x-2-1-03-01-2	Insentif untuk Panitia Pelaksana				261.750.000,00	Jumlah Orang	
2-x-x-2-1-03-02-2	Upah Pungut						
2-x-x-2-1-03-03-2	Insentif Untuk Peserta						
2-x-x-2-2- - -2	Belanja Barang Dan Jasa				724.890.550,00		
2-x-x-2-2-01-01-2	Biaya Bahan baku						
2-x-x-2-2-01-02-2	Biaya Bahan/Bibit Tanaman/Benih Ikan						
2-x-x-2-2-01-03-2	Biaya bahan obat-obatan						
2-x-x-2-2-01-04-2	Biaya Stimulan						
2-x-x-2-2-01-05-2	Biaya Alat tulis				25.908.350,00	Jmlh. Pemakaian Inv.	
2-x-x-2-2-01-06-2	Biaya bahan pelajaran, bahan material lainnya						
2-x-x-2-2-01-07-2	Biaya Bahan Kampanye Kesehatan/Materi Pameran						
2-x-x-2-2-01-08-2	Biaya Penunjang Kegiatan						
2-x-x-2-2-02-01-2	Biaya Jasa tenaga Kerja Non PNS				322.473.000,00	Jumlah Orang	
2-x-x-2-2-02-02-2	Biaya Transportasi dan Akomodasi				12.600.000,00	Direct Tracing A9	
2-x-x-2-2-02-03-2	Biaya Dokumentasi				45.150.000,00	Direct Tracing A9	
2-x-x-2-2-02-04-2	Biaya dekorasi				1.750.000,00		
2-x-x-2-2-02-05-2	Biaya Jasa Pelaksana dan Pihak Ketiga						
2-x-x-2-2-02-06-2	Biaya Jasa Konsultan						
2-x-x-2-2-02-07-2	Biaya Pelayanan Pengaduan Masyarakat						
2-x-x-2-2-03-01-2	Biaya Cetak				147.475.000,00		
2-x-x-2-2-03-02-2	Biaya Fotocopy				20.633.000,00		
2-x-x-2-2-03-03-2	Biaya Penggandaan				10.000.000,00		
2-x-x-2-2-04-01-2	Biaya Sewa Tempat				2.400.000,00	Luas gedung	
2-x-x-2-2-04-02-2	Biaya Sewa Kendaraan/alat angkutan						
2-x-x-2-2-04-03-2	Biaya Sewa Perlengkapan						
2-x-x-2-2-04-04-2	Biaya Sewa Peralatan						
2-x-x-2-2-04-05-2	Biaya Sewa Sound System/OHP						
2-x-x-2-2-05-01-2	Biaya Makanan dan Minuman				68.200.000,00		
2-x-x-2-2-07-01-2	Biaya Pakaian Kerja						
2-x-x-2-2-07-02-2	Biaya Pakaian Petugas Parkir						
2-x-x-2-3- - -2	Belanja Perjalanan Dinas				3.635.000,00		
2-x-x-2-3-01-01-2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah				3.635.000,00	Jmlh Frek. Perjalanan	
2-x-x-2-3-01-02-2	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah						
2-x-x-2-4- - -2	Belanja Pemeliharaan						
2-x-x-2-4-02-01-2	Pemeliharaan Jalan Kota Singkawang						
2-x-x-2-4-02-04-2	Biaya Pemeliharaan fasilitas jalan						
2-x-x-2-4-03-01-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan Air						
2-x-x-2-4-03-03-2	Biaya Pemeliharaan Jaringan Drainage (swakelola)						
2-x-x-2-4-06-01-2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2-x-x-2-4-06-02-2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal						
2-x-x-2-4-06-03-2	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Sekolah						
2-x-x-2-4-06-04-2	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung SD/MI						
2-x-x-2-4-07-03-2	Biaya Pemeliharaan Taman						
2-x-x-2-4-09-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan darat Bermotor						
2-x-x-2-4-12-01-2	Biaya Pemeliharaan alat Kantor						
2-x-x-2-4-12-02-2	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga						

2-x-x-2-4-12-03-2	Biaya Pemeliharaan Komputer					
2-x-x-2-4-12-04-2	Biaya Pemeliharaan Meja/Kursi					
2-x-x-2-4-14-02-2	Biaya pemeliharaan alat kesehatan					
2-x-x-2-4-15-01-2	Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium					
2-x-x-2-4-18-03-2	Biaya Pemeliharaan pohon/Tanaman Pelindung					
2-x-x-3- - - - -2	Belanja Modal					
2-x-x-3-1-11-01-2	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung					
2-x-x-3-1-13-01-2	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan bukan gedung					
2-x-x-3-2-01-01-2	Belanja Modal Jalan Lingkungan Aspal					
2-x-x-3-2-01-02-2	Belanja Modal jalan Pembuatan Jalan Setapak Beton					
2-x-x-3-2-02-01-2	Belanja Modal Peningkatan Jalan dan Jembatan					
2-x-x-3-3-01-01-2	Belanja Modal Pengembangan daerah rawa semelagi					
2-x-x-3-3-01-02- -2	Pengembangan Daerah Rawa Sungai Rasau					
2-x-x-3-3-01-03-2	Pengembangan Irigasi					
2-x-x-3-3-02-01-2	Pembuatan Saluran Pasangan Batu Jalan Semelagi					
2-x-x-3-3-02-02-2	Normalisasi Saluran dan Sungai					
2-x-x-3-3-02-03-2	Perkutan Tebing Sungai					
2-x-x-3-3-03-01-2	Belanja Modal Pelabuhan Laut Kota Singkawang					
2-x-x-3-4-01-01-2	Rehabilitasi intake Perdesaan					
2-x-x-3-4-01-02-2	Pembangunan Sarana air bersih					
2-x-x-3-4-02-01-2	Belanja Modal Pembangunan Drainage lingk. Permukiman					
2-x-x-3-5-01-01-2	Belanja Modal Jaringan Perpipaan Perdesaan					
2-x-x-3-5-02-01-2	Belanja Modal Jaringan Listrik					
2-x-x-3-6-01-01-2	Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Kerja					
2-x-x-3-6-01-02-2	Belanja Modal Pemb. Dan Pemeliharaan Sarana Perikanan					
2-x-x-3-6-01-03-2	Belanja Modal Pemb. dan Peningkatan Sarana Kesehatan					
2-x-x-3-6-01-04-2	Belanja Modal Pemb. Dan Pemeliharaan Gedung					
2-x-x-3-6-01-05-2	Belanja Modal Pemb. Sarana promosi Perindagkop					
2-x-x-3-6-01-06-2	Belanja Modal Pemb. Sarana dan prasarana sekolah					
2-x-x-3-6-02-01-2	Belanja Modal bangunan					
2-x-x-3-6-04-01-2	Belanja Modal Prasarana Kota/Gedung OR					
2-x-x-3-11-02-02-2	Belanja Modal Peralatan Taman					
2-x-x-3-11-02-03-2	Belanja Modal Peralatan Kebersihan					
2-x-x-3-12-01-01-2	Belanja Modal Alat Kantor					
2-x-x-3-12-02-01-2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					
2-x-x-3-12-03-01-2	Belanja Modal Komputer					
2-x-x-3-12-04-01-2	Belanja Modal Meja Kursi					
2-x-x-3-14-02-01-2	Belanja Modal alat-alat kesehatan					
2-x-x-3-15-01-01-2	Belanja Modal alat Laboratorium					
2-x-x-3-15-02-01-2	Belanja Modal alat praktik/peraga sekolah					
2-x-x-3-18-02-01-2	Belanja Modal Bibit Tanaman Pohon Tanjung					
		Direct Tracing A8	Cost Driver	Cost Driver		Cost Driver

4.3.5. Menentukan Konsumsi Resource Driver Untuk Masing-masing aktivitas

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tentang *resource driver* dan *resource driver consumption* setiap aktivitas. Dimana, setiap aktivitas disajikan pada tabel 4.

Berdasarkan perhitungan dalam tabel 4, *Activity-Based process Costing* untuk aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam berbagai unit kerja/dinas/instansi disajikan pada tabel 5.

Selanjutnya untuk kepentingan penentuan kos objek suatu biaya, berbagai aktivitas yang telah diidentifikasi perlu dikelompokkan ke dalam *cost pool*. Aktivitas yang memiliki penyebab yang sama digabungkan menjadi satu *cost pool*. Tabel 6 melukiskan reklasifikasi biaya dengan dibentuknya *Activity Cost Pool*. Data yang dipakai berasal dari tabel 5.

Tabel 4
Resource Driver Consumption Setiap Aktivitas

Sekwilda						
Kode	Aktivitas	Jmlh Orang	Jmlh Jam Kerja	Jumlah Pemakaian Inventaris	Luas Gedung	Frekuensi Perjalanan
A3	Seleksi Surat Masuk dan Surat Keluar	10%	20%	5%	30%	
A4	Pengarsipan dan rekapitulasi	35%	35%	30%	50%	
A5	Observasi dan peninjauan lapangan	30%	10%	10%		35%
A6	Penggandaan dan penerangan	10%	15%	40%	20%	65%
A7	Pengadaan dan pendataan Invetarisasi Kota	15%	20%	15%		
	Total	100%	100%	100%	100%	100%

Badan Pengembangan Darah					
Kode	Aktivitas	Jmlh Orang	Jmlh Jam Kerja	Jumlah Pemakaian Inventaris	Luas Gedung
A9	Pengumpulan data	30	30%	25%	15%
A10	pengolahan data	40%	30%	35%	80%
A11	pendistribusian data	30%	40%	40%	5%
	Total	100%	100%	100%	100%

Badan Pengawasan Darah				
Kode	Aktivitas	Jmlh orang	Luas Gedung	Jumlah pemakaian inventaris
A12	peninjauan lapangan	50%	20%	20%
A13	Monitoring program	50%	80%	80%
A14	Total	100%	100%	100%

Tabel 5
Perhitungan Activity Based Process Costing

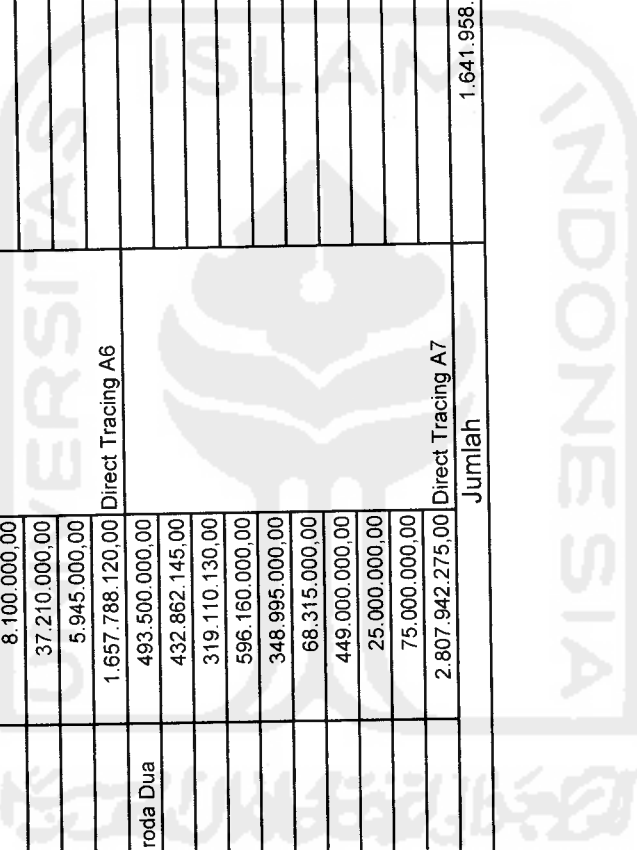
DPRD					
Kode	Rekening Biaya	Jumlah	Cost Drivers	(A1) Penyusunan dan evaluasi Program dan anggaran	
	Semua biaya	1.688.117.386,00	Direct Tracing A1	1.688.117.386,00	
				1.688.117.386,00	

Kepala Daerah					
Kode	Rekening Biaya	Jumlah	Cost Drivers	(A1) Penyusunan dan evaluasi Program dan anggaran	
	Semua biaya	2.310.579.475,00	Direct Tracing A1	2.310.579.475,00	
				2.310.579.475,00	

Sekda		Cost Drivers		(A3) Seleksi Surat Masuk dan surat keluar	(A4) Pengarsipan dan Rekapitulasi	(A5) Observasi dan Peninjauan Lapangan
Kode	Rekening Biaya	Jumlah				
2-x-x-1-1-03-01-1	Gaji Pokok	2.678.888.908,00				
2-x-x-1-1-03-02-1	Tunjangan Keluarga	232.796.386,00				
2-x-x-1-1-03-03-1	Tunjangan Jabatan	232.796.386,00				
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Beras	210.944.670,00				
2-x-x-1-1-03-06-1	Pembayaran PPH	87.975.133,00				
2-x-x-1-1-03-07-1	Iuran Asuransi Kesehatan	220.993.068,00				
2-x-x-1-1-05-01-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas	404.840.000,00				
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan	728.087.000,00				
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	193.480.096,00				
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus	49.185.250,00				
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Big	19.791.000,00				
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten	82.420.000,00				
2-x-x-1-1-06-05-1	Dana Taktis Kepala Dinas	899.960.000,00				
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Kesejahteraan Pegawai	3.250.486.784,00				
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	284.115.000,00				
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Upah Pungut (Bahan Galian golongan C)	399.842.100,00				
2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan	245.246.815,00				
2-x-x-1-2-06- -2	Biaya Pakaian Dinas	29.983.800,00				
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif	967.048.000,00				
2-x-x-1-1-03-09-2	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	511.500.000,00				
2-x-x-1-1-05-07-2	Biaya Studi Banding Keluar daerah	51.600.000,00				
2-x-x-2-1-03-01-2	Insentif untuk Panitia Pelaksana	12.220.000,00				
2-x-x-2-2-02-01-2	Biaya Jasa tenaga Kerja Non PNS	86.883.000,00				
	Jumlah	11.881.093.396,00	Jumlah Orang	1.188.109.339,60	4.158.382.688,60	3564328019,80
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/Panitia	913.000.825,00				
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upah Harian	24.945.000,00				
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan	134.971.040,00				
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian	5.710.000,00				
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas	2.825.000,00				
2-x-x-2-1-01-01-2	Honorarium Tim/Panitia	85.535.000,00				
2-x-x-2-1-02-02-2	Uang Lembur Harian	2.500.000,00				
	Jumlah	1.169.486.865,00	Jumlah jam Kerja	233.897.373,00	409320402,8	116.948.686,50
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	34.979.290,00				
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	199.983.878,00				
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	19.948.400,00				
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	99.979.325,00				

2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik	148.479.915,00			
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon	149.982.732,00			
2-x-x-1-2-02-03-1	Biaya Air	34.963.500,00			
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah	95.108.900,00			
2-x-x-1-4-04-01-1	Biaya Pemeliharaan Alat studio	5.325.000,00			
2-x-x-1-4-04-02-1	Biaya pemeliharaan alat Komunikasi	5.000.000,00			
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	49.943.348,00			
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	49.985.600,00			
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	49.923.050,00			
2-x-x-2-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis	131.143.135,00			
2-x-x-2-2-04-03-1	Biaya Sewa Perlengkapan	1.870.000,00			
2-x-x-2-2-04-04-1	Biaya Sewa peralatan	4.200.000,00			
2-x-x-2-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	4.315.300,00			
2-x-x-1-2-02-01-2	Biaya Listrik	670.189.315,00			
2-x-x-2-2-01-01-2	Biaya Bahan baku	92.650.000,00			
2-x-x-2-2-01-05-2	Biaya Alat tulis	21.050.000,00			
2-x-x-2-2-02-04-2	Biaya dekorasi	10.500.000,00			
2-x-x-2-2-04-03-2	Biaya Sewa Perlengkapan	21.000.000,00			
	Jumlah	1.900.520.688,00	jmlh Pemakaian Inventaris	95.026.034,40	190052068,80
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.903.900,00			
2-x-x-1-3-01-02-1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.449.970.000,00			
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor	349.976.097,00			
2-x-x-1-4-09-04-1	Biaya Asuransi Kendaraan Roda 4 (46 Unit)	105.000.000,00			
2-x-x-2-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi	110.027.000,00			
2-x-x-2-2-04-02-1	Biaya Sewa Kendaraan/Angkutan	6.962.000,00			
2-x-x-2-2-02-02-2	Biaya Transportasi dan Akomodasi	5.485.000,00			
2-x-x-2-3-01-01-2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	17.050.000,00			
2-x-x-2-3-01-02-2	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.430.000,00			
	Jumlah	2.156.803.997,00	Jmlh Frekuensi perjalanan	-	754881399
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	99.646.613,00			
2-x-x-1-4-06-02-1	Biaya Pemeliharaan Bangunan gedung tempat tinggal	74.659.775,00			
2-x-x-1-4-06-04-1	Biaya Pemeliharaan halaman dan taman	74.943.400,00			
2-x-x-2-2-01-01-1	Biaya Bahan Bangunan	19.550.000,00			
		268.799.788,00	Luas Gedung	80639936,4	134399894
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu	199.997.301,00			
2-x-x-2-4-14-03-1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan	5.000.000,00			
2-x-x-2-05-01-2	Biaya Makanan dan Minuman	16.432.000,00			
	Jumlah	221.429.301,00	Alokasi Pro rata	44285860,2	44285860,2
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	749.996.478,00			

2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	99.978.724,00		
2-x-x-2-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi	194.536.000,00		
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak	92.723.930,00		
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	91.019.029,00		
2-x-x-2-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi	194.536.000,00		
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak	92.723.930,00		
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	91.019.029,00		
2-x-x-2-2-02-03-2	Biaya Dokumentasi	8.100.000,00		
2-x-x-2-2-03-01-2	Biaya Cetak	37.210.000,00		
2-x-x-2-2-03-02-2	Biaya Fotocopy	5.945.000,00		
	Jumlah	1.657.788.120,00		
Direct Tracing A6				
2-x-x-3-9-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua	493.500.000,00		
2-x-x-3-12-01- -1	Belanja Modal Alat Kantor	432.862.145,00		
2-x-x-3-12-02- -1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	319.110.130,00		
2-x-x-3-12-03- -1	Belanja Modal Komputer	596.160.000,00		
2-x-x-3-12-04- -1	Belanja Modal Meja Kursi	348.995.000,00		
2-x-x-3-13-01- -1	Belanja Modal Alat Studio	68.315.000,00		
2-x-x-3-13-02- -1	Belanja Modal Alat Komunikasi	449.000.000,00		
2-x-x-3-16-01- -1	Belanja Modal Buku	25.000.000,00		
2-x-x-3-15-01-01-2	Belanja Modal alat Laboratorium	75.000.000,00		
	Jumlah	2.807.942.275,00		
Direct Tracing A7				
	Jumlah	1.641.958.543,60	5.316.545.051,95	4.670.496.034,25



Sekda	Rekening Biaya	Jumlah	Cost Drivers	(A6) Penggandaan dan penerangan	(A7) Pengadaan dan pendataan Inventaris
Kode					
2-x-x-1-1-03-01-1	Gaji Pokok	2.678.888.908,00			
2-x-x-1-1-03-02-1	Tunjangan Keluarga	232.796.386,00			
2-x-x-1-1-03-03-1	Tunjangan Jabatan	232.796.386,00			
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Beras	210.944.670,00			
2-x-x-1-1-03-06-1	Pembayaran PPH	87.975.133,00			
2-x-x-1-1-03-07-1	Juran Asuransi Kesehatan	220.993.088,00			
2-x-x-1-1-05-01-1	Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar ikatan dinas	404.840.000,00			
2-x-x-1-1-05-02-1	Biaya pelatihan dan Kursus Keterampilan	728.087.000,00			
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	193.480.096,00			
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus	49.185.250,00			
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Brg	19.791.000,00			
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten	82.420.000,00			
2-x-x-1-1-06-05-1	Dana Taktis Kepala Dinas	899.960.000,00			
2-x-x-1-1-07-01-1	Uang Kesejahteraan Pegawai	3.250.496.784,00			
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	284.115.000,00			
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya Upah Pungut (Bahan Galian golongan C)	399.842.100,00			
2-x-x-1-2-02-09-1	Biaya Pemungutan	245.246.815,00			
2-x-x-1-2-06--2	Biaya Pakaian Dinas	29.983.800,00			
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif	967.048.000,00			
2-x-x-1-1-03-09-2	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	511.500.000,00			
2-x-x-1-1-05-07-2	Biaya Studi Banding Keluar daerah	51.600.000,00			
2-x-x-2-1-03-01-2	Insentif untuk Panitia Pelaksana	12.220.000,00			
2-x-x-2-2-02-01-2	Biaya Jasa tenaga Kerja Non PNS	86.883.000,00			
	Jumlah	11.881.093.396,00	Jumlah Orang	1.188.109.339,60	1.782.164.009,40
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia	913.000.825,00			
2-x-x-2-1-01-03-1	Honorarium/Upah Harian	24.945.000,00			
2-x-x-2-1-02-01-1	Uang Lembur Borongan	134.971.040,00			
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian	5.710.000,00			
2-x-x-2-1-02-03-1	Uang Lembur Harian Lepas	2.825.000,00			
2-x-x-2-1-01-01-2	Honorarium Tim/Panitia	85.535.000,00			
2-x-x-2-1-02-02-2	Uang Lembur Harian	2.500.000,00			
	Jumlah	1.169.486.865,00	Jumlah jam Kerja	175.423.029,75	233.897.373,00
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	34.979.290,00			
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	199.983.878,00			
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	19.948.400,00			
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	99.979.325,00			

2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	99.978.724,00	
2-x-x-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi	194.536.000,00	
2-x-x-2-03-01-1	Biaya Cetak	92.723.930,00	
2-x-x-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	91.019.029,00	
2-x-x-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi	194.536.000,00	
2-x-x-2-03-01-1	Biaya Cetak	92.723.930,00	
2-x-x-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	91.019.029,00	
2-x-x-2-02-03-2	Biaya Dokumentasi	8.100.000,00	
2-x-x-2-03-01-2	Biaya Cetak	37.210.000,00	
2-x-x-2-03-02-2	Biaya Fotocopy	5.945.000,00	
	Jumlah	1.657.788.120,00	Direct Tracing A6
2-x-x-3-9-01-02-1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda Dua	493.500.000,00	
2-x-x-3-12-01-.-1	Belanja Modal Alat Kantor	432.862.145,00	
2-x-x-3-12-02-.-1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	319.110.130,00	
2-x-x-3-12-03-.-1	Belanja Modal Komputer	596.160.000,00	
2-x-x-3-12-04-.-1	Belanja Modal Meja Kursi	348.995.000,00	
2-x-x-3-13-01-.-1	Belanja Modal Alat Studio	68.315.000,00	
2-x-x-3-13-02-.-1	Belanja Modal Alat Komunikasi	449.000.000,00	
2-x-x-3-16-01-.-1	Belanja Modal Buku	25.000.000,00	
2-x-x-3-15-01-01-2	Belanja Modal alat Laboratorium	75.000.000,00	
	Jumlah	2.807.942.275,00	Direct Tracing A7
	Jumlah	3.623.709.060,35	
		2.345.425.345,80	

Dinas Pendapatan

Kode	Rekening Biaya	Jumlah	Cost Drivers	(A8) Pengumpulan sumber dana masyarakat
	Semua biaya	145.689.779,00	Direct Tracing A8	145.689.779,00
				145.689.779,00

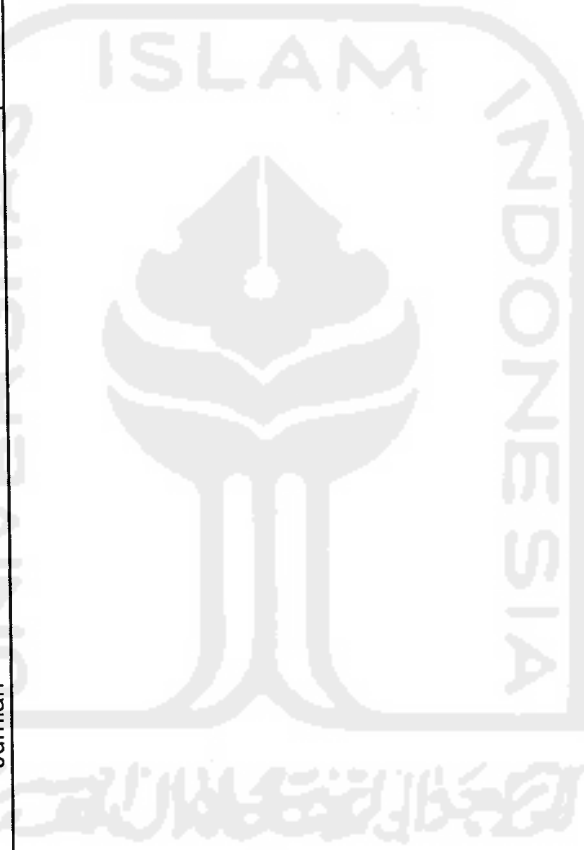
Bdan Pengembangan dan perencanaan kota

Kode	Rekening Biaya	Jumlah	Cost Drivers	(A9) Pengumpulan data	(A10) Pengolahan data	(A11) Pendistribusian data
2-x-x-1-1-03-01-1	Gaji Pokok	252.392.374,00				
2-x-x-1-1-03-02-1	Tunjangan Keluarga	20.594.720,00				
2-x-x-1-1-03-03-1	Tunjangan Jabatan	66.300.000,00				
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Beras	17.181.390,00				
2-x-x-1-1-03-06-1	Pembayaran PPH	11.119.059,00				
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	43.100.000,00				
2-x-x-1-1-06-02-1	Bendaharawan Umum Daerah dan Staf Khusus	9.000.000,00				
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Btg	18.000.000,00				
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	1.200.000,00				
2-x-x-2-1-03-01-2	Insentif untuk Panitia Pelaksana	261.750.000,00	Jumlah Orang	21.019.126,290	280.255.017,20	210.191.262,90
	Jumlah	700.637.543,00				
2-x-x-2-1-02-02-1	Uang Lembur Harian	41.427.000,00				
2-x-x-2-1-01-01-2	Honorarium Tim/Panitia	76.025.000,00				
	Jumlah	117.452.000,00	jumlah jam kerja	35.235.600,00	35.235.600,00	46.980.800,00
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	1.500.000,00				
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	12.000.000,00				
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00				
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	1.500.000,00				
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Telepon	12.794.379,00				
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	7.000.000,00				
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	18.000.000,00				
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	1.000.000,00				
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00				
2-x-x-2-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis	500.000,00				
2-x-x-2-2-01-05-2	Biaya Alat tulis	25.908.350,00				
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	1.600.000,00				
	Jumlah	84.152.729,00	jumlah pemakaian inv.	21.038.182,25	29.453.455,15	33.661.091,60
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	3.000.000,00				
2-x-x-2-2-04-01-2	Biaya Sewa Tempat	2.400.000,00				
	Jumlah	5.400.000,00	Luas Gedung	810.000,00	4.320.000,00	270.000,00
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor	1.000.000,00				
2-x-x-2-2-02-02-2	Biaya Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00				
2-x-x-2-2-02-03-2	Biaya Dokumentasi	45.150.000,00				
	Jumlah	58.750.000,00	Direct tracing A9			
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	3.500.000,00	Direct tracing A10			
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman	975.200,00	Direct Tracing A11			
				21.076.210,072,25	349.264,072,35	291.103.154,50

Badan Pengawasan Kota

Kode	Rekening Biaya	Jumlah	Cost Drivers	(A12) Peninjauan lapangan		(A13) Monitoring program	
2-x-x-1-1-03-01-1	Gaji Pokok	470.645.997,00					
2-x-x-1-1-03-02-1	Tunjangan Keluarga	278.075.470,00					
2-x-x-1-1-03-03-1	Tunjangan Jabatan	29.504.728,00					
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Beras	66.120.000,00					
2-x-x-1-1-03-06-1	Pembayaran PPH	22.627.680,00					
2-x-x-1-1-03-07-1	Iuran Asuransi Kesehatan	11.418.119,00					
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	35.900.000,00					
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Big	9.000.000,00					
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten	18.000.000,00					
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	1.200.000,00					
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	1.200.000,00					
2-x-x-2-1-01-01-1	Honorarium Tim/panitia	70.700.000,00					
2-x-x-2-2-02-01-1	Biaya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	29.998.500,00					
	Jumlah	1.044.390.494,00	Jumlah Orang	522.195.247,00			522.195.247,00
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	957.700,00					
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	14.990.300,00					
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	996.900,00					
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	1.389.900,00					
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik	3.908.065,00					
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon	4.331.129,00					
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	10.120.600,00					
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	14.998.575,00					
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	1.930.000,00					
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	2.250.000,00					
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	1.499.500,00					
2-x-x-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis	3.749.400,00					
2-x-x-2-02-03-1	Biaya Dokumentasi	500.000,00					
2-x-x-2-02-04-1	Biaya dekorasi	400.000,00					
2-x-x-2-03-01-1	Biaya Cetak	7.878.000,00					
2-x-x-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	3.499.800,00					
2-x-x-3-12-02- -1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	450.000,00					
2-x-x-3-12-03- -1	Belanja Modal Komputer	1.500.000,00					
2-x-x-3-12-04- -1	Belanja Modal Meja Kursi	2.500.000,00					
2-x-x-3-13-01- -1	Belanja Modal Alat Studio	3.750.000,00					
	Jumlah	81.599.869,00					
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah	1.200.500,00	Jmlh Pemakaian inv.	240.100,00			960.400,00
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman	45.400,00					
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian	11.000.000,00					

2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat	6.961.000,00	
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu	5.000.000,00	
2-x-x-2-2-05-01-1	Biaya Makan dan Minum	34.190.000,00	
	Jumlah	58.396.900,00	Alokasi pro rata
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	4.909.850,00	Luas Gedung
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.000.000,00	
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor	1.491.000,00	
2-x-x-2-2-02-02-1	Biaya Transportasi dan akomodasi	12.840.000,00	
	Jumlah	294.240.850,00	Direct tracing A12
2-x-x-1-2-02-08-1	Biaya penyusunan P Hasil Pemeriksaan (PHP 1).	5.300.000,00	Direct Tracing A13
	Jumlah	551.633.797,00	552.354.097,00



Tabel 6
Pembentukan Activity Cost Pool

Pool		Jumlah
Pool Perencanaan		3.998.696.861,00
Pool Pelayanan Jasa		5.924.673.707,25
Pool Pengarsipan		9.303.928.941,35
Pool Pendataan		25.340.286.359,25

Kode	Aktivitas	Jumlah
A1	Penyusunan dan Evaluasi Program dan Anggaran	1.688.117.386,00

Kode	Aktivitas	Jumlah
A2	Koordinasi Program dan Kegiatan daerah	2.310.579.475,00

Kode	Aktivitas	Jumlah
A3	Seleksi Surat Masuk dan Surat Keluar	1.641.958.543,60
A4	Pengarsipan dan rekapitulasi	5.316.545.051,95
A5	Observasi dan peninjauan lapangan	4.670.496.034,25
A6	Pengandaan dan penerangan	3.623.709.060,35
A7	Pengadaan dan pendataan Inventarisasi Kota	2.345.425.345,80

Kode	Aktivitas	Jumlah
A9	Pengumpulan Sumber dana masyarakat	145.689.779,00

Kode	Aktivitas	Jumlah
A10	Pengumpulan data	21.076.210.072,00
A11	pengolahan data	349.264.072,40
A12	pendistribusian data	291.103.154,50

Kode	Aktivitas	Jumlah
A13	peninjauan lapangan	556.133.797,00
A14	Monitoring program	552.354.097,00

Dalam analisis ini perlu ditentukan *activity driver* untuk setiap *activity cost pool* sebagai berikut:

<i>Activity cost pool</i>	<i>Activity driver</i>
Pool Perencanaan	taksiran waktu yang diperlukan
Pool Pelayanan Jasa	jumlah program yang dilaksanakan
Pool Pengarsipan	jumlah dokumen transaksi
Pool Pendataan	prosentase penggunaan data

Setelah ditentukan *activity driver*, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data statistik tentang konsumsi aktivitas oleh masing2 jenis *cost object*. Selanjutnya berdasarkan daata tersebut dihitung *activity cost* untuk setiap program. Dalam penelitian ini data konsumsi aktivitas merupakan konsumsi. Langkah tersebut disajikan pada tabel 7.

Berdasar tabel 7 tersebut dapat dihitung *cost object* dengan menjumlahkan biaya dalam pool penerimaan, pool pelayanan jasa, pool pengarsipan, dan pool pendataan. Perhitungan *object cost pool* tersebut dapat dilihat pada tabel 8. Untuk *cost* per unit disajikan pada tabel 9 di mana *unit measurement* yang dicantumkan merupakan pemisalan.

Untuk keperluan pelaporan biaya laporan kos bersih untuk setiap program diilustrasikan pada tabel 10. sedangkan pelaporan *unit cost* dari program diilustrasikan pada tabel 11.

Tabel 7
Perhitungan Activity Consumption Factors dan Activity Cost

Biaya Pool Perencanaan
3.998.696.861,00

Kode	Cost Object		Taksiran Waktu Perencanaan	ABC Cost
	Program			
A	Umum Pemerintahan		12%	479.843.623,32
B	Pertanian		4%	159.947.874,44
C	Perikanan Dan Kelautan		4%	159.947.874,44
D	Pertambangan Dan Energi		4%	159.947.874,44
E	Kehutanan		4%	159.947.874,44
F	Kesehatan		8%	319.895.748,88
G	Pendidikan		12%	479.843.623,32
H	Sosial		8%	319.895.748,88
I	Penataan Ruang		4%	159.947.874,44
J	Permukiman		4%	159.947.874,44
K	Pekerjaan Umum		6%	239.921.811,66
L	Perhubungan		6%	239.921.811,66
M	Lingkungan Hidup		4%	159.947.874,44
N	Olah Raga		4%	159.947.874,44
O	Kepariwisata		8%	319.895.748,88
P	Pertanian		4%	159.947.874,44
Q	Perindustrian dan perdagangan		4%	159.947.874,44
	TOTAL		100%	3.998.696.861,00

Biaya Pool Pelayanan Jasa
5.924.673.707,25

Cost Object		Jumlah Program Yang Dilaksanakan	ABC Cost
Kode	Program		
A	Umum Pemerintahan	14%	829.454.319,02
B	Pertanian	8%	473.973.896,58
C	Perikanan Dan Kelautan	4%	236.986.948,29
D	Pertambangan Dan Energi	2%	118.493.474,15
E	Kehutanan	6%	355.480.422,44
F	Kesehatan	8%	473.973.896,58
G	Pendidikan	10%	592.467.370,73
H	Sosial	6%	355.480.422,44
I	Penataan Ruang	6%	355.480.422,44
J	Permukiman	4%	236.986.948,29
K	Pekerjaan Umum	8%	473.973.896,58
L	Perhubungan	4%	236.986.948,29
M	Lingkungan Hidup	2%	118.493.474,15
N	Olah Raga	2%	118.493.474,15
O	Kepariwisataan	6%	355.480.422,44
P	Pertanahan	6%	355.480.422,44
Q	Perindustrian dan perdagangan	4%	236.986.948,29
	TOTAL	100%	5.924.673.707,25

Biaya Pool Pengarsipan
9.303.928.941,35

Kode	Cost Object		Jumlah Dokumen Transaksi	ABC Cost
	Program			
A	Umum Pemerintahan		4%	372.157.157,65
B	Pertanian		4%	372.157.157,65
C	Perikanan Dan Kelautan		4%	372.157.157,65
D	Pertambangan Dan Energi		6%	558.235.736,48
E	Kehutanan		8%	744.314.315,31
F	Kesehatan		20%	1.860.785.788,27
G	Pendidikan		12%	1.116.471.472,96
H	Sosial		4%	372.157.157,65
I	Penataan Ruang		2%	186.078.578,83
J	Permukiman		2%	186.078.578,83
K	Pekerjaan Umum		8%	744.314.315,31
L	Perhubungan		4%	372.157.157,65
M	Lingkungan Hidup		2%	186.078.578,83
N	Olah Raga		4%	372.157.157,65
O	Kepariwisataan		4%	372.157.157,65
P	Pertanian		8%	744.314.315,31
Q	Perindustrian dan perdagangan		4%	372.157.157,65
	TOTAL		100%	9.303.928.941,35

Biaya Pool Pendataan
25.340.286.359,25

Cost Object		Prosentase Penggunaan Data	ABC Cost
Kode	Program		
A	Umum Pemerintahan	8%	2.027.222.908,74
B	Pertanian	6%	1.520.417.181,56
C	Perikanan Dan Kelautan	4%	1.013.611.454,37
D	Pertambangan Dan Energi	6%	1.520.417.181,56
E	Kehutanan	4%	1.013.611.454,37
F	Kesehatan	10%	2.534.028.635,93
G	Pendidikan	4%	1.013.611.454,37
H	Sosial	10%	2.534.028.635,93
I	Penataan Ruang	6%	1.520.417.181,56
J	Permukiman	4%	1.013.611.454,37
K	Pekerjaan Umum	6%	1.520.417.181,56
L	Perhubungan	6%	1.520.417.181,56
M	Lingkungan Hidup	8%	2.027.222.908,74
N	Olah Raga	6%	1.520.417.181,56
O	Kepariwisataan	4%	1.013.611.454,37
P	Pertanahan	4%	1.013.611.454,37
Q	Perindustrian dan perdagangan	4%	1.013.611.454,37
	TOTAL	100%	25.340.286.359,25

Tabel 8
Activity Based Object Cost

Cost Object		Pool Perencanaan	Pool Pelayanan Jasa	Pool Pengarsipan	Pool Pendataan	Total
Kode	Program					
A	Umum Pemerintahan	479.843.623,32	829.454.319,02	372.157.157,65	2.027.222.908,74	3.708.678.008,73
B	Pertanian	159.947.874,44	473.973.896,58	372.157.157,65	1.520.417.181,56	2.526.496.110,23
C	Perikanan Dan Kelautan	159.947.874,44	236.986.948,29	372.157.157,65	1.013.611.454,37	1.782.703.434,75
D	Pertambangan Dan Energi	159.947.874,44	118.493.474,15	558.235.736,48	1.520.417.181,56	2.357.094.266,63
E	Kehutanan	159.947.874,44	355.480.422,44	744.314.315,31	1.013.611.454,37	2.273.354.066,56
F	Kesehatan	319.895.748,88	473.973.896,58	1.860.785.788,27	2.534.028.635,93	5.188.684.069,66
G	Pendidikan	479.843.623,32	592.467.370,73	1.116.471.472,96	1.013.611.454,37	3.202.393.921,38
H	Sosial	319.895.748,88	355.480.422,44	372.157.157,65	2.534.028.635,93	3.581.561.964,90
I	Penataan Ruang	159.947.874,44	355.480.422,44	186.078.578,83	1.520.417.181,56	2.221.924.057,27
J	Permukiman	159.947.874,44	236.986.948,29	186.078.578,83	1.013.611.454,37	1.596.624.855,93
K	Pekerjaan Umum	239.921.811,66	473.973.896,58	744.314.315,31	1.520.417.181,56	2.978.627.205,11
L	Perhubungan	239.921.811,66	236.986.948,29	372.157.157,65	1.520.417.181,56	2.369.483.099,16
M	Lingkungan Hidup	159.947.874,44	118.493.474,15	186.078.578,83	2.027.222.908,74	2.491.742.836,16
N	Olah Raga	159.947.874,44	118.493.474,15	372.157.157,65	1.520.417.181,56	2.171.015.687,80
O	Kepariwisata	319.895.748,88	355.480.422,44	372.157.157,65	1.013.611.454,37	2.061.144.783,34
P	Pertanahan	159.947.874,44	355.480.422,44	744.314.315,31	1.013.611.454,37	2.273.354.066,56
Q	Perindustrian dan Perdagangan	159.947.874,44	236.986.948,29	372.157.157,65	1.013.611.454,37	1.782.703.434,75
	TOTAL	3.998.696.861,00	5.924.673.707,30	9.303.928.941,33	25.340.286.359,29	44.567.585.868,92

Tabel 9
Cost Per Unit

Kode	Cost Object Program	Total		Kuantitas Program*	Cost Per Unit
		Overhead Cost			
A	Umum Pemerintahan	3.708.678.008,73		3500000	Rp 1.059,62
B	Pertanian	2.526.496.110,23		2500000	Rp 1.010,60
C	Perikanan Dan Kelautan	1.782.703.434,75		2000000	Rp 891,35
D	Pertambangan Dan Energi	2.357.094.266,63		3000000	Rp 785,70
E	Kehutanan	2.273.354.066,56		2500000	Rp 909,34
F	Kesehatan	5.188.684.069,66		5000000	Rp 1.037,74
G	Pendidikan	3.202.393.921,38		3200000	Rp 1.000,75
H	Sosial	3.581.561.964,90		3500000	Rp 1.023,30
I	Penataan Ruang	2.221.924.057,27		2500000	Rp 888,77
J	Permukiman	1.596.624.855,93		2000000	Rp 798,31
K	Pekerjaan Umum	2.978.627.205,11		3500000	Rp 851,04
L	Perhubungan	2.369.483.099,16		2500000	Rp 947,79
M	Lingkungan Hidup	2.491.742.836,16		2500000	Rp 996,70
N	Olah Raga	2.171.015.687,80		3000000	Rp 723,67
O	Kepariwisata	2.061.144.783,34		2000000	Rp 1.030,57
P	Pertanahan	2.273.354.066,56		2500000	Rp 909,34
Q	Perindustrian dan perdagangan	1.782.703.434,75		1800000	Rp 990,39
	TOTAL	44.567.585.868,92			

*Nilai pada kuantitas program merupakan permisalan

4.3.6. Perbandingan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Singkawang Dengan Anggaran Dengan *Activity Based Costing*

Anggaran belanja pada Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar Rp. 168.429.665.334,00, namun setelah dilakukan proses *activity based costing* dimana dilakukan analisis terhadap biaya-biaya yang menambah nilai bagi pelaksanaan program (*value added*) dan yang tidak (*Non Value Added*). Dan dilakukan pengurangan atas biaya yang tidak menambah nilai tersebut, maka jumlah anggaran belanja adalah sebesar Rp. 166.880.139.289,00. Maka terlihat efisiensi yang diciptakan dalam proses *Activity Based Costing* adalah sebesar Rp. 1.549.526.045,00

Sebagai ilustrasi, pada tabel 11, dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai anggaran belanja untuk tahun anggaran 2004/2005 sebesar Rp.1.782.703.434,75, setelah dilakukan pemisahan terhadap *Non Value Added* biaya, maka nilai biaya dinas Perindustrian dan perdagangan adalah sebesar, Rp.1.652.289.584,00. jadi, total biaya yang diperlukan dinas pendidikan dalam menghasilkan produknya dalam hal ini pelaksanaan programnya, adalah sebesar Rp. Rp 2.975.675.702,75. biaya distribusi dari bagian lain yang dihitung berdasarkan proses ABC diikutsertakan dalam jumlah tersebut.

Tabel 10
Ilustrasi Laporan Net Cost

Kode	Program	TOTAL
A	Umum Pemerintahan	
	Belanja	6.383.927.293,73
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B	Pertanian	
	Belanja	4.174.102.940,23
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C	Perikanan Dan Kelautan	
	Belanja	2.302.762.791,75
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D	Pertambangan Dan Energi	
	Belanja	2.357.094.266,63
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E	Kehutanan	
	Belanja	2.273.354.066,56
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
F	Kesehatan	
	Belanja	11.341.685.497,66
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
G	Pendidikan	
	Belanja	43.275.361.824,38
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H	Sosial	
	Belanja	4.907.651.648,90
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I	Penataan Ruang	
	Belanja	2.575.546.011,27
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
J	Permukiman	
	Belanja	3.043.625.859,93
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K	Pekerjaan Umum	
	Belanja	5.012.737.985,11
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L	Perhubungan	
	Belanja	3.385.692.112,16
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M	Lingkungan Hidup	
	Belanja	3.305.930.075,16
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N	Olah Raga	
	Belanja	2.765.985.241,80
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O	Kepariwisataan	
	Belanja	2.829.594.393,34
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P	Pertanahan	
	Belanja	2.626.976.020,56
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q	Perindustrian dan Perdagangan	
	Belanja	2.975.675.702,75
	Pendapatan	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Program Cost</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	<i>Net Cost Operasi</i>	Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tabel 11
Laporan Cost per Unit

Laporan Cost per Unit
Program Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2004/2005
Jasa yang ditawarkan pada masyarakat: 1800000(a)

	Jumlah	Unit Cost
ya Produksi		
Biaya Yang dibebankan secara langsung		
2-x-x-1-1-03-01-1	Gaji Pokok	69.332.835,00
2-x-x-1-1-03-02-1	Tunjangan Keluarga	73.548.992,00
2-x-x-1-1-03-03-1	Tunjangan Jabatan	92.516.000,00
2-x-x-1-1-03-05-1	Tunjangan Beras	57.351.540,00
2-x-x-1-1-03-06-1	Pembayaran PPH	25.533.051,00
2-x-x-1-1-06-01-1	Santunan Jabatan Struktural Pengganti Telepon	52.850.000,00
2-x-x-1-1-06-03-1	Santunan Pengelola Pemegang Kas/Brg	9.450.000,00
2-x-x-1-1-06-04-1	Biaya Emelumenten	18.000.000,00
2-x-x-1-2-01-01-1	Biaya Alat Listrik dan Elektronika	2.000.000,00
2-x-x-1-2-01-02-1	Biaya Alat Tulis	30.000.000,00
2-x-x-1-2-01-03-1	Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00
2-x-x-1-2-01-04-1	Biaya Peralatan Kebersihan	1.200.000,00
2-x-x-1-2-01-05-1	Biaya Pengisian Tabung	500.000,00
2-x-x-1-2-01-06-1	Biaya pengisian Gas	740.000,00
2-x-x-1-2-02-01-1	Biaya Listrik	17.771.000,00
2-x-x-1-2-02-02-1	Biaya Telepon	9.590.800,00
2-x-x-1-2-02-04-1	Biaya Surat Kabar/Majalah	1.690.500,00
2-x-x-1-2-02-06-1	Biaya Paket Pengiriman	621.400,00
2-x-x-1-2-02-07-1	Biaya jasa tenaga kerja non PNS	2.000.000,00
2-x-x-1-2-03-01-1	Biaya Cetak	32.500.000,00
2-x-x-1-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	7.500.000,00
2-x-x-1-2-05-01-1	Biaya Makanan dan minuman Harian	17.400.000,00
2-x-x-1-2-05-02-1	Biaya makanan dan minuman rapat	49.998.000,00
2-x-x-1-2-05-03-1	Biaya Makan dan Minum Tamu	1.000.000,00
2-x-x-1-3-01-01-1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00
2-x-x-1-4-05-02-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik	500.000,00
2-x-x-1-4-05-03-1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Telepon	500.000,00
2-x-x-1-4-06-01-1	Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	4.999.500,00
2-x-x-1-4-09-01-1	Biaya pemeliharaan alat angkutan bermotor	7.000.000,00
2-x-x-1-4-12-01-1	Biaya Pemeliharaan alat kantor	2.000.000,00
2-x-x-1-4-12-02-1	Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00
2-x-x-1-4-12-03-1	Biaya Pemeliharaan Komputer	4.500.000,00
2-x-x-1-4-12-04-1	Biaya Pemeliharaan meja dan kursi	2.000.000,00
2-x-x-2-1-03-01-1	Insentif	110.492.500,00
2-x-x-2-2-01-05-1	Biaya Alat Tulis	2.500.000,00
2-x-x-2-2-03-01-1	Biaya Cetak	1.500.000,00
2-x-x-2-2-03-02-1	Biaya Fotocopy	1.500.000,00
2-x-x-3-12-01- -1	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00
2-x-x-2-1-01-01-2	Honorarium Tim/Panitia	120.240.000,00
2-x-x-2-2-01-01-2	Biaya Bahan baku	99.610.000,00
2-x-x-2-2-01-05-2	Biaya Alat tulis	23.563.850,00
2-x-x-2-2-01-06-2	Biaya bahan pelajaran, bahan material lainnya	89.058.000,00
2-x-x-2-2-01-07-2	Biaya Bahan Kampanye Kesehatan/Maten Pameran	9.000.000,00
2-x-x-2-2-02-02-2	Biaya Transportasi dan Akomodasi	32.860.000,00
2-x-x-2-2-02-03-2	Biaya Dokumentasi	6.000.000,00

2-x-x-2-2-02-04-2	Biaya dekorasi	19.150.000,00
2-x-x-2-2-03-01-2	Biaya Cetak	14.900.000,00
2-x-x-2-2-03-02-2	Biaya Fotocopy	7.285.000,00
2-x-x-2-2-04-01-2	Biaya Sewa Tempat	32.000.000,00
2-x-x-2-2-04-02-2	Biaya Sewa Kendaraan/alat angkutan	2.500.000,00
2-x-x-2-2-04-05-2	Biaya Sewa Sound System/OHP	1.500.000,00
2-x-x-2-2-05-01-2	Biaya Makanan dan Minuman	76.850.000,00
2-x-x-2-2-07-01-2	Biaya Pakaian Kerja	1.100.000,00
2-x-x-2-3-01-01-2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	21.296.500,00

Total biaya pada program perindag	1.782.703.434,75	Rp	990,39
total biaya distribusi dari bagian lain	1.323.386.118,00	Rp	735,21
Total biaya produksi	Rp 3.106.089.552,75	Rp	1.725,61
Non Value added cost	-130.413.850,00		
Pendapatan	Rp -		0
Net cost program perindag	Rp 2.975.675.702,75	Rp	1.653,15



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari uraian dan analisis bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dituntut untuk efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya, sehingga metode-metode dari organisasi bisnis yang dianggap dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan usahanya pun diadaptasi oleh organisasi sektor publik, terutama pada pemerintahan.
2. Pengelompokan perkiraan dalam Anggaran Belanja Pemerintah Kota Singkawang tidak dirancang untuk menganalisis efektifitas pembiayaan suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu program. Untuk itu diperlukan suatu sistem pelaporan yang mempergunakan sistem akuntansi biaya yang memperlihatkan belanja yang diperlukan untuk suatu program.
3. Proses dalam *Activity-Based Costing* yaitu analisis terhadap *value added* dan *non value added cost* dapat mendeteksi adanya biaya-biaya yang tidak menambah nilai bagi terlaksananya program unit kerja/dinas/instansi. Sehingga pemotongan biaya atas biaya-biaya tersebut dapat menambah

kefisienan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

4. Akuntansi biaya berdasarkan *Activity-Based Costing* mengembangkan *unit cost* masing-masing program yang diupayakan pemerintah daerah sehingga mempermudah dalam proses evaluasi.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Untuk itu diuraikan saran bagi Pemerintah Kota Singkawang dan bagi penelitian lebih lanjut:

1. Perhitungan *cost program* yang dilakukan pada penelitian ini masih banyak yang mendasarkan pada asumsi yaitu pada perhitungan *resource driver consumption* dan *activity drivers factors*. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh data mengenai hal tersebut.
2. Akuntansi biaya yang dikembangkan belum memperhatikan sisi pendapatan untuk keperluan penghitungan kos bersih/*net cost* program. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan untuk setiap program.
3. *Unit measurement* suatu program tidak dikuantifikasi dalam penelitian ini, untuk keperluan evaluasi perlu dikembangkan *unit measurement* terhadap suatu program.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- _____, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, September 2002
- Banu Witono, *Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, September 2003, Hal 151-168
- Depkeu RI, *Draft Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah: Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah*, Jakarta, Mei 2002
- Gede Edy Prasetya, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005
- Hongren, C. T., Datar, S.M., Foster, G., *Akuntansi Biaya: Penekanan Manajerial Jilid I*, PT. Indeks kelompok Gramedia, Jakarta, 2005
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2002
- _____, *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- _____, Gatot Soepriyatno, *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, *Standar Akuntansi Pemerintahan: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Februari 2004
- _____, *Standar Akuntansi Pemerintahan: Penyajian Laporan Keuangan*, Jakarta, Februari 2004

- _____, *Standar Akuntansi Pemerintahan: Penyajian Laporan Keuangan*, Jakarta, Februari 2004
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
- Mardiasmo, *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, JAAI, Vol. 6, Yogyakarta, Juni 2002, Hal. 63-82
- _____, *Akuntansi Sektor Publik*: ANDI, Yogyakarta, 2002
- _____, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2002
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*,
- _____, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*,
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*,
- Revisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, Oktober 2000
- Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 1: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Umum Bagan Perkiraan Standar Jurnal Standar*, Jakarta, Januari 2002
- _____, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 2: Pos-pos Neraca*, Jakarta, Januari 2002
- _____, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 3: Pos-Pos Perhitungan APBD*, Januari 2002
- _____, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Buku 4: Prosedur Akuntansi*, Jakarta, Januari 2002

Triyono, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.1. September 2002, Hal. 139-152

Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, Bayumedia, Malang, 2005

